

TESIS

**ANALISIS KOMPREHENSIF: ALOKASI ANGGARAN, INTEGRASI
PENGUNAAN TEKNOLOGI, DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT, DAN
DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN MELALUI REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



NURUL HAERANI

2230232019

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
2024**

**ANALISIS KOMPREHENSIF: ALOKASI ANGGARAN, INTEGRASI
PENGUNAAN TEKNOLOGI, DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT, DAN
DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN MELALUI REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Manajemen

Disusun dan diajukan oleh

Nurul Haerani

kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
2024**

TESIS

ANALISIS KOMPREHENSIF : ALOKASI ANGGARAN, INTEGRASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI, DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN MELALUI REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

NURUL HAERANI
2230232019

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis Pada Tanggal **21 Maret 2024**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Ketua


Dr. Hasniaty, SE., M.Si

Anggota



Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si

Program Studi Magister Manajemen

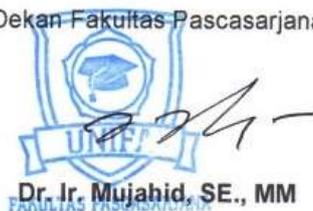
Ketua Program Studi



UNIFA
FAKULTAS PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si

Dekan Fakultas Pascasarjana



UNIFA
FAKULTAS PASCA SARJANA

Dr. Ir. Mujahid, SE., MM

TESIS

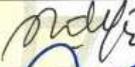
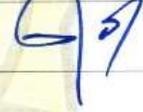
ANALISIS KOMPREHENSIF : ALOKASI ANGGARAN, INTEGRASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI, DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN MELALUI REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

NURUL HAERANI
2230232019

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **21 Maret 2024** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hasniaty , SE., M.Si	Ketua	
2	Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si	Sekretaris	
3	Dr. Ir. Mujahid, SE., MM	Anggota	
4	Dr. Sri Adrianti Muin, SE., M.Si	Anggota	
5	Dr. Abdul Samad A, SE, M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Pascasarjana
Universitas Fajar


Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Nurul Haerani
Nomor Induk Mahasiswa : 2230232019
Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan, atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Maret 2024
Yang menyatakan,



Nurul Haerani

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah melimpahkan berkah sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Tak lupa pula, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Penelitian ini kami persembahkan sebagai dedikasi dan kontribusi kami dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen, terutama dalam Analisis Komprehensif: Alokasi Anggaran, Integrasi Penggunaan teknologi, Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran melalui Realisasi Program Dan Kegiatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses penyusunan tesis ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si, Rektor Universitas Fajar, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh mahasiswanya, termasuk kami.
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM, Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar, atas bimbingan, semangat, dorongan, serta nasehat yang berharga dalam proses penelitian ini.
3. Ibu Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si, Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Fajar, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada mahasiswa RPL, termasuk kami, di Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Tim Pembimbing, Dr. Hasniaty, S.E., M.Si, dan Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi., S.E., M.Si, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Fajar, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berarti bagi kami dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Orang tua tercinta, yang tidak henti-hentinya mendoakan dan mengingatkan kami. Tanpa doa dan pengorbanan mereka, mustahil rasanya kami bisa berada dalam posisi ini.
7. Suami tercinta dan anak-anak kami, yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan dalam setiap langkah kami.
8. Pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atas kerjasama dan bantuannya dalam penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat kami, yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat dalam perjalanan kami menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan kata pengantar ini.

Penajam, Maret 2024

Nurul Haerani

ABSTRAK

Nurul Haerani. *Analisis Komprehensif: Alokasi Anggaran, Integrasi Penggunaan Teknologi, Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Melalui Realisasi Program Dan Kegiatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (dibimbing oleh Hasniaty dan Nurmadhani Fitri Suyuthi)*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh alokasi anggaran dinas, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, realisasi program dan kegiatan secara langsung terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan pengaruh tidak langsung alokasi anggaran dinas, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka dan statistik dengan spss dan uji sobel untuk menguji hipotesis penelitian. sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang berjumlah 100 responden.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Alokasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, Integrasi penggunaan teknologi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, Dukungan pemerintah pusat berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Realisasi program dan kegiatan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran dinas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Alokasi anggaran dinas berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan dan dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program melalui efektivitas pengelolaan anggaran.

Kata Kunci: alokasi anggaran, integrasi integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, realisasi program dan pengelolaan anggaran yang efektif

ABSTRACT

Nurul Haerani. *Comprehensive Analysis: Budget Allocation, Integration of Technology Use, Central Government Support, and Its Impact on the Effectiveness of Budget Management Through the Realization of Programs and Activities at the Food Security Office of Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan Province (supervised by Hasniaty and Nurmadhani Fitri Suyuthi).*

The aim of this research is to determine and analyze the influence of service budget allocations, integration of the use of technology, central government support, realization of programs and activities directly on the effectiveness of budget management and the indirect influence of service budget allocations, integration of the use of technology, central government support, on the effectiveness of budget management through the realization of programs and activities. Quantitative research methods are research where the results are presented in the form of descriptions using numbers and statistics with SPSS and Sobel tests to test research hypotheses. The sample in this research was employees of the North Penajam Paser Regency Food Security Service, totaling 100 respondents.

The results of this research found that the budget allocation carried out by the Penajam Regency Food Security Service had a positive and significant effect on the effectiveness of budget management. The integration of the use of technology in the Penajam Regency Food Security Service did not show a significant effect on the effectiveness of budget management. Central government support had no effect. significant impact on the effectiveness of budget management. The realization of programs and activities has a significant positive effect on the effectiveness of budget management. Service budget allocations have a negative and significant effect on the realization of programs and activities. The integration of the use of technology has a positive and significant effect on the realization of programs and activities. Central government support has a positive and significant effect on the realization of programs and activities. Service budget allocations have no significant effect on the effectiveness of budget management through the realization of programs and activities. The integration of the use of technology has a positive and significant effect on the effectiveness of budget management through the realization of programs and activities and central government support has a positive and significant effect on the realization of programs through the effectiveness of budget management.

Keywords: budget allocation, integrated use of technology, central government support, program realization and effective budget management

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori dan Konsep	17
1. Grand Theory.....	17
2. Alokasi Anggaran	19
3. Integrasi penggunaan teknologi	29
4. Dukungan Pemerintah Pusat	33
5. Efektivitas Pengelolaan Anggaran.....	38
6. Realisasi Program dan Kegiatan	42
7. Keterkaitan Hubungan antara Variabel	47
B. Kerangka Konseptual.....	54
C. Hipotesis	55
D. Penelitian Terdahulu	56
E. Definisi Operasional	67
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	70
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	71
C. Populasi dan Sampel	72
D. Jenis dan Sumber Data.....	73
E. Metode Pengumpulan Data.....	77
F. Teknik Analisis Data.....	78

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan	87
B. Deskripsi Responden	114
C. Uji Asumsi Klasik Model 1	119
D. Uji Asumsi Klasik Model 2	124
E. Pengujian Kualitas Data	129
F. Analisis Deskripsi Variabel	131
G. Analisis Hasil Penelitian	137
H. Pembahasan	155
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	183
B. Saran	187
DAFTAR PUSTAKA.....	189
KUESIONER PENELITIAN.....	192
LAMPIRAN	198

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Hasil Laporan Realisasi Anggaran Belanja	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	56
Tabel 2.2 Definisi Operasional	68
Tabel 3.1 Range Score	76
Tabel 4.1 Frekuensi dan Persentase Jenis Kelamin	115
Tabel 4.2 Frekuensi dan Persentase Pendidikan	116
Tabel 4.3 Frekuensi dan Persentase Pengalaman Kerja	117
Tabel 4.4 Frekuensi dan Persentase Umur	118
Tabel 4.5 Output Uji Multikolinearitas	122
Tabel 4.6 Output Uji Autokorelasi	124
Tabel 4.7 Durbin-Watson Test (Uji DW)	124
Tabel 4.8 Output Uji Multikolinearitas	127
Tabel 4.9 Output Uji Autokorelasi	129
Tabel 4.10 Durbin-Watson Test (Uji DW)	129
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas	130
Tabel 4.12 Hasil Uji Reabilitas	131
Tabel 4.13 Model Summary ^b	138
Tabel 4.14. ANOVA ^a	138
Tabel 4.15 Coefficients ^a	138
Tabel 4.16 Model Summary ^b	140
Tabel 4.17 ANOVA ^a	141
Tabel 4.18 Coefficients ^a	141
Tabel 4.19 Output Ringkasan Coefficients Variabel X1,Z dan Y	144
Tabel 4.20 Output Ringkasan Coefficients Variabel X2, Z dan Y	148
Tabel 4.21 Output Ringkasan Coefficients Variabel X3,Z dan Y	151
Tabel 4.22. Hubungan antara variabel penelitian	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengaruh antar variabel	54
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	72
Gambar 3.2 Diagram jalur persamaan struktural 1.....	82
Gambar 3.3 Diagram jalur persamaan struktural 2.....	83
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis	85
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan	87
Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Histogram	120
Gambar 4.3 Uji Normalitas dengan P – P Plot	121
Gambar 4.4 Output Uji Heteroskedastisitas	123
Gambar 4.5 Uji Normalitas dengan Histogram	125
Gambar 4.6 Uji Normalitas dengan P – P Plot	126
Gambar 4.7 Output Uji Heteroskedastisitas	128
Gambar 4.8 Diagram jalur persamaan struktural 1.....	139
Gambar 4.9 Diagram jalur persamaan struktural 2.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu organisasi atau instansi membuat anggaran karena anggaran memiliki peranan yang penting dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Anggaran merupakan rancangan awal yang disusun secara sistematis, dimana setiap rancangan atau rencana menunjukkan mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang serta memberikan manfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga setiap organisasi diharapkan dapat memperhatikan dan meningkatkan kinerja dengan value for money yaitu secara efektif dan efisien (Amelinda et al. 2022).

Menurut (Hastipa. S 2021), pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Tahapan pelaksanaan anggaran dimulai ketika UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan. Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU APBN selanjutnya menerbitkan keputusan Presiden (KEPPRES) tentang pedoman

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut (Hastipa. S 2021), dalam sebuah instansi, diperlukan adanya perencanaan anggaran agar berjalan secara efektif dalam mendukung efektivitas pengelolaan anggaran perusahaan dengan menggunakan analisis efektivitas yakni bertujuan untuk menggambarkan kemampuan publik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dan analisis efisiensi yang digunakan untuk mengukur apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran (*role setting*) dalam usaha pencapaian sasaran anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran anggaran dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran untuk memungkinkan melaksanakan perannya (Magno, Hakim, and Domai 2015). Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun (Wida Puspawardani 2017).

Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi (Basri 2013).

Salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan

anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Renaldi 2021).

Salah satu cara untuk mengoptimalkan pelayanan publik: melalui realisasi pengelolaan anggaran yang efektif dengan pengalokasian anggaran, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, yang berdampak terhadap realisasi program dan kegiatan melalui pengelolaan anggaran yang efektif. Undang-undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan juga telah mengamanatkan, bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan ini diformulasikan dengan sangat baik dalam pernyataan berikut, "Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan gizi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi yang diatur dengan undang-undang".

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas terjadi pembagian peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah

dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Tampubolon 2016). Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi. Dalam perspektif inilah masyarakat bisnis turut bertanggung jawab dalam membangun ketahanan pangan termasuk di dalamnya penumbuhan kegiatan ekonomi yang menimbulkan income dan meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan serta mendukung upaya diversifikasi pangan.

Peran serta masyarakat termasuk industri dan bisnis menjadi lebih penting lagi dalam era otonomi daerah dengan segala variasi yang ada. Harus diakui bahwa keragaman ekologi, biodiversitas, budaya dan sosial belum berhasil digunakan secara optimal dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lokal (Indrayani 2017). Basis inilah yang harus digunakan dalam mengembangkan agroindustri pangan lokal agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dan menciptakan pendapatan pada satu sisi serta sebagai wahana diversifikasi pangan pada sisi yang lain. Berangkat dari kerangka di atas, tujuan penulisan proposal ini adalah memberikan gambaran tentang peran teknologi dalam membangun ketahanan pangan. Penekanan akan dilakukan terhadap peran teknologi pangan dalam rangka pengembangan nilai komoditi di sepanjang rantai nilainya (Tiara, Supriyadi, and Martini 2023). Oleh karena itu pembahasan dimulai dengan pengertian-

pengertian dasar, kerangka pengembangan dan pelajaran dan pengalaman yang dapat ditarik berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan hingga saat ini.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pangan di wilayahnya. Upaya ini melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dukungan dari pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan bantuan teknis, pemerintah pusat berpotensi memberikan dorongan besar terhadap upaya Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran dan targetnya. Konteks nasional yang terkait dengan kebijakan ketahanan pangan memiliki dampak langsung pada strategi dan program di tingkat daerah. Analisis kebijakan nasional membuka wawasan mengenai arah dan prioritas yang ditekankan oleh pemerintah pusat, yang dapat memengaruhi langkah-langkah Dinas Ketahanan Pangan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena fokus pada analisis komprehensif terkait dukungan Pemerintah Pusat dan dampaknya terhadap realisasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ketahanan pangan merupakan aspek vital dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang

memiliki potensi pertanian dan perikanan seperti Kabupaten Penajam Paser Utara. Dukungan Pemerintah Pusat dalam bentuk kebijakan, alokasi anggaran, dan bantuan teknis dapat menjadi katalisator utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan. Oleh karena itu, analisis komprehensif mengenai pengelolaan anggaran yang efektif dan dampaknya pada realisasi program menjadi krusial dalam merinci dinamika yang memengaruhi ketahanan pangan di tingkat lokal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam bagi para pengambil kebijakan untuk meningkatkan strategi dan implementasi program ketahanan pangan, menciptakan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Begitu pula dengan fenomena yang terjadi terkait integritas teknologi di dinas ketahanan pangan Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup beberapa aspek yang relevan dengan integrasi penggunaan teknologi untuk memperkuat ketahanan pangan. Berikut beberapa hal yang mungkin menjadi bagian dari fenomena terkait Adanya Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP): terkait pengelolaan data: Perkembangan teknologi dapat membantu Dinas Ketahanan Pangan dalam mengelola data terkait produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat memungkinkan pemetaan dan analisis yang lebih baik terkait dengan

kebutuhan pangan di berbagai wilayah dan monitoring dan evaluasi: Teknologi dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program ketahanan pangan. Sensor dan sistem pemantauan otomatis dapat membantu mengumpulkan data secara real-time terkait dengan produksi pertanian dan distribusi pangan.

Pemanfaatan E-Learning: Dinas ketahanan pangan dapat menggunakan platform e-learning untuk memberikan pelatihan kepada petani terkait dengan praktik pertanian yang berkelanjutan, manajemen risiko, dan penerapan teknologi yang tepat, dan aksesibilitas informasi: Teknologi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas informasi terkait dengan inovasi pertanian, praktik terbaik, dan perkembangan pasar, sehingga petani dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dalam menghadapi fenomena ini, penting bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan mematuhi standar keamanan, privasi, dan etika. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi juga perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rantai pasok pangan.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju pada saat ini, berguna untuk organisasi maupun pribadi. Beberapa lembaga sudah menerapkan teknologi informasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan suatu lembaga dalam meningkatkan kinerja pegawai. Terkait hal tersebut teknologi informasi dapat mempengaruhi pekerjaan pegawai di suatu lembaga. Pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik

dan cepat dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Manfaat integrasi penggunaan teknologi informasi berhubungan timbal balik antara pengguna setelah dan sebelum menggunakan teknologi informasi. Agar teknologi informasi mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi, teknologi informasi harus diterima terlebih dahulu sebelum digunakan oleh penggunanya (Amelia 2019).

Masyarakat membutuhkan Pelayanan Publik yang baik, keseimbangan antara kekuasaan yang mereka miliki dan tanggung jawab (*akuntabilitas*) yang diberikan kepada mereka yang mereka layani. Birokrat dapat lebih efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan perlindungan masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencapai dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Nurafifah 2022).

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) merupakan isu yang paling krusial dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai organisasi sektor publik, melaporkan hasil kinerja dan mengukur kinerja organisasi sesuai dengan pedoman kinerja organisasi pemerintah (Agustin 2019), atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan *Good Government*

Governance ini maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dirasakan semakin berat karena aparaturnya dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam bidang Ketahanan Pangan. Dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Dukungan pemerintah pusat terhadap Dinas Ketahanan Pangan dapat mencakup berbagai aspek untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan efektif, beberapa fenomena terkait dukungan pemerintah pusat terhadap dinas ketahanan pangan terkait alokasi anggaran, peningkatan anggaran: Peningkatan alokasi anggaran untuk dinas ketahanan pangan adalah suatu fenomena positif. Dana yang memadai dapat digunakan untuk mendukung program-program peningkatan produktivitas pertanian, pelatihan petani, investasi dalam teknologi pertanian, dan infrastruktur yang mendukung rantai pasok pangan dan fleksibilitas anggaran: Pemerintah pusat dapat memberikan fleksibilitas kepada dinas ketahanan pangan dalam

penggunaan anggaran, sehingga dapat merespons cepat terhadap perubahan kondisi seperti bencana alam atau krisis pangan. Dalam semua aspek ini, kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya seperti petani, produsen, dan masyarakat setempat sangat penting untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara menjalankan fungsi sebagai berikut : Dalam bidang-bidang di Dinas Ketahanan Pangan, yaitu di Bidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan, Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan dan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Berikut Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Hasil Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2019	4.944.351.340	4.262.166.853	86,20
2020	3.925.295.740	3.686.275.418	93,91
2021	5.947.487.904	3.743.406.023	62,94
2022	4.945.212.768	4.603.797.356	93,10
2023	7.163.879.882	6.413.486.879	89,53

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan PPU

Dari hasil laporan realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan laporan realisasinya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi yaitu ketidaktetapan kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan pada realisasi tiap tahunnya. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah anggaran dan realisasi Dinas Ketahanan Pangan belum menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya. Semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara .

Semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut. Latar belakang tersebut sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul:

“Analisis Komprehensif Alokasi Anggaran, Integrasi Penggunaan Teknologi, Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran melalui Realisasi Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian yang telah disebutkan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran?
2. Apakah integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran?
3. Apakah dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran?
4. Apakah alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan?
5. Apakah integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan?
6. Apakah dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan?
7. Apakah realisasi program dan kegiatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran?

8. Apakah alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan?
9. Apakah integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan?
10. Apakah dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh alokasi anggaran dinas terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh integrasi penggunaan teknologi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dukungan pemerintah pusat terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh alokasi anggaran dinas realisasi program dan kegiatan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis realisasi program dan kegiatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atas penelitian sejenis yang akan dilakukan pihak -pihak lain di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi peneliti, akan menjadi acuan dalam memberikan Pelayanan Publik dan penerapan Teknologi Informasi (TI) memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan realisasi program anggaran. Pelayanan kepada masyarakat di bidang ketahanan pangan khususnya di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara,
- b. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berharga guna pengambilan kebijakan strategis dan mengetahui kelebihan dan kelemahan yang mungkin terjadi dalam proses penyusunan anggaran yang telah dilakukan selama ini.
- c. Bagi para akademisi, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- d. Bagi unit -unit Pelayanan Publik yang lain, digunakan sebagai acuan penerapan Pelayanan Publik dan penerapan Teknologi Informasi (TI) sehingga kinerja organisasi akan lebih profesional, efektif dan efisien.
- e. Bagi masyarakat luas, sebagai media informasi yang memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Grand Theory (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena hubungan yang ada antara agen dan prinsipal. Agen diberi kontrak untuk melakukan tugas bagi prinsipal dengan tanggung jawab tertentu, sementara prinsipal memiliki kewajiban memberikan imbalan atas jasa yang diberikan oleh agen. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menyebabkan konflik keagenan, di mana keduanya menginginkan keuntungan maksimal dan berusaha menghindari risiko.

Penerapan teori keagenan di pemerintah daerah, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, melibatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta legislatif dengan rakyat. Implikasinya dapat berupa efisiensi, tetapi seringkali juga berdampak negatif seperti perilaku oportunistik. Agen, dalam hal ini pemerintah daerah, memiliki keunggulan dalam informasi keuangan dibandingkan dengan prinsipal, sementara prinsipal dapat memanfaatkan kepentingan pribadi karena memiliki kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya, terutama dalam proses penganggaran dan penyajian laporan

keuangan untuk memperlihatkan kinerja yang baik dan mempertahankan posisinya di mata rakyat.

Teori keagenan juga menegaskan bahwa agen cenderung bersikap oportunistik dan enggan mengambil risiko. Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai eksekutif tidak hanya terbatas pada penyajian laporan keuangan yang akurat, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk memastikan akses bagi para pengguna laporan keuangan, yaitu para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai agen akan berupaya untuk menghindari risiko berupa ketidakpercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk membuktikan bahwa kinerja mereka dalam pengelolaan keuangan daerah telah baik dan dapat dipercaya (Belkaouli dalam Bandariy, 2011:14).

Hubungan antara teori keagenan dan penelitian ini terletak pada peran pemerintah sebagai agen dalam pengelolaan pemerintahan. Pemerintah, sebagai agen, harus menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai pihak prinsipal. Prinsipal tentu mengharapkan hasil kinerja yang baik dari agen, yang salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik. Bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik terwujud tergantung pada strategi yang diterapkan oleh

pemerintah. Dengan demikian, pemilihan strategi akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2. Alokasi Anggaran

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP) yang merupakan Komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI, untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan. (2009;8) menyatakan bahwa: "Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer. Pembiayaan yang diukur dalam suatu rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode".

Selain itu menurut "Government Accounting Standard Board (GASB)" bahwa : "Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu".

(Basri 2013), anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang

sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya.

Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategis sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi

(Nur et al. 2021), anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan selama satu periode kedepan yang tertuang secara kuantitatif. Menurut (Mardiasmo 2022), budget yaitu pernyataan yang berkaitan dengan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode yang telah ditentukan kemudian dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran

dapat diartikan sebagai *managerial plan for action* yang bermanfaat dalam memfasilitasi tercapainya tujuan dari suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan atau sektor publik. Ada beberapa hal yang harus tercakup dalam anggaran pemerintah, yaitu *public accountability*, *planning* dan *controlling*. Anggaran merupakan dokumen penting bagi semua instansi pemerintah maupun instansi swasta. Itu karena anggaran digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Anggaran memuat berbagai komponen mulai dari *expense*, *revenue* dan *financing* yang dilakukan oleh instansi. Budget memiliki peran yang penting bagi pemerintah dan jajarannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rancangan awal (Prasetyo and Nugraheni 2020).

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun (Hastipa. S 2021).

Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa anggaran sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan : (Syarifudin, Surasni, and Inapty 2016).

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Anggaran terkait perencanaan keuangan untuk masa depan yang mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2018). Bentuk rencana suatu program organisasi dinyatakan dalam bentuk keuangan yang menggambarkan mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/ defisit, pembiayaan serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan dalam anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD (Mahmudi, 2016).

Anggaran pemerintah harus mencakup public accountability, planning dan controlling. Karena dari hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan atau sektor publik. Dengan begitu anggaran

bermanfaat dalam memfasilitasi ketercapaian organisasi atau dapat diartikan sebagai managerial plan for action. Dan dengan dinyatakan ukuran finansial dapat menentukan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tersebut (Amelinda et al. 2022).

Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah (Robert and Govindarajan 2010) anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut.
2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
4. Merupakan komitmen manajemen; menejer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuantujuan anggaran.
5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu.
7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran (*role setting*) dalam usaha pencapaian

sasaran anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran anggaran dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran untuk memungkinkan melaksanakan perannya .

Menurut (Bastian 2007), anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Menurut (Mardiasmo 2018) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi :

- a. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar

pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- c. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
- e. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.

Proses penyusunan anggaran atau siklus anggaran pada dasarnya meliputi beberapa tahap berikut ini (Mardiana 2017):

1. Tahap Persiapan Tahap ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh secara akurat. Berikut ini beberapa penjelasan tentang tahap persiapan:
 - a. Bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai.
 - b. Berdasarkan format anggaran tersebut, masing-masing unit di pemerintahan mengajukan anggaran di unit masing-masing.
 - c. Bagian anggaran akan

melakukan konsolidasi terhadap anggaran masing-masing bagian/unit kerja. d. Anggaran konsolidasi ini kemudian direview dan diadakan dengar pendapat. e. Persetujuan terhadap anggaran tersebut oleh kepala pemerintahan.

2. Tahap Persetujuan Tahap persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Berikut beberapa penjelasannya: a. Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintahan diajukan ke lembaga legislatif. b. Lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu akan diadakan juga dengar pendapat (*public hearing*). c. Lembaga legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut.
3. Tahap Administrasi Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif. Pelaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Selain itu, dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.
4. Tahap Pelaporan Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan pelaporan sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan.

5. Tahap Pemeriksaan Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (feed back) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

Anggaran menjadi penghubung antara sumber daya keuangan dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan keuangan. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, distribusikan dan diberi masukan.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga pada Pasal 13.

- (1) Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- (2) Alokasi anggaran Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut klasifikasi anggaran.
- (3) Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut:
 - a. kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer kepada daerah.
- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 November.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang APBN.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah atau dinas berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah atau dinas.

3. Integrasi Penggunaan Teknologi

Laju perubahan dalam perkembangan teknologi meningkat dengan sangat cepat (Kayihura, 2021). Revolusi industri ke empat atau dikenal dengan industri 4.0 membawa banyak teknologi baru pada digitalisasi proses bisnis (Ghobakhloo, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat masif di berbagai bidang. Tetapi keunggulan utama dalam integrasi penggunaan teknologi adalah peningkatan produktifitas, transparansi proses, model bisnis yang menguntungkan, peningkatan kualitas dan peningkatan kondisi kerja (Nosalska et.al, 2019) dalam (Juani 2022).

Integrasi berasal dari bahasa Latin dan bahasa Inggris, dalam bahasa latin integrasi berasal dari kata Integer, Integra, Integrum yang memiliki arti utuh, seluruhnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata Integration, yang memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan. Sehingga dapat didefinisikan integrasi merupakan penyatuan unsur-unsur dari sesuatu yang berbeda atau beraneka ragam sehingga menjadi satu kesatuan dan pengendalian terhadap konflik atau penyimpangan dari penyatuan unsur-unsur tersebut. Proses integrasi akan terjadi jika perubahan itu membawa unsur-unsur yang cocok dengan. Penambahan unsur-unsur baru di dalam proses perubahan itu menyatu di dalam kerangka kepentingan struktur yang ada (Nugroho et al. 2017).

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan perangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (Yulianto 2012).

(Amelia 2019) mengatakan bahwa teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi berperan cukup baik dalam pengembangan sistem yang akan memunculkan teknologi baru. Sedangkan menurut Rahmawati (2010), suatu alat yang terintegrasi berguna untuk menjaring, mengolah dan mengirimkan data secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai bentuk dan format yang bermanfaat bagi pengguna. Teknologi informasi terutama teknologi komputer mampu memperbaiki performa individu maupun organisasi, oleh karena itu dalam pengimplementasiannya dibutuhkan dana yang sangat besar.

Menurut (Wahyuni 2020) teknologi informasi memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan

pekerjaannya sehingga meningkatkan kinerja pegawai di semua komponen. Sarana komputer yang disediakan oleh lembaga atau organisasi mempengaruhi implementasi teknologi informasi pada lembaga. Semakin banyak fasilitas yang disediakan akan memudahkan pegawai dalam mengakses data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pegawai dalam lembaga.

Beberapa pandangan umum tentang integrasi informasi dan beberapa indikator yang mungkin relevan dalam konteks tersebut. Integrasi informasi merujuk pada penggabungan atau penyatuan informasi dari berbagai sumber atau domain untuk membentuk pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif. Beberapa indikator umum yang dapat digunakan untuk mengukur integrasi informasi melibatkan:

1. **Konektivitas:** Seberapa baik informasi dapat mengalir dan terhubung di antara berbagai sistem atau domain.
2. **Interoperabilitas:** Kemampuan sistem atau komponen untuk bekerja bersama dan saling beroperasi tanpa hambatan.
3. **Koordinasi:** Efisiensi dan efektivitas koordinasi antara berbagai entitas atau departemen dalam mengelola dan menggunakan informasi.
4. **Konsistensi:** Sejauh mana informasi konsisten dan bersifat harmonis di seluruh berbagai sumber dan sistem.

5. **Relevansi:** Tingkat relevansi informasi terhadap kebutuhan dan tujuan yang spesifik.
6. **Keamanan Informasi:** Perlindungan informasi dari ancaman dan penyalahgunaan yang mungkin timbul dari integrasi.
7. **Efisiensi dan Produktivitas:** Seberapa efisien dan produktifnya suatu sistem atau organisasi dalam mengintegrasikan dan menggunakan informasi.

Pada proses integrasi juga akan ada proses saling menarik, saling tergantung, dan saling menyesuaikan (adaptasi). Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia yaitu bagian dari sejarahnya meliputi keseluruhan sejarah. Teknologi, menurut Djyohadikusumo (1994) berkaitan erat dengan sains (science) dan perekayasaan (*engineering*). Dengan kata lain, teknologi mengandung dua dimensi, yaitu science dan engineering yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sains mengacu pada pemahaman kita tentang dunia nyata sekitar kita, artinya mengenai ciri-ciri dasar pada dimensi ruang, tentang materi dan energi dalam interaksinya satu terhadap lainnya. Makna Teknologi, menurut Capra (2004) , telah mengalami perubahan sepanjang sejarah. Teknologi, berasal dari literatur Yunani, yaitu *technologia*, yang diperoleh dari asal kata *techne*, bermakna wacana seni (Arifin and Pandowo 2020). Ketika istilah itu pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris di abad ketujuh belas, maknanya adalah pembahasan sistematis atas 'seni

terapan' atau pertukangan, dan berangsur-angsur artinya merujuk pada pertukangan itu sendiri. Pada abad ke-20, maknanya diperluas untuk mencakup tidak hanya alat-alat dan mesin-mesin, tetapi juga metode dan teknik non-material. Suatu aplikasi sistematis pada teknik maupun metode. Sekarang sebagian besar definisi teknologi, lanjut Capra (2004) menekankan hubungannya dengan sains. Ahli sosiologi Manuel Castells seperti dikutip Capra (2004) mendefinisikan teknologi sebagai 'kumpulan alat, aturan dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan.

4. Dukungan Pemerintah Pusat

Istilah "dukungan pemerintah pusat" dapat merujuk pada berbagai hal, tergantung pada konteksnya. Secara umum, dukungan pemerintah pusat dapat mencakup berbagai kebijakan, program, dan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau instansi lainnya (Sondakh, Rorong, and Ruru 2023). Berikut adalah beberapa aspek yang dapat termasuk dalam dukungan pemerintah pusat:

1. **Pembiayaan dan Dana Transfer:** Pemerintah pusat sering memberikan dana kepada pemerintah daerah atau entitas lainnya sebagai bentuk dukungan keuangan. Ini dapat termasuk transfer keuangan, hibah, atau alokasi dana untuk mendukung program-program tertentu.

2. Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah pusat memiliki peran dalam merancang kebijakan dan regulasi nasional yang memengaruhi pemerintah daerah dan sektor-sektor lainnya. Dukungan dapat berupa memberikan panduan, peraturan, atau kerangka kerja yang mendukung pencapaian tujuan nasional.
3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat pemerintah daerah atau sektor-sektor tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.
4. Infrastruktur dan Proyek Pembangunan: Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan di tingkat lokal atau regional. Ini bisa termasuk proyek-proyek transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
5. Bantuan Darurat: Dukungan pemerintah pusat juga bisa berbentuk bantuan darurat dalam mengatasi bencana alam, konflik, atau krisis lainnya yang membutuhkan respons cepat dan koordinasi tingkat nasional.

Dukungan pemerintah pusat dapat menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemerataan di seluruh wilayah suatu negara. Ini juga dapat membantu menjaga keseimbangan

dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan pelaksanaan kebijakan nasional.

Dukungan pemerintah pusat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan, sumber daya, atau bimbingan kepada pemerintah daerah, lembaga, atau sektor tertentu. Tujuan dukungan ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan prioritas pemerintah pusat (Zaelani 2019). Berikut adalah beberapa bentuk dukungan pemerintah pusat:

1. **Transfer Keuangan:** Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan finansial kepada pemerintah daerah melalui transfer keuangan. Ini dapat berupa dana perimbangan atau dana bagi hasil dari sumber daya nasional.
2. **Pemberian Hibah dan Bantuan:** Pemerintah pusat dapat memberikan hibah atau bantuan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung proyek-proyek khusus, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan layanan publik.
3. **Kebijakan Fiskal dan Pajak:** Pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung pemerintah daerah, seperti pengaturan pajak atau insentif fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
4. **Pengembangan Kapasitas:** Dukungan dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas bagi pejabat pemerintah daerah atau lembaga non-pemerintah agar dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif.

5. Koordinasi Kebijakan: Pemerintah pusat dapat berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan nasional dan lokal untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi di seluruh wilayah.
6. Pembangunan Infrastruktur: Pemerintah pusat dapat mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat daerah, termasuk transportasi, energi, air, dan fasilitas publik lainnya.
7. Bantuan Darurat dan Penanggulangan Bencana: Dukungan dapat diberikan dalam bentuk bantuan darurat dan rekonstruksi pasca-bencana untuk membantu pemerintah daerah menghadapi situasi krisis.

Dukungan pemerintah pusat ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pengembangan nasional dan lokal, serta memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dukungan pemerintah pusat mencakup berbagai bentuk bantuan, sumber daya, dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada entitas atau wilayah di bawah yurisdiksinya. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan koordinasi efektif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan di seluruh negara. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan pemerintah pusat:

1. Transfer Keuangan: Pemerintah pusat dapat mentransfer dana ke pemerintah daerah atau entitas lainnya. Ini dapat mencakup dana perimbangan atau alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan, layanan publik, atau proyek-proyek khusus di tingkat lokal.
2. Kebijakan Fiskal: Pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan kebijakan fiskal nasional, termasuk pajak dan insentif ekonomi. Kebijakan ini dapat memengaruhi pendapatan daerah dan memberikan insentif untuk pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
3. Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan finansial dan teknis untuk pembangunan infrastruktur di tingkat lokal. Ini mencakup transportasi, energi, air, dan proyek-proyek lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Bimbingan Teknis: Pemerintah pusat dapat memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, program, dan proyek.
5. Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan: Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program nasional sejalan dengan kebutuhan dan kondisi di tingkat lokal. Koordinasi yang baik membantu menciptakan keseimbangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.

6. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program.
7. Bantuan Darurat: Dukungan darurat diberikan dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau konflik. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan darurat, koordinasi tanggap darurat, dan rekonstruksi pasca-bencana.

Dukungan pemerintah pusat menjadi kunci untuk membangun sinergi dan solidaritas antara berbagai tingkatan pemerintahan, mencapai tujuan pembangunan nasional, dan menjaga keadilan dan kesejahteraan di seluruh wilayah.

5. Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Defenisi Efektivitas Menurut Mahmudi (2019:86), Efektivitas adalah “hubungan antara output dengan tujuan”. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, berarti semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Menurut (Harefa, Zebua, and Bawamenewi 2022) pentingnya laporan keuangan sebagai bukti jaminan kepada pengguna laporan keuangan otoritas yang berkuasa, bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan.

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai

output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dan income. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) (Mardiasmo 2022).

Adapun beberapa pengukuran efektivitas program yang dikemukakan Annas (2017) dalam (Wicaksana 2011) yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur efektivitas suatu program yaitu antara lain :

- 1) Ketepatan waktu, program yang telah dirumuskan harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dimaksud agar program-program tersebut menghasilkan output seperti yang diharapkan serta memberikan kepuasan kepada penerima program.
- 2) Sumber daya manusia, yang mengelola program merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program. Dalam hal ini pemilihan sumber daya manusia untuk melaksanakan program perlu dilakukan. Pemilihan sumber daya manusia ini berdasarkan kriteria

yang sesuai dengan program yang dilaksanakan. Hal ini menekankan pada prinsip “the right man on the right job”.

- 3) Mekanisme kerja, atau cara-cara yang ditempuh untuk melaksanakan program merupakan suatu aturan dan strategi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program. Apabila pegawai menerapkan mekanisme kerja yang baik, maka tujuan dari suatu program akan tercapai dengan baik pula.
- 4) Kerjasama dan komunikasi, perlu dilakukan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks ini kerjasama dan komunikasi yang terjalin diantara para penyelenggara program, dan penyelenggara program dengan sasaran program.
- 5) Penyaluran dana yang benar, adalah suatu mekanisme kerja yang menyangkut pembiayaan program. Dana yang tersedia digunakan dengan efektif dan efisien.
- 6) Tidak adanya penyimpangan, hal ini lebih menekankan pada tidak adanya penyimpangan dalam menentukan sasaran program.
- 7) Monitoring dan evaluasi, merupakan kriteria terakhir dalam mengukur efektivitas. Dalam tahapan ini menjelaskan bahwa suatu program yang sedang dijalankan.

Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi,

pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial Permata Wesh (1992) Efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan Amin Tunggul Widjaya (1993).

Menurut Handyaningrat dalam (Bastaman et al., 2020) mengatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Susilo Martoyo dalam (Wicaksana 2011) “Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. Efektivitas merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan satu sasaran sehingga tercapainya tujuan dengan efektif dan tepat dan merupakan perbandingan antara terget dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas merupakan sesuatu yang menggambarkan sebuah siklus mulai dari input, proses dan output yang mengacu pada satu hasil untuk keberhasilan program dan kegiatan (Tami & Putri, 2019). Efektivitas dalam pemerintahan dikatakan baik apabila telah berhasil dalam mencapai tujuan dan hasil program sesuai dengan target yang ditentukan. Ketika semakin tinggi kontribusi outpu terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektifnya suatu instansi dalam

kegiatan maupun program yang sedang dijalankan atau yang sedang direncanakan (Budiarso et al., 2015).

Pengelolaan anggaran belanja modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan (Aqnuh Muhamad Akbar, Burhanuddin, and Guasmin 2020).

Efektifitas pengelolaan anggaran ini merupakan suatu bentuk yang dilakukan mulai dari penyusunan anggaran sampai hingga suatu pertanggung jawaban anggaran (Shiyan et al., 2013). Anggaran dikatakan sebagai tolak ukur kinerja para pegawai yang ada di setiap instansi pemerintahan, dengan adanya anggaran otomatis dapat mempercepat pekerjaan para pegawai karena dengan suatu anggaran dapat memberikan fasilitas yang layak dipakai untuk para pegawai sehingga pekerjaan yang terhambat bisa terlaksana dengan cepat.

6. Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan mengacu pada implementasi dan pelaksanaan rencana dan aktivitas yang telah direncanakan oleh pemerintah atau organisasi. Proses ini melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan hasil yang diinginkan.

Berikut adalah beberapa langkah umum dalam realisasi program dan kegiatan:

1. Perencanaan: Tahap awal melibatkan perencanaan program atau proyek. Ini mencakup identifikasi tujuan, sasaran, dan strategi, serta penyusunan rencana tindakan yang terinci.
2. Anggaran dan Pendanaan: Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut. Ini dapat melibatkan proses penyusunan anggaran, penentuan sumber pendanaan, dan pencarian dukungan finansial.
3. Pemilihan Tim Pelaksana: Menetapkan tim atau personel yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan program atau kegiatan. Pemilihan tim yang berkualitas dan memiliki keahlian yang sesuai sangat penting untuk keberhasilan implementasi.
4. Pelaksanaan Kegiatan: Melibatkan eksekusi rencana tindakan dan aktivitas yang telah ditentukan dalam perencanaan. Ini mencakup koordinasi, pemantauan, dan pengelolaan risiko selama pelaksanaan.
5. Evaluasi dan Pemantauan: Selama pelaksanaan, penting untuk terus memantau kemajuan dan mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan. Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

6. **Penyampaian Hasil:** Setelah selesai, program atau kegiatan dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Hasil tersebut dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
7. **Pemeliharaan dan Keberlanjutan:** Beberapa program dan kegiatan mungkin memerlukan pemeliharaan atau dukungan berkelanjutan. Perencanaan untuk pemeliharaan dan keberlanjutan harus dipertimbangkan dalam tahap perencanaan awal.
8. **Pelaporan dan Akuntabilitas:** Menyusun laporan kemajuan dan hasil untuk memberikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dan pihak yang berkepentingan lainnya.
9. **Umpan Balik dan Pembelajaran:** Menerima umpan balik dari pelaksanaan program atau kegiatan dapat membantu organisasi untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan pendekatan mereka di masa depan.

Realisasi program dan kegiatan merupakan proses dinamis yang melibatkan banyak langkah dan pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang efektif, koordinasi yang baik, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dapat menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Realisasi program dan kegiatan adalah tahap penting dalam siklus manajemen proyek atau program. Proses ini melibatkan implementasi rencana yang telah disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan dan

hasil yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam realisasi program dan kegiatan:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi:
 - a. Memulai eksekusi rencana tindakan yang telah disusun selama tahap perencanaan.
 - b. Melibatkan semua tim pelaksana yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi Tim Pelaksana:
 - a. Membangun dan memelihara komunikasi yang efektif di antara anggota tim pelaksana.
 - b. Memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka.
3. Pemantauan dan Pengendalian:
 - a. Memantau kemajuan kegiatan secara teratur dengan menggunakan metode pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.
 - b. Mengidentifikasi potensi hambatan atau risiko yang mungkin muncul selama implementasi dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan yang sesuai.
4. Pengelolaan Sumber Daya:
 - a. Mengelola alokasi sumber daya seperti waktu, anggaran, dan personel untuk memastikan penggunaan yang efisien dan efektif.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan tambahan atau perubahan yang mungkin diperlukan selama pelaksanaan.

5. Kontrol Perubahan:
 - a. Menanggapi perubahan rencana atau situasi dengan cepat dan memastikan bahwa perubahan tersebut dikelola dengan baik.
 - b. Memastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak membahayakan pencapaian tujuan akhir.
6. Pelaporan Kemajuan:
 - a. Menyusun laporan kemajuan secara berkala untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - b. Menyajikan informasi yang jelas dan akurat tentang pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya.
7. Evaluasi dan Pembelajaran:
 - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program atau kegiatan.
 - b. Mempelajari pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut untuk perbaikan di masa depan.
8. Penyampaian Hasil:

Menyampaikan hasil atau produk akhir kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, sesuai dengan tujuan program atau kegiatan.
9. Pemeliharaan dan Keberlanjutan:

Menentukan tindakan pemeliharaan yang diperlukan menjaga hasil dan memastikan keberlanjutan setelah program atau kegiatan selesai.
10. Pengakhiran:

- a. Menutup secara resmi program atau kegiatan setelah memastikan semua tugas dan tanggung jawab telah diselesaikan.
- b. Mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan dan menyusun laporan penutup.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi atau tim proyek dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan program atau kegiatan yang mereka jalankan.

7. Keterkaitan Hubungan Antara Variabel

a) Hubungan alokasi anggaran dinas terhadap efektivitas pengelolaan anggaran

Hubungan alokasi anggaran dinas terhadap efektivitas pengelolaan anggaran memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks penyelenggaraan keuangan pemerintah. Alokasi anggaran dinas menentukan sejauh mana sumber daya keuangan dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pelayanan publik. Penelitian terdahulu, seperti studi tentang pengelolaan alokasi dana desa dan anggaran berbasis kinerja, memberikan pandangan yang berharga terkait efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

Pengelolaan alokasi dana desa di tingkat lokal, seperti yang diilustrasikan dalam penelitian Siregar (2020), menyoroti bahwa efektivitas tidak hanya terukur dari segi pencapaian target keuangan, tetapi juga melibatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan yang diidentifikasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

alokasi dana desa, masalah komunikasi, dan pencairan dana yang terlambat, menunjukkan kompleksitas dalam pelaksanaan alokasi anggaran pada level tertentu. Penelitian Tamasoleng (2015) tentang pengelolaan anggaran berbasis kinerja memberikan wawasan terkait tantangan implementasi, khususnya terkait perumusan rencana strategis, perencanaan program, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Faktor internal seperti pemahaman staf dan kebijakan organisasi memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja dapat diintegrasikan dengan baik.

Dalam konteks alokasi dana desa, penelitian Fitri (2019) menyoroti empat tahap pengelolaan alokasi dana desa, yang meliputi penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Meskipun secara administratif sesuai dengan peraturan daerah, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran dinas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administratif, tetapi juga dengan partisipasi dan pemahaman masyarakat.

Dalam keseluruhan, keterkaitan antara alokasi anggaran dinas dan efektivitas pengelolaan anggaran melibatkan sejumlah faktor kompleks, termasuk partisipasi masyarakat, pemahaman internal, dan kesesuaian antara prinsip-prinsip anggaran dengan praktik pengelolaan di lapangan. Penelitian-penelitian terdahulu ini membuka jalan untuk pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana alokasi anggaran dinas dapat dioptimalkan untuk mencapai efektivitas pengelolaan anggaran yang lebih baik.

b) Integrasi penggunaan teknologi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran

Keterkaitan antara integrasi penggunaan teknologi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dapat dipahami melalui dua penelitian terdahulu yang membahas faktor-faktor penentu efektivitas pengelolaan keuangan di institusi pendidikan tinggi, yaitu penelitian Verawati, Husaini, and Aisyah (2021) dan penelitian Sukarta, Badera, and Ratnadi (2017).

Penelitian oleh Verawati, Husaini, and Aisyah (2021) menyoroti peran teknologi informasi sebagai salah satu faktor penentu efektivitas pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu. Dalam penelitian ini, variabel pemanfaatan teknologi informasi (TI) diuji dengan hipotesis H2 yang menyatakan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berkontribusi positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga tersebut.

Sementara itu, penelitian oleh Sukarta, Badera, and Ratnadi (2017) mengeksplorasi pengaruh kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen, dan revisi anggaran terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di Universitas Udayana. Faktor pemanfaatan teknologi informasi (TI) diuji dalam hipotesis H2, yang menyatakan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang

signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan Universitas Udayana.

Penelitian oleh Smith (2018) menyoroti pengaruh positif sistem informasi keuangan terintegrasi pada organisasi nonprofit, menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di sektor tersebut. Selanjutnya, penelitian oleh Johnson (2019) membahas dampak implementasi teknologi cloud computing pada pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana teknologi modern dapat memberikan solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Melalui penelitian tersebut, disimpulkan bahwa terdapat konsistensi temuan terkait pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Implikasinya, institusi-institusi serupa dapat mempertimbangkan peningkatan investasi dan integrasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran guna meningkatkan efektivitasnya.

c) Dukungan pemerintah pusat terhadap efektivitas pengelolaan anggaran

Dukungan pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat daerah atau lembaga tertentu. Salah satu aspek keterkaitannya terletak pada pengeluaran regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

pusat. Dengan memberikan pedoman dan standar yang jelas, pemerintah pusat menciptakan landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran di berbagai entitas sesuai dengan norma yang ditetapkan. Selain itu, dukungan dalam alokasi anggaran juga memainkan peran penting. Keputusan pemerintah pusat terkait seberapa besar dana yang dialokasikan untuk daerah atau lembaga tertentu dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan program dan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya alokasi anggaran yang memadai memberikan dasar finansial yang kuat untuk mendukung berbagai kegiatan.

Penelitian (Putri and Nurlaila, 2023) membahas efektivitas pengelolaan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Kisaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari dokumen dan wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kota Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di kota tersebut berjalan efektif. Penerapan pengelolaan anggaran yang baik terlihat dari pencapaian tujuan organisasi dan kinerja yang ditetapkan dalam anggaran. Meskipun demikian, penelitian menyoroti potensi peningkatan melalui peningkatan pengawasan dan pengembangan sistem pengelolaan anggaran yang lebih modern, termasuk integrasi penggunaan teknologi informasi. Keterkaitan dengan dukungan pemerintah pusat dapat termanifestasi dalam arahan

kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan teknologi informasi dan praktik pengelolaan anggaran yang efektif di lembaga BPJS Kesehatan.

(Syahni and Rizki, 2023) membahas evaluasi kinerja anggaran Pusbindiklat LIPI tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi aspek capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran. Hasil penelitian menyoroti bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, diperlukan faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan organisasi yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Selain itu, disarankan untuk melakukan sosialisasi kegiatan di berbagai lembaga atau instansi dan meningkatkan koordinasi antar bidang di Pusbindiklat LIPI untuk mencapai target kinerja anggaran yang efektif. Dukungan pemerintah pusat dapat tercermin dalam arahan kebijakan yang mendukung perubahan dan koordinasi antar lembaga, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat lokal.

d) Realisasi program terhadap efektivitas pengelolaan anggaran

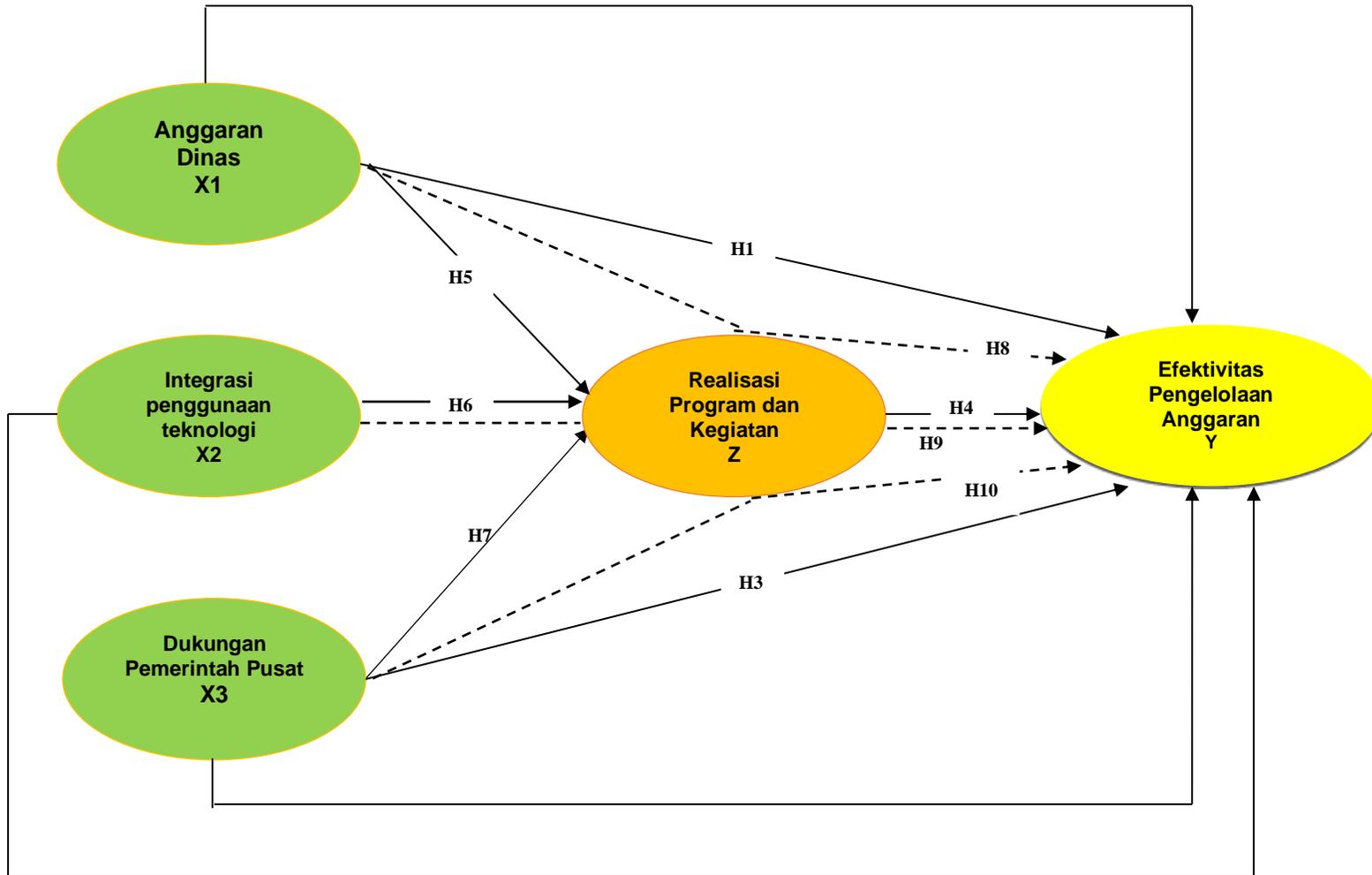
Realisasi program dan efektivitas pengelolaan anggaran saling terkait secara intrinsik. Keberhasilan dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan secara efisien dan efektif berdampak langsung pada tingkat keberhasilan pengelolaan anggaran suatu entitas. Jika program-program dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ini mencerminkan penggunaan dana yang optimal dan tepat sasaran. Di sisi lain, efektivitas pengelolaan anggaran

memberikan dasar yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut. Siklus umpan balik positif tercipta melalui keberhasilan realisasi program, yang pada gilirannya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Evaluasi hasil realisasi program menjadi kunci untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa alokasi dana diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata dan memberi kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau tujuan organisasi. Sudiarsa (2013) dalam penelitiannya menganalisis realisasi program Bappeda Kabupaten Buleleng dengan menggunakan pengukuran Value For Money. Penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi program Bappeda dari sudut efisiensi dan ekonomis memperlihatkan sejumlah program yang tergolong baik dan efisien. Keseluruhan realisasi program Bappeda dari sudut efektivitas juga tergolong efektif. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi program yang baik dapat berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, karena efisiensi dan efektivitas program menjadi parameter penting dalam pengukuran.

Garcia (2017) menyajikan analisis kuantitatif untuk menilai realisasi program dalam anggaran sektor publik. Fokus pada metode kuantitatif memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih terukur dan data-driven tentang bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran berkaitan dengan kinerja aktual program-program di sektor publik. Wang (2019) mengadopsi studi komparatif untuk menganalisis hubungan antara kinerja

program dan alokasi anggaran di lembaga pemerintah. Evaluasi hasil realisasi program menjadi kunci pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, memastikan alokasi dana diarahkan pada kegiatan dengan dampak nyata. Keberhasilan dalam merealisasikan program-program dengan efisiensi dan efektivitas langsung berdampak pada kesuksesan pengelolaan anggaran suatu entitas. Program-program yang dijalankan sesuai tujuan mencerminkan optimalitas dan ketepatan penggunaan dana. Sebaliknya, efektivitas pengelolaan anggaran memberikan fondasi kuat untuk mendukung implementasi program.

b. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Pengaruh antar variabel

c. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. Dikatakan sementara Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah, maka pada uraian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
2. Diduga integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
3. Diduga dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
4. Diduga alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan.
5. Diduga integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan.
6. Diduga dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan.
7. Diduga realisasi program dan kegiatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

8. Diduga alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan.
9. Diduga integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan.
10. Diduga dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan.

d. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Peta Teori Variabel - Variabel Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hipotesis Penelitian	Alat Analisis dan Unit Analisis	Hasil Penelitian
Alokasi anggaran dinas terhadap efektivitas pengelolaan anggaran						
1	(Siregar 2020)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat	1. Efektivitas 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu tahun 2012-2017	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Unit analisis : Laporan keuangan beserta laporan target dan realisasi dari pengelolaan alokasi dana	(1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2012-2017 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu yaitu tahun 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015

					desa, peraturan tentang alokasi dana desa, dan data yang berkaitan	(99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan
2	(Tamasole ng 2015)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang	1. anggaran berbasis kinerja, 2. kendala-kendala	Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang berjalan efektif	Penelitian deskriptif Unit analisis : a) pengumpulan data; b) reduksi data dengan pembuatan koding dan kategori; c) menyajikan data, serta d) menarik kesimpulan dan verifikasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pimpinan dan staf di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memahami makna penganggaran berbasis kinerja, namun mulai dari perencanaan yaitu perumusan rencana strategis, rencana kerja program dan kegiatan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi kinerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai

						dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis kinerja. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu : faktor sumber daya manusia, kurangnya data dan informasi (finansial maupun non finansial), skala prioritas yang tidak terumus dengan jelas, pengukuran kinerja yang tidak seragam, indikator kinerja yang tidak jelas, keterbatasan dana dan kurangnya komitmen masih ada pengaruh politis, sistem akuntansi dan sistem informasi berbasis IT
3.	(Fitri 2019)	Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Efektivitas; alokasi dana desa; pembangunan daerah, otonomi daerah	Alokasi dana desa; pembangunan daerah, otonomi daerah berjalan efektif	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus Teknik validasi data yang digunakan peneliti adalah derajat kepercayaan (Credibility) dengan menggunakan triangulasi	Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terdapat empat tahap antara lain, tahap penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian dari empat tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara administratif sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Akan tetapi, keikutsertaan

						masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang karena minimnya pengetahuan yang difahami mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akibatnya masyarakat menjadi tidak merespon kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Integrasi penggunaan teknologi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran						
4	(Verawati, Husaini, and Aisyah 2021)	Faktor Penentu Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Informasi 2. efektivitas pengelolaan keuangan 3. kualitas sumber daya manusia, 4. pemanfaatan teknologi informasi, 5. sistem pengendalian intern, dan tata kelola 	<p>H1: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan</p> <p>H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan</p> <p>H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap efektivitas</p>	<p>Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS</p> <p>Uji kulalitas data, asumsi klasik dan analisis regresi linier barganda</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Adapun pemanfaatan hasil penelitian dan tata kelola teknologi informasi berpengaruh positif atau signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan badan layanan publik di Universitas Bengkulu</p>

				<p>pengelolaan keuangan</p> <p>H4: Tata kelola berpegaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan</p>		
5	(Sukarta, Badera, and Ratnadi 2017)	Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Universitas Udayana	Kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen, revisi anggaran, efektivitas pengelolaan anggaran.	<p>H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran.</p> <p>H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran.</p> <p>H3: Komitmen Organisasi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran</p>	<p>kuisoner adalah uji kualitas dengan melakukan uji validitas serta uji realibilitas</p> <p>analisis data menggunakan regresi linear berganda. semua uji analisis ini dilakukan dengan bantuan software SPSS statistik versi 22 for window</p>	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran, komitmen organisasi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran dan revisi anggaran berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran Universitas Udayana.

				H4: Revisi Anggaran berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan anggaran.		
6	Smith, A. (2018).	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Organisasi Nonprofit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Independen: Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi 2. Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Anggaran 	<p>Hipotesis nol (H0): Tidak ada pengaruh signifikan antara penggunaan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi dengan efektivitas pengelolaan anggaran pada Organisasi Nonprofit.</p> <p>Hipotesis alternatif (H1): Terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi dengan efektivitas pengelolaan anggaran pada Organisasi Nonprofit.</p>	<p>Alat Analisis: Analisis statistik eksperimental, kemungkinan menggunakan uji statistik seperti uji-t atau analisis varian (ANOVA) untuk membandingkan hasil antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.</p> <p>Unit Analisis: Organisasi Nonprofit yang menjadi subjek penelitian.</p>	<p>pengaruh positif sistem informasi keuangan terintegrasi pada organisasi nonprofit, menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di sektor tersebut.</p>

7	Johnson, B. (2019).	Implementasi Teknologi Cloud Computing dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Implementasi Teknologi Cloud Computing dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah. Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah.	Terdapat pengaruh signifikan antara implementasi Teknologi Cloud Computing dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah dengan efektivitas pengelolaan anggaran.	analisis regresi atau analisis statistik yang relevan untuk mengukur korelasi atau dampak mungkin digunakan.	Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana teknologi modern dapat memberikan solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah.
Dukungan pemerintah pusat terhadap efektivitas pengelolaan anggaran						
8	(Putri and Nurlaila 2023)	Efektivitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Kota Kisaran	Efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan	Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Kota Kisaran berjalan efektivitas	Penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari dokumen dan wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kota Kisaran.	Pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran telah dilakukan secara baik dan sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari tercapainya tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan juga tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran. Pengelolaan anggaran juga dilakukan secara terbuka dan transparan dengan menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh publik dan pihak yang berkepentingan.

						Namun, BPJS Kesehatan Kota Kisaran masih perlu melakukan peningkatan pada pengawasan pengelolaan anggaran serta mengembangkan sistem pengelolaan anggaran yang lebih modern dan efektif, seperti integrasi penggunaan teknologi informasi. Implementasi saransaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran.
9	(Syahni and Rizki 2023)	Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Aspek Implementasi Pada Pusbindklat LIPI Tahun 2019	Evaluasi, Efektivitas, Efisiensi, Penyerapan Anggaran, Kinerja	untuk mengevaluasi kinerja anggaran dengan aspek yang diteliti adalah aspek capaian keluaran, aspek penyerapan anggaran, aspek efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran.	Kualitatif dimana kondisi yang dinilai adalah laporan keuangan tahun anggaran 2019	Dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran maka diperlukan faktor eksternal yakni kebijakan organisasi yang berubah akibat dari pergantian pimpinan dan penyusunan rencana yang komprehensif agar tidak terjadi penumpukan perencanaan diakhir tahun. Diperlukan juga sosialisasi kegiatan diberbagai lembaga atau instansi dan juga koordinasi antar bidang di Pusbindiklat LIPI untuk mencapai

						target kinerja anggaran yang efektif
Realisasi program terhadap efektivitas pengelolaan anggaran						
10	(Sudiarsa 2013)	Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng Melalui Pengukuran Value For Money	Realisasi program, value for money	Mengetahui realisasi realisasi program Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2009-2011 ditinjau dari (1)sudut ekonomis, (2)sudut efisiensi, dan 3) sudut efektivitas.	Subjek penelitian ini adalah Kepala Bappeda dan objeknya adalah kinerja keuangan. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder kuantitatif dan sekunder kualitatif yang diperoleh dengan metode dokumentasi dan wawancara.	(1) realisasi program Bappeda dari sudut ekonomis yaitu 10 program tergolong sangat ekonomis, 17 program tergolong ekonomis, 4 program tergolong cukup ekonomis, 3 program tergolong kurang ekonomis, dan 1 program tergolong tidak ekonomis. (2) Realisasi program Bappeda dari sudut efisiensi yaitu 2 program tergolong efisien, 9 program tergolong cukup efisien, dan 25 program tergolong kurang efisien. (3) Keseluruhan realisasi program Bappeda dari sudut efektivitas tergolong efektif.
11	Garcia, R. (2017)	Assessing Program Realization in Public Sector Budgets: A Quantitative Analysis."	Realisasi Program, Efektivitas Anggaran.	Terdapat hubungan positif antara tingkat realisasi program dalam anggaran sektor publik dan efektivitas pengelolaan anggaran.	Alat Analisis: Analisis kuantitatif. Unit Analisis: Sektor Publik.	Menyajikan gambaran terukur dan data-driven tentang hubungan antara realisasi program dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam sektor publik.
12	Wang, L. (2019)	"The Role of Program Performance in Budget Allocation: A	Variabel: Kinerja Program, Alokasi Anggaran.	Hipotesis Penelitian: Kinerja program berkontribusi	Alat Analisis: Studi Komparatif, Analisis kualitatif dan kuantitatif.	Hasil Penelitian: Menggali faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran

		Comparative Study of Government Agencies."		si pada pola alokasi anggaran di berbagai lembaga pemerintah.	Unit Analisis: Lembaga Pemerintah.	berdasarkan kinerja program melalui perbandingan antar lembaga pemerintah.
Alokasi anggaran dinas terhadap realisasi program dan kegiatan						
13	Hardiyanto. (2020)	Strategi Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran dalam upaya meminimalisir terjadinya Pagu Minus pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.	Variabel utama dalam penelitian ini adalah Pagu Minus, yang mencerminkan situasi di mana pengeluaran melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Belanja Pegawai menjadi fokus penting, bersama dengan proyeksi keuangan untuk memperhitungkan kebutuhan finansial di masa mendatang. Data Realisasi Belanja juga menjadi variabel kunci, mencakup pengeluaran aktual dari tahun-tahun sebelumnya.	untuk menghasilkan strategi yang dapat mengurangi Pagu Minus Anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah proyeksi keuangan berbasis data historis, analisis statistik untuk menghitung Pagu Indikatif, dan evaluasi realisasi belanja dari tahun-tahun sebelumnya. Metode statistik digunakan untuk memperkirakan kebutuhan finansial di masa mendatang berdasarkan tren dan pola pengeluaran yang terjadi pada belanja pegawai dan belanja barang operasional Kementerian Negara dan Lembaga	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan proyeksi keuangan berbasis data historis dan analisis statistik terhadap belanja pegawai serta belanja barang operasional Kementerian Negara dan Lembaga dari tahun-tahun sebelumnya, dapat meminimalisir terjadinya Pagu Minus dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Proyeksi keuangan ini membantu dalam mengestimasi kebutuhan finansial di masa mendatang secara lebih akurat, sehingga Pagu Anggaran yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan realitas pengeluaran
	Mahfudin. (2016).	Efektivitas Kebijakan Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Menunjang Kinerja Kementerian Negara/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta.	Variabel: Belanja perjalanan dinas (independen), Pencapaian kinerja program K/L (dependen)	Meneliti pengaruh kebijakan biaya perjalanan dinas terhadap kinerja program Kementerian/Lembaga pada tahun anggaran 2016	Alat Analisis: Korelasi, Analisis CHAID.	Belanja perjalanan dinas signifikan terkait dengan pencapaian kinerja program K/L pada tahun 2016, termasuk pencapaian output program.
Integrasi penggunaan teknologi terhadap realisasi program dan kegiatan						
14	Giulio, M., & Vecchi, G. (2021).	Implementing digitalization in the public	Inovasi digital di sektor publik, struktur	Memahami konteks inovasi digital di sektor	Beberapa alat analisis, termasuk pengembangan	Pengembangan tipologi struktur tata kelola yang didorong oleh TIK,

		sector: Technologies, agency, and governance.	tata kelola yang didorong oleh TIK, mekanisme kausal dalam implementasi yang berhasil, strategi implementasi program e-government, dan kemungkinan transferabilitas program ke konteks lain.	publik, membuat tipologi struktur tata kelola yang didorong oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengembangkan hipotesis tentang mekanisme kausal yang mendasari implementasi yang berhasil, serta mengeksplorasi implikasi strategis dari program e-government dan kemungkinan transferabilitas ke konteks lain.	tipologi struktur tata kelola yang didorong oleh TIK, analisis mendalam melalui studi kasus program reformasi pemerintahan elektronik di sektor publik Italia, serta analisis hipotesis dengan menggunakan data empiris dari studi kasus tersebut.	penyusunan hipotesis tentang mekanisme kausal yang mendasari implementasi yang berhasil, identifikasi strategi implementasi program e-government yang efektif berdasarkan studi kasus di sektor publik Italia
Dukungan pemerintah pusat terhadap realisasi program dan kegiatan						
15	Dwi Retno Irijayanti. (2018).	Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu).	Peran pemerintah dalam kegiatan tersebut, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.	Mengidentifikasi peran pemerintah dalam Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan di Kota Batu dengan lokasi di Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama dan menggunakan pedoman wawancara serta alat bantu lainnya.	Peran pemerintah dalam Kegiatan Pengembangan Pangan Daerah terdiri dari regulator, fasilitator, dan dinamisator. Faktor pendukungnya meliputi dasar pelaksanaan yang jelas, dukungan pemerintah, komunikasi yang baik, sumber daya manusia yang memadai, sikap penerima, lingkungan yang baik, dan mitra kerja yang kooperatif. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti keterbatasan tenaga dan kendaraan angkut, serta kesulitan dalam pendataan warga miskin pendatang baru

Sumber: Penelitian Terdahulu

e. Definisi Operasional

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel adalah setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang x1:anggaran dinas x2:integrasi penggunaan teknologi x3:dukungan pemerintah pusat y:efektivitas pengelolaan anggaran z:realisasi program dan kegiatan.

Operasionalisasi variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Penelitian ini memiliki variabel independent dan variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2019) variabel independent (bebas), adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sementara itu, variabel dependent (terikat) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel independent (bebas). Untuk dapat memahami arti dari masing-masing variabel, maka berikut dibuat defenisi operasionalnya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator Variabel	Definisi Operasional Indikator Variabel	Pengukuran
Anggaran Dinas (X1)	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Kantor Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan.	Ketepatan sasaran	Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktifitas organisasi	5 point skala likert
		Ketepatan waktu.	Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi	5 point skala likert
		Tercapainya tujuan.	Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktifitas organisasi untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.	5 point skala likert
Integrasi penggunaan teknologi (X2)	Tingkat integrasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau infrastruktur teknologi lainnya oleh Kantor Dinas. Ini dapat mencakup pengelolaan basis data, perangkat keras dan perangkat lunak, serta sumber daya teknologi yang digunakan untuk mendukung operasi dan layanan.	Intensitas Pemanfaatan	Minat (intention) atau Intensitas pemanfaatan yang tinggi terhadap integrasi penggunaan teknologi sistem informasi akan menumbuhkan perilaku yang menunjang pemanfaatan teknologi sistem informasi.	5 point skala likert
		Frekuensi Pemanfaatan	Pengukuran penggunaan sesungguhnya (actual use) diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi dan besarnya frekuensi penggunaannya.	5 point skala likert
		Jumlah Aplikasi atau Perangkat Lunak yang digunakan	Program yang secara khusus digunakan untuk mendukung aplikasi khusus untuk para pemakai seperti aplikasi untuk bisnis, aplikasi untuk pendidikan, aplikasi multimedia, dan aplikasi lainnya yang digunakan sesuai dengan bidangnya	5 point skala likert
Dukungan Pemerintah Pusat (X3)	Dana atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dapat digunakan untuk mendukung anggaran dan integrasi penggunaan teknologi oleh Kantor Dinas.	Bantuan hibah yang diberikan	Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat	5 point skala likert
		Pengembangan SDM	Pengembangan SDM dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan	5 point skala likert
		Membangun kemitraan	Membangun kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.	5 point skala likert
	Sejauh mana Kantor Dinas Kabupaten	Akuntabilitas	akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja	

Efektivitas Pengelolaan Anggaran (Y)	Penjam Paser Utara dapat mengelola anggaran dengan efektif.			5 point skala likert
		Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah,	keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah,	5 point skala likert
		Pemberdayaan manajer (pimpinan) yang profesional,	pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.	5 point skala likert
Realisasi Program dan Kegiatan (Z)	Mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran Kantor Dinas sebenarnya telah terealisasi dengan baik.	Realisasi Keuangan	Penggunaan sumber daya ekonomi (Keuangan) yang dikelola dalam satu periode pelaporan	5 point skala likert
		Hasil Yang Dicapai	hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan atau dikerjakan.	5 point skala likert
		Solusi Atas Permasalahan Yang Dihadapi	Solusi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi	5 point skala likert

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif dengan memanfaatkan angka dan statistik. Tujuan utama dari rancangan penelitian adalah memastikan adanya arah yang jelas dan target yang tercapai. Dalam konteks ini, variabel-variabel seperti anggaran dinas, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, dan efektivitas pengelolaan anggaran, berkaitan dengan realisasi program dan kegiatan. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan menggunakan analisis statistik untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Penelitian ini menguji pengaruh lima variabel utama, yaitu anggaran dinas, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, efektivitas pengelolaan anggaran, dan realisasi program dan kegiatan. Melalui metode penelitian kuantitatif, peneliti akan meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara acak. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kuantitatif (statistik) untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif dan generalisasi yang lebih luas tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Dengan menganalisis angka dan statistik, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam konteks yang diteliti. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang anggaran dinas, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan sampai dengan selesai, yaitu November 2023 Sampai Dengan Januari 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara langsung dan tidak langsung pengaruh anggaran dinas, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, efektivitas pengelolaan anggaran dan realisasi program dan kegiatan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti memilih Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai tempat penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti meneliti di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Alamat Kantor : Jalan Provinsi Km 21, Petung, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76143, selama kurang lebih

3 (tiga) bulan, mulai dari bulan (November 2023 – Januari 2024). Berikut adalah peta lokasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara:



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, karakteristik yang dimiliki orang yang ada pada objek dan subyek yang akan diteliti Sugiyono (2012). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berjumlah 110 Pegawai.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Jika populasi yang diteliti sangat besar, maka cukup diambil sampel dari populasi yang ada yang diteliti (Bungin, 2018). Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Menurut (Sugiyono, 2019) sampel jenuh apabila dalam pengambilan sampel dengan jumlah populasi yang relative kecil. Jumlah sampel penelitian ini 100 sampel dari keseluruhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berhubungan langsung dengan alokasi anggaran, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, efektivitas pengelolaan anggaran, dan realisasi program dan kegiatan dan 10 orang populasi tidak berkaitan langsung karna merupakan cleaning service, caraka, dan wakar.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi kedalam dua jenis data yaitu:

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan, penjelasan dari hasil interview, wawancara, kuesioner atau observasi di lapangan yang diolah untuk mendukung penjelasan dalam analisis. Jenis data ini diperoleh dari sumber primer berupa kuesioner yang terkait

pengaruh pengaruh secara langsung dan tidak langsung pengaruh anggaran dinas, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, efektivitas pengelolaan anggaran dan realisasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

- b. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari sumber data sekunder, baik berupa dokumen, laporan-laporan ilmiah, atau terbitan berkala yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, seperti Data alokasi anggaran dinas, integrasi penggunaan teknologi, dukungan pemerintah pusat, efektivitas pengelolaan anggaran dan realisasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, struktur organisasi dan data sekunder lainnya yang dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, diperoleh secara langsung, data ini meliputi jawaban atas pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan pada responden dan hasil wawancara. Data penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber pengambilan data. Data primer diperoleh dari sumber secara langsung yakni responden, dengan cara penyebaran kuisoner. Responden yang dimaksud adalah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Meliputi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Kasubbag Umum, Kasubbag Perencanaan, Sub Bidang dan Staf Analis serta Tenaga Harian Lepas (THL). Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui objeknya. Data primer dilakukan dengan membagikan kuisioner secara langsung, yaitu dengan memberikan pernyataan tertulis kepada responden. Selanjutnya, responden memberikan tanggapan atas pernyataan yang diberikan.

- b. Data Sekunder, data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dan data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Data sekunder diperoleh dengan cara inventarisasi langsung, misalnya laporan tahunan dan data statistik lainnya. Data-data tersebut kemudian diverifikasi dan dianalisis untuk dapat digunakan pada tahapan selanjutnya. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menunjang penyusunan penelitian yaitu, laporan atau dokumen yang berasal dari instansi pemerintah dan instansi terkait seperti buku, referensi, dan jurnal-jurnal.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuisioner, peran kualitas komunikasi sebagai variabel intervening. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dimaksudkan untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan untuk memperoleh informasi dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Dengan harapan responden akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang ada dalam kuisioner. Dalam pengukurannya, masing-masing responden diminta pendapatnya mengenai pertanyaan dengan menggunakan skala Likert.”

Skala Likert adalah sebuah bentuk skala yang akan mengindikasikan jawaban dari para responden setuju atau tidak setuju atas pernyataan mengenai suatu objek. Skala inilah yang memberikan angka atau nilai terhadap suatu obyek, sehingga karakteristik yang terdapat pada obyek dapat diukur. Metode pengukuran dengan menggunakan skala Likert terdiri dari lima kisaran jawaban yaitu: “sangat setuju”, “setuju”, “kurang setuju”, “tidak setuju”, “sangat tidak setuju”. Keunggulan menggunakan skala Likert adalah kemudahan dalam pembuatannya, dan umumnya responden sudah siap dan mengerti untuk menjawab skala Likert.”

Tabel 3.1 Range Score

No	Range	Kategori
1	1.00 – 1.79	Sangat Tidak Setuju
2	1.80 – 2.59	Tidak Setuju
3	2.60 – 3.39	Cukup
4	3.40 – 4.19	Setuju
5	4.20 – 5.00	Sangat Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2014)

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu para responden dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Angket (kuesioner), yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui penyebaran angket kepada para pengguna jalan dan masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di sekitar lokasi penelitian yang menjadi sampel. Angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas responden dan variabel-variabel penelitian untuk mencari informasi yang lengkap dari permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui penyebaran angket kepada staf atau pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi sampel. Angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas responden dan variabel-variabel penelitian untuk mencari informasi yang lengkap dari permasalahan yang dibahas

3. Penelitian Kepustakaan (*library research*) Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca serta menelaah literatur maupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif dan diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistic. Berikut adalah beberapa uji analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas dapat digunakan untuk menguji apakah variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi dalam suatu penelitian, variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk menentukan apakah data dalam penelitian tersebut terdistribusi normal atau tidak, maka dapat diuji dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov atau pendekatan grafik. (a) Pendekatan Kolmogorov-Smirnov, yaitu pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan ini adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka data yang digunakan dalam penelitian ini mendistribusikan normal, (2) Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mendistribusikan normal. (b)

Pendekatan Grafik, yaitu dalam menentukan data yang mendistribusikan normal, dapat dilakukan dengan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan P-P Plot Of Regression Standard. Pengujian dengan menggunakan pendekatan grafik disyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan sumbu Y (Ghozali, 2013:214).

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi dalam suatu penelitian ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas (independen). Menurut Santoso (2010:206), untuk menentukan ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara mendeteksi data penelitian yang diolah dengan menggunakan alat bantu program SPSS yaitu data yang memiliki nilai $VIF \leq 10$ dan data yang memiliki nilai $tolerance \geq 10$

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi suatu penelitian terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika terdapat variance dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas, dan apabila hasil pengamatan berbeda dengan pengamatan lainnya disebut dengan Heteroskedastisitas. Berikut merupakan syarat untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas: (a) Jika didapati pola tertentu, seperti

titik yang berbentuk pola tertentu yang teratur (melebar, bergelombang, dan menyempit) maka dapat dinyatakan dalam penelitian tersebut telah terjadi Heteroskedastisitas, (b) Jika didapati pola yang tidak jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 dan Y, maka dapat dinyatakan dalam penelitian tersebut tidak terjadi Heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang harus dilakukan pada regresi linear dengan runtut waktu atau panel. Ini penting karena model bisa hasil yang dihasilkan bisa bias jika terjadi gangguan autokorelasi pada model penelitian. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

2. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan seberapa jauh menghitung skor butir-butir pertanyaan. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan dari instrument (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh. Data dikatakan valid, jika pernyataan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Metode yang digunakan untuk menguji validitas adalah dengan menghitung atau membandingkan korelasi antar skor. Koefisien korelasi yang dihasilkan setiap variabel dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi

pada r tabel. Keputusan pengujian validitas instrument dapat menggunakan taraf signifikansi 5% adalah sebagai berikut :

- a) Item pernyataan instrument penelitian dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.
- b) Item pernyataan instrument penelitian dikatakan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrument yang digunakan benar-benar menghasilkan data yang bebas dari kesalahan. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabel suatu instrument dengan menggunakan Cronbach's alpha. Variabel dikatakan reliabel apabila Cronbach's alpha memiliki nilai lebih besar dari 0,600 (Ghozali, 2013).

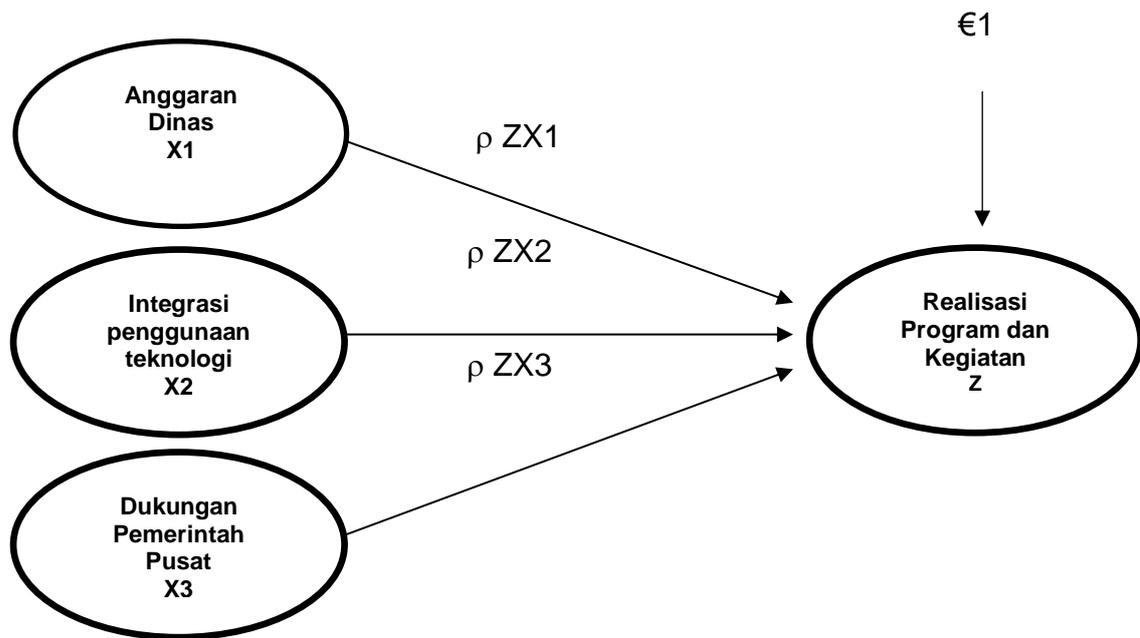
3. Analisis Jalur

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis utama yang dilakukan adalah untuk menguji konstruk jalur apakah teruji secara empiris atau tidak. Analisis selanjutnya dilakukan untuk mencari pengaruh langsung dan tidak langsung dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependen terakhir, harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening.

Berdasarkan pendapat Riduwan dan Kuncoro (2012: 116-118), ada beberapa langkah pengujian path analysis yaitu sebagai berikut:

Tahap I

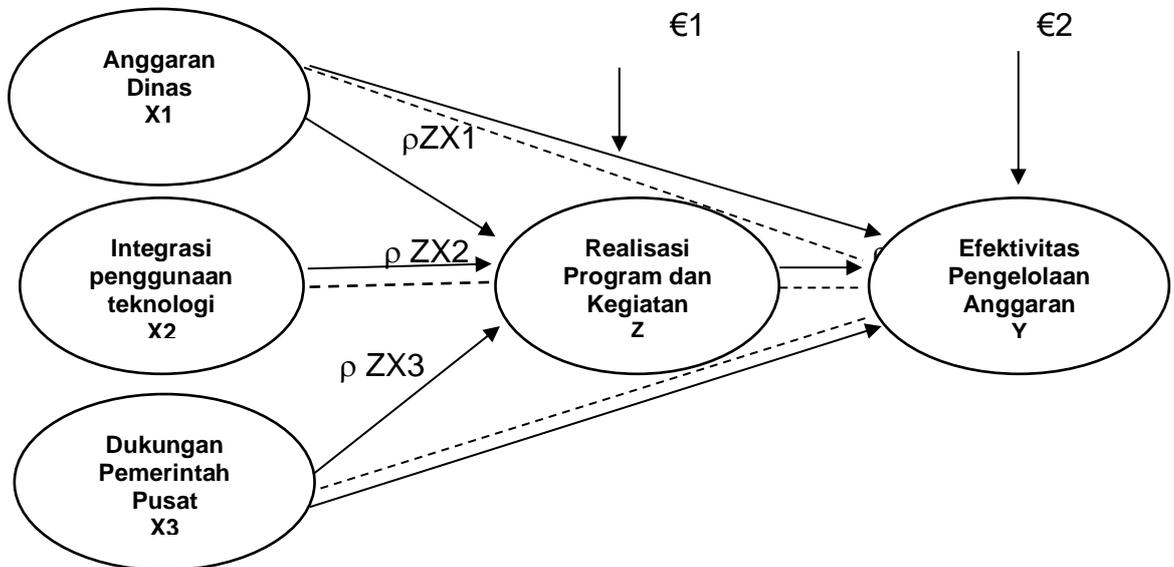
Membuat diagram jalur persamaan struktural 1 sebagai berikut:



Gambar 3.2. Diagram jalur persamaan struktural 1

Tahap II

Membuat diagram jalur persamaan struktural 2 sebagai berikut:



Gambar 3.3. Diagram jalur persamaan struktural 2

Tahap III

Membuat Persamaan struktural yang digunakan pada analisis jalur dalam penelitian ini:

- ✓ Persamaan struktural 1
- ✓ $Z = \rho_{ZX1}X_1 + \rho_{ZX2}X_2 + \rho_{ZX3}X_3 + \epsilon_1$
- ✓ Persamaan struktural 2
- ✓ $Y = \rho_{YX1}X_1 + \rho_{YX2}X_2 + \rho_{YX3}X_3 + \rho_{YZ}Z + \epsilon_2$

Keterangan:

ρ = Koefisien regresi

Z = Realisasi Program dan Kegiatan

Y = Efektivitas Pengelolaan Anggaran

X1 = Alokasi anggaran dinas

X2 = Integrasi Penggunaan teknologi

X3 = Dukungan pemerintah pusat

€ = Eror

Tahap IV

Melakukan analisis dengan menggunakan SPSS versi 29.0

1. Uji Regresi

a. Uji Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen. Jadi regresi berganda digunakan apabila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2019).

Untuk pengolahan regresi berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Regresi yang digunakan adalah regresi berganda sesuai dengan jumlah variabel independent pada penelitian ini.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model *structural Equation Modelling* (SEM) dengan *smartPLS*. Dalam full model *structural Equation Modelling* selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2012).

a. Uji Statistik t

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan.

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji hipotesis *two tailed* positif

H_0 ditolak: jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau jika $\alpha < 5\%$

H_0 diterima: jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, atau jika $\alpha > 5\%$

Apabila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa berpengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.



Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

b. Uji Sobel (kriteria dari mediasi)

Uji sobel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi yaitu realisasi program dan kegiatan. Suatu variabel disebut variabel intervening jika variabel tersebut mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali (2018) uji sobel dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel X ke Y melalui Z. Uji sobel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Sab\sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2}$$

Keterangan:

Sa : Standart error X-M

Sb : Standart error M-Y

b : Koefisien regresi M-Y

a : Koefisien regresi X-M

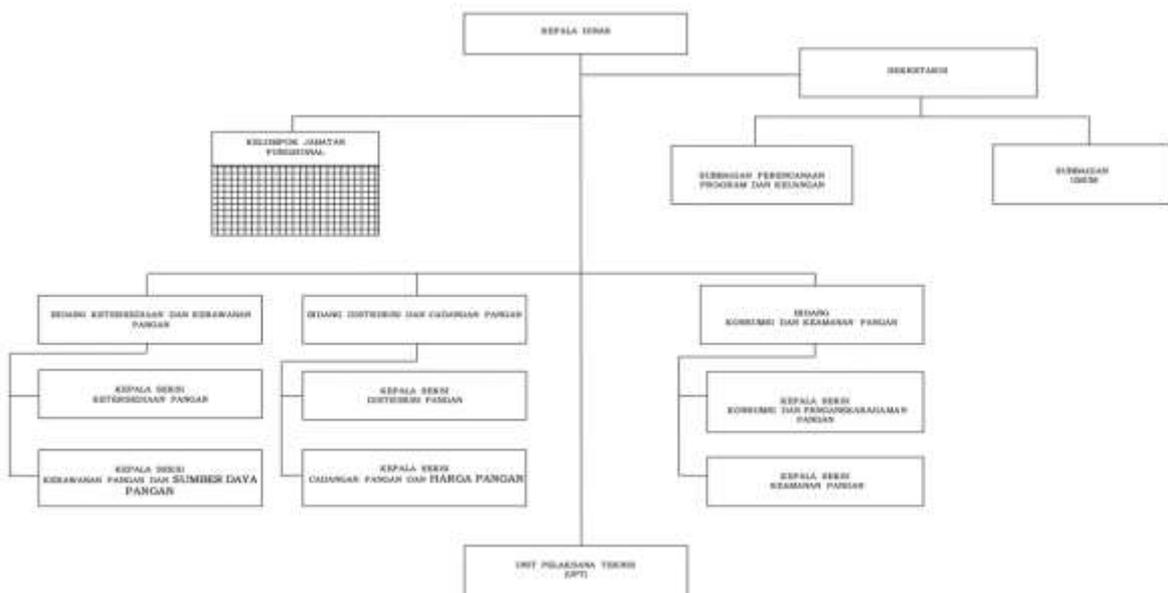
Untuk menguji signifikan pengaruh tidak langsung secara parsial, maka dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2018): z Apabila pengujian z lebih besar dari 1,96 (standar nilai z mutlak), maka terjadi pengaruh mediasi. Uji Sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, jika sampelnya kecil, pengujian Sobel ini menjadi kurang tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan yang meliputi informasi dan pengembangan, pengendalian, pembinaan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan.



Gambar 4.1 Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 36 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan fungsi dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah : Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.

1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis organisasi perangkat daerah Dinas ketahanan pangan berdasarkan RPJMD pemerintah daerah, tugas permasalahan dan kebijakan yang ada;
2. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada dinas ketahanan pangan
3. Perumusan pedoman kerja dinas ketahanan pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas ;
4. Pendistribusian tugas kepada sekretaris, kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan , kepala bidang distribusi dan cadangan pangan, kepala bidang konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai pedoman ;

5. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan organisasi perangkat daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja.
6. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional dinas ketahanan pangan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan urusan bidang ketahanan.
7. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada dinas ketahanan pangan dengan organisasi perangkat daerah lain;
8. Penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala dinas untuk keabsahan naskah dinas naskah dinas
9. Penjalinan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk mitra kerja untuk keberhasilan program kerja dinas
10. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ,Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan ,Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta bawahan lain pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
11. Pengevaluasian berdasarkan rencana dan realisasi nya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2. Sekretariat

Tugas Pokok :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam Penyelenggaraan fungsi Penyusunan Rencana Kegiatan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga, Perpustakaan, Administrasi Umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan Penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan usulan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- b. Penyusunan dan Penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan upaya peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan pada dinas ketahanan pangan ;
- c. Penyusunan dan penyiapan pedoman kerja dinas ketahanan pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Pendistribusian tugas kepada kepala sub bagian perencanaan program dan keuangan dan sub bagian umum berdasarkan peraturan bupati tentang tugas pokok fungsi organisasi perangkat daerah sebagai pedoman ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan sekretariat organisasi perangkat daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional dinas ketahanan pangan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan administrasi umum, administrasian kepegawaian dan administrasi keuangan serta perencanaan program ;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan kepala sub bagian perencanaan program dan keuangan, dan kepala sub bagian umum sesuai peraturan yang ada ;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan dinas ketahanan pangan berdasarkan rencana dan realisasinya

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan ;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Tugas dan Fungsinya :

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepala sub bagian perencanaan program dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan pada sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;

- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada sub bagian perencanaan program dan keuangan;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program sub bagian perencanaan program dan keuangan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada sub bagian perencanaan program dan keuangan.
- f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi keuangan, bahan penyusunan RKA, DPA, LKIP, penyusunan rencana / program kerja;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada sub bagian perencanaan program dan keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada sub bagian perencanaan program dan keuangan berdasarkan rencana realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan program dan keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada sekretaris;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

4. Sub Bagian Umum

Tugas dan Fungsi :

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan yang berlaku, pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan urusan tata usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala sub bagian umum menyelenggarakan fungsi adalah:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas ,permasalahan , kebutuhan dan kebijaksanaan pada sub bagian umum sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum;
 - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program sub bagian umum;

- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada sub bagian umum;
- f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- g. Pemberian petunjuk , penilaian dan pembinaan bawahan sub bagian umum baik sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada sekretaris ;

5. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas dan Fungsi :

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan untuk bahan perumusan DPA;
 - b. Penyusunan rencana program bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berdasarkan usulan seksi ketersediaan pangan, serta seksi ketersediaan pangan, serta kerawanan pangan dan sumberdaya pangan untuk bahan perumusan renstra organisasi perangkat daerah dinas ketahanan pangan ;
 - c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. Pendistribusian tugas kepada kepala seksi ketersediaan pangan, serta kepala seksi kerawanan pangan dan sumber daya pangan berdasarkan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai pedoman ;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- f. Pengendalian pelaksanaan administrasi dan teknis operasional bidang ketersediaan dan kerawanan pangan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepala seksi ketersediaan pangan, serta kepala seksi kerawanan dan sumber daya pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya ;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketersediaan pangan, seksi kerawanan pangan dan sumberdaya pangan sebagai pertanggung jawaban kepada kepala dinas;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis ;

6. Seksi Ketersediaan Pangan

Tugas dan Fungsi :

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

- (2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- (3) Uraian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada seksi ketersediaan pangan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah ;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada seksi ketersediaan pangan ;
 - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program seksi ketersediaan pangan.
 - e. Pemberian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada seksi ketersediaan pangan;
 - f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional nasional (HKBN), bahan analisis data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM), data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH), ketersediaan pangan dan bahan

pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan dan bahan pendampingan dibidang ketersediaan pangan;

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada seksi ketersediaan pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada seksi ketersediaan pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya ;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketersediaan pangan baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan ;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

7. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan

Tugas dan Fungsi :

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta

pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur, penanganan kerawanan pangan dan sumber daya pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi kerawanan pangan dan sumberdaya pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada seksi kerawanan pangan dan sumberdaya pangan sebagai bahan penyusunan DPA.
- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah.
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada seksi kerawanan dan sumber daya pangan.
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program seksi kerawanan pangan dan sumber daya pangan.
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada seksi kerawanan dan sumber daya pangan.
- f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, analisis, bahan pendampingan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, bahan

intervensi daerah rawan pangan, bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi, data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan.

- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada seksi kerawanan pangan berdasarkan dan sumber daya pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada.
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada seksi kerawanan pangan dan sumber daya pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi kerawanan pangan dan sumber daya pangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

8. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Tugas dan Fungsi

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

pendampingan serta pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang distribusi dan cadangan pangan untuk bahan perumusan DPA;
 - b. Penyusunan rencana program bidang distribusi dan cadangan pangan berdasarkan usulan seksi distribusi pangan, seksi cadangan pangan dan harga pangan untuk bahan perumusan renstra organisasi perangkat daerah dinas ketahanan pangan;
 - c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - d. Pendistribusian tugas kepada kepala seksi distribusi pangan, kepala seksi cadangan pangan dan harga pangan berdasarkan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai pedoman;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;

- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional bidang distribusi dan cadangan pangan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan bidang distribusi dan cadangan pangan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang distribusi dan cadangan pangan;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan kepala seksi distribusi pangan, kepala seksicadangan pangan dan harga pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada bidang distribusi dan cadangan pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepala seksi distribusi pangan, kepala seksi cadangan pangan dan harga pangan sebagai pertanggung jawaban kepada kepala dinas ketahanan pangan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintakan pimpinan secara tertulis

9. Seksi Distribusi Pangan

Tugas dan Fungsi

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

- (2) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi di Bidang Distribusi Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi distribusi pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada seksi distribusi pangan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusun rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada seksi distribusi pangan;
 - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program seksi distribusi pangan;
 - e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan seksi distribusi pangan;
 - f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bahan analisis data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap pangan, bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada seksi distribusi pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada seksi distribusi pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi distribusi pangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada kepala bidang distribusi dan cadangan pangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

10. Seksi Cadangan Pangan dan Harga Pangan

Tugas dan Fungsi

- (1) Seksi Cadangan Pangan dan Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (2) Kepala Seksi Cadangan Pangan dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

pendampingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi di sub bidang cadangan pangan dan harga pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi cadangan pangan dan harga pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada seksi cadangan pangan dan harga pangan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusun rencana strategis organisasi perangkat daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan seksi cadangan pangan dan harga pangan;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program seksi cadangan pangan dan harga pangan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan seksi cadangan pangan dan harga pangan;
- f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bahan analisis, penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, penyiapan pemanfaatan cadangan;

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada seksi cadangan pangan dan harga pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada seksi cadangan pangan dan harga pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi cadangan pangan dan harga pangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada kepala bidang;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

11. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas dan Fungsi

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk bahan perumusan DPA;
- b. Penyusunan rencana Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan usulan Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Seksi Keamanan Pangan untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan;
- c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. Pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Kepala Seksi Keamanan Pangan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pedoman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Kepala Seksi Keamanan Pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Kepala Seksi Keamanan Pangan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

12. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Tugas dan Fungsi :

- (1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, monitoring dan evaluasi di

Bidang Konsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan serta Pengembangan Pangan Lokal.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, bahan

penyusunan peta pola konsumsi pangan, bahan pendampingan di Bidang Konsumsi Pangan;

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

13. Seksi Keamanan Pangan

Tugas dan Fungsi :

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin Oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- (2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pementapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, monitoring dan evaluasi di Bidang Keamanan Pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Peyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Keamanan Pangan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keamanan Pangan;
 - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Keamanan Pangan;
 - e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Keamanan Pangan;
 - f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bahan analisis, bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar, bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Seksi Keamanan Pangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keamanan Pangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Pangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- j. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

14. Unit Pelaksana Teknis

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian Tugas Jabatan Fungsional diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya sesuai Peraturan Bupati.

B. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini, responden yang dipilih berjumlah 100 orang pegawai Kantor Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipilih secara representatif. Representativitas responden ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan mencerminkan keragaman dalam populasi yang lebih besar. Berikut adalah rincian kelayakan responden dalam memberikan informasi mengenai identitas diri:

1. Jenis Kelamin

Responden dipilih dari berbagai jenis kelamin, termasuk laki-laki dan perempuan, untuk mencerminkan keberagaman gender dalam

populasi pegawai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Frekuensi dan Persentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	57	57%
Perempuan	43	43%
Total	100	100

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 4.1 menunjukkan distribusi jenis kelamin dari pegawai Kantor Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara, di mana laki-laki menyumbang 57% dan perempuan 43% dari total 100 pegawai. Dalam konteks Analisis Komprehensif Alokasi Anggaran, Integrasi Penggunaan Teknologi, Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Realisasi Program dan Kegiatan melalui Pengelolaan Anggaran yang Efektif pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam, distribusi jenis kelamin ini dapat memengaruhi berbagai aspek strategis. Perencanaan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sementara Integrasi Penggunaan Teknologi harus dilakukan dengan memastikan kesetaraan akses dan pelatihan. Dukungan pemerintah pusat juga penting untuk kesuksesan program, sementara distribusi jenis kelamin juga memengaruhi implementasi program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keterlibatan yang merata

dari semua pegawai dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program guna mencapai tujuan organisasi secara efektif.

2. Pendidikan

Responden dipilih dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga tingkat pendidikan tinggi, sehingga dapat mencerminkan beragam latar belakang pendidikan dalam populasi pegawai. Lebih jelasnya pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Frekuensi dan Persentase Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Diploma	25	25%
S1	68	68%
S2	7	7%
Total	100	100

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 4.2 menunjukkan distribusi tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam, di mana mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 68%, diikuti oleh diploma sebanyak 25%, dan S2 sebanyak 7% dari total 100 pegawai. Dalam Analisis Komprehensif Alokasi Anggaran, Integrasi Penggunaan Teknologi, Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Realisasi Program dan Kegiatan melalui Pengelolaan Anggaran yang Efektif, distribusi tingkat pendidikan ini memiliki implikasi yang penting. Pegawai dengan latar belakang pendidikan yang beragam dapat memberikan kontribusi yang berbeda dalam pengembangan program dan kegiatan, dengan latar belakang pendidikan S1 yang dominan dapat menjadi sumber daya

utama dalam merancang dan mengelola anggaran dengan lebih efektif. Namun, perlu memastikan bahwa Integrasi Penggunaan Teknologi dan dukungan pemerintah pusat juga memperhitungkan keberagaman dalam tingkat pendidikan pegawai untuk memastikan kesuksesan implementasi program dan kegiatan yang berkelanjutan.

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja responden mencakup berbagai tingkat pengalaman, mulai dari yang baru memulai karir hingga yang memiliki pengalaman kerja yang lebih panjang. Ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang identitas diri dalam konteks pengalaman kerja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Frekuensi dan Persentase Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja	Frekuensi	Persentase
Kurang 10 Tahun	31	31%
20-30 Tahun	52	52%
Lebih dari 30	17	17%
Total	100	100

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 4.3 tersebut menunjukkan distribusi pengalaman kerja dari pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Mayoritas pegawai memiliki pengalaman kerja antara 20-30 tahun sebanyak 52%, diikuti oleh pegawai dengan pengalaman kurang dari 10 tahun sebanyak 31%, dan yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebanyak 17% dari total 100 pegawai. Dalam konteks Analisis Komprehensif Alokasi Anggaran, Integrasi Penggunaan Teknologi,

Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Realisasi Program dan Kegiatan melalui Pengelolaan Anggaran yang Efektif, distribusi pengalaman kerja ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Pegawai dengan pengalaman kerja yang beragam dapat memberikan kontribusi berbeda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan. Pengalaman kerja yang lebih lama akan membawa pemahaman mendalam tentang proses dan kebijakan, sementara pegawai dengan pengalaman yang lebih pendek dapat membawa energi baru dan pemikiran inovatif. Penting untuk memanfaatkan keahlian dan pengetahuan dari berbagai lapisan pengalaman kerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

4. Umur

Rentang usia responden mencakup berbagai tahap kehidupan, dari yang lebih muda hingga yang lebih tua, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana identitas diri berkaitan dengan faktor usia dalam lingkungan kerja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Frekuensi dan Persentase Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
Kurang 40 Tahun	39	39%
40-50 Tahun	53	53%
Lebih dari 50 Tahun	8	8%
Total	100	100

Sumber: Data diolah, 2024

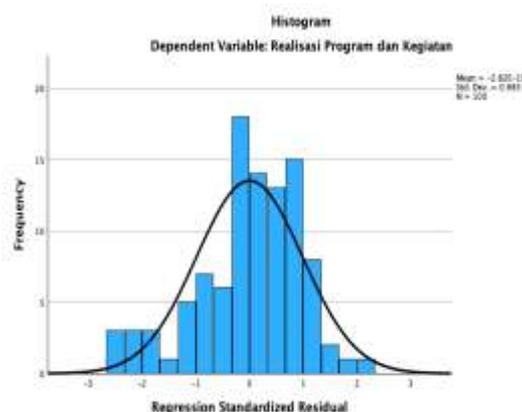
Tabel 4.4 tersebut menunjukkan distribusi usia pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Sebagian besar pegawai (53%) berusia antara 40-50 tahun, diikuti oleh kelompok usia kurang dari 40 tahun (39%), dan kelompok usia lebih dari 50 tahun hanya menyumbang 8% dari total 100 pegawai. Dalam konteks analisis yang mencakup Alokasi Anggaran yang Komprehensif, Integrasi Penggunaan Teknologi, Dukungan dari Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Realisasi Program dan Kegiatan melalui Pengelolaan Anggaran yang Efektif, pola distribusi usia ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika organisasi. Pegawai yang lebih muda membawa inovasi dan keahlian teknologi yang mutakhir, sementara pegawai yang lebih tua dapat menyumbangkan pengalaman luas dan pemahaman mendalam tentang kebijakan. Kehadiran beragam kelompok usia dalam lingkungan kerja dapat memperkaya diskusi, membantu menghasilkan keputusan yang lebih menyeluruh, dan mempromosikan kelangsungan organisasi yang lebih baik.

C. Uji Asumsi Klasik Model 1

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

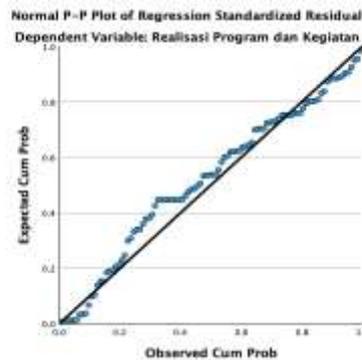
Pengujian Normalitas adalah evaluasi terhadap tingkat keabnormalan distribusi data. Prosedur ini merupakan uji yang paling umum dilakukan dalam analisis statistik parametrik. Uji normalitas dijalankan sebagai persyaratan untuk analisis regresi, berfungsi untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan memiliki distribusi normal atau tidak. Keberhasilan analisis regresi bergantung pada keberadaan distribusi normal dalam model regresi (Latan dan Temalagi 2013: 56). Pengujian normalitas ini melibatkan analisis grafis dan analisis statistik, yang mencakup grafik histogram dan grafik P-P Plot. Gambaran grafik histogram dan P-P Plot dapat dilihat pada gambar 4.2



Gambar 4.2. Uji Normalitas dengan Histogram

Gambar di atas adalah representasi grafik histogram. Suatu grafik histogram dianggap normal apabila distribusi data membentuk pola lonceng (bell-shaped), tanpa kecondongan ke kiri atau ke kanan (Santoso, 2015: 43). Histogram pada gambar tersebut membentuk pola lonceng dan tidak

condong ke kiri atau ke kanan, sehingga dianggap sebagai histogram yang normal.



Gambar 4.3 Uji Normalitas dengan P – P Plot

Pada Gambar 4,3 terdapat grafik P-P Plot. P-P Plot dapat diinterpretasikan dengan melihat sebaran elemen pada garis diagonal dalam grafik. P-P Plot dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas jika elemen tersebar secara signifikan di luar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis tersebut (Ghozali, 2016: 156). Grafik di atas menggambarkan lengkungan yang mengikuti garis regresi. P-P Plot tersebut menunjukkan bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki distribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merujuk pada hubungan antara variabel prediktor atau independen satu sama lain dalam model regresi. Suatu model regresi yang efektif seharusnya tidak menunjukkan korelasi antara variabel

independen. Ketika variabel independen saling berkorelasi, hal ini mengakibatkan variabel-variabel tersebut tidak bersifat ortogonal (Ghozali, 2011). Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan memeriksa nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda tidak mengalami masalah multikolinearitas (Ghozali, 2011).

Tabel 4.5. Output Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Anggaran Dinas	.758	1.320
	Penggunaan Teknologi	.747	1.338
	Dukungan Pemerintah Pusat	.687	1.457

a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

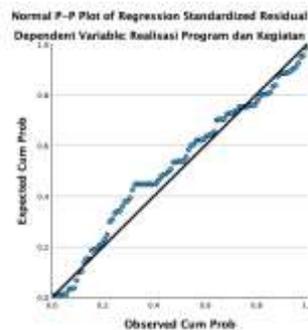
Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai VIF yang berada di bawah 10. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas dalam struktur model penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah suatu model regresi mengalami ketidakseragaman varians variabel antar pengamatan, yang disebut homoskedastisitas jika seragam dan heteroskedastisitas jika tidak seragam. Gejala heteroskedastisitas terjadi ketika disturbance term untuk setiap observasi tidak konstan, melainkan bervariasi.

Penilaian heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, salah satunya dengan menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Identifikasi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola khusus, seperti titik-titik membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), itu menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola tertentu, maka heteroskedastisitas tidak terjadi (Ghozali, 2011).

Gambar 4.4. Output Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam Gambar 4.4. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa sebaran residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu $Y=0$ tanpa pola khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier menunjukkan korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan

pada periode $t - 1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Pengujian ini diperlukan karena penelitian ini menggunakan data time series, di mana diketahui bahwa dalam jenis masalah dengan rekurensi, autokorelasi dapat "mengganggu" keterkaitan antar data (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji autokorelasi.

Tabel 4.6. Output Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.160 ^a

b. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai *Durbin-Watson test* (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 4.7 Durbin-WatsonTest (Uji DW)

Durbin Watson	Keterangan
< 1,08	Ada autokorelasi
1,09-1,66	Tanpa kesimpulan
1,67-2,34	Tidak ada autokorelasi
2,35-2,92	Tanpa kesimpulan
> 2,92	Ada autokorelasi

Sumber: Widyananta (2010)

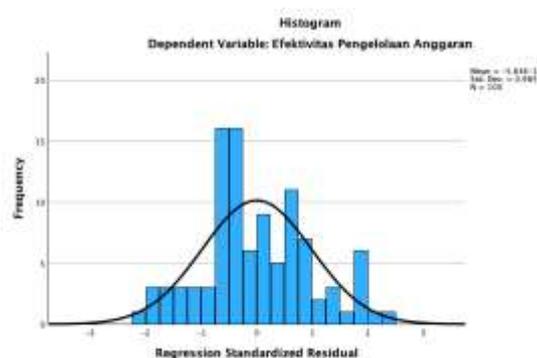
Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.160 yang berarti data yang diolah bebas dari autokorelasi.

D. Uji Asumsi Klasik Model 2

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

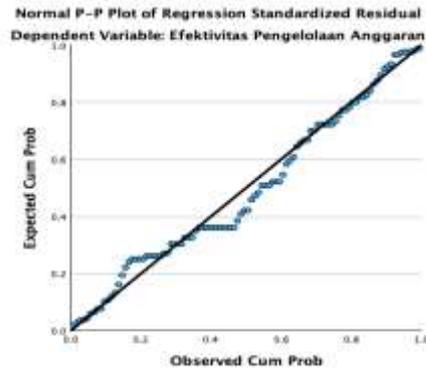
1. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas adalah evaluasi terhadap tingkat keabnormalan distribusi data. Prosedur ini merupakan uji yang paling umum dilakukan dalam analisis statistik parametrik. Uji normalitas dijalankan sebagai persyaratan untuk analisis regresi, berfungsi untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan memiliki distribusi normal atau tidak. Keberhasilan analisis regresi bergantung pada keberadaan distribusi normal dalam model regresi (Latan dan Temalagi 2013: 56). Pengujian normalitas ini melibatkan analisis grafis dan analisis statistik, yang mencakup grafik histogram dan grafik P-P Plot. Gambaran grafik histogram dan P-P Plot dapat dilihat pada gambar 4.5



Gambar 4.5. Uji Normalitas dengan Histogram

Gambar di atas adalah representasi grafik histogram. Suatu grafik histogram dianggap normal apabila distribusi data membentuk pola lonceng (bell-shaped), tanpa kecondongan ke kiri atau ke kanan (Santoso, 2015: 43). Histogram pada gambar tersebut membentuk pola lonceng dan tidak condong ke kiri atau ke kanan, sehingga dianggap sebagai histogram yang normal.



Gambar 4.6 Uji Normalitas dengan P – P Plot

Pada Gambar 4.6 terdapat grafik P-P Plot. P-P Plot dapat diinterpretasikan dengan melihat sebaran elemen pada garis diagonal dalam grafik. P-P Plot dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas jika elemen tersebar secara signifikan di luar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis tersebut (Ghozali, 2016: 156). Grafik di atas menggambarkan lengkungan yang mengikuti garis regresi. P-P Plot tersebut menunjukkan bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki distribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merujuk pada hubungan antara variabel prediktor atau independen satu sama lain dalam model regresi. Suatu model regresi yang efektif seharusnya tidak menunjukkan korelasi antara variabel independen. Ketika variabel independen saling berkorelasi, hal ini mengakibatkan variabel-variabel tersebut tidak bersifat ortogonal Ghozali,

2011). Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan memeriksa nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda tidak mengalami masalah multikolinearitas (Ghozali, 2011).

Tabel 4.8. Output Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Anggaran Dinas	.712	1.405
	Penggunaan Teknologi	.605	1.654
	Dukungan Pemerintah Pusat	.648	1.543
	Realisasi Program dan Kegiatan	.693	1.442

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

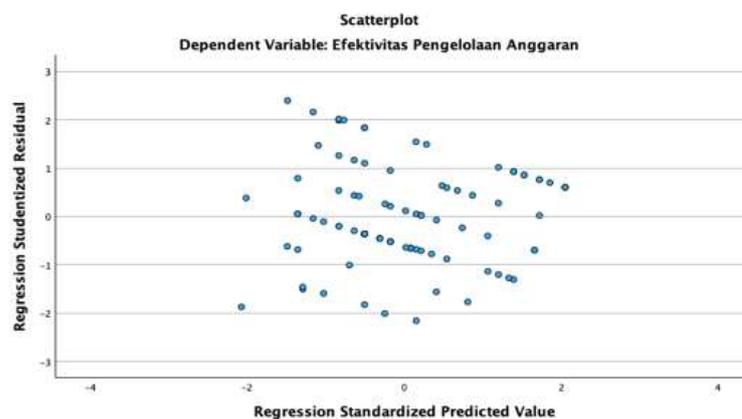
Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai VIF yang berada di bawah 10. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas dalam struktur model penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah suatu model regresi mengalami ketidakseragaman varians variabel antar pengamatan, yang disebut homoskedastisitas jika seragam dan heteroskedastisitas jika tidak seragam. Gejala heteroskedastisitas terjadi ketika disturbance term untuk setiap observasi tidak konstan, melainkan bervariasi.

Penilaian heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, salah satunya dengan menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Identifikasi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

mengamati pola tertentu pada scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola khusus, seperti titik-titik membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), itu menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola tertentu, maka heteroskedastisitas tidak terjadi (Ghozali, 2011).



Gambar 4.7 Output Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam Gambar 4.7. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa sebaran residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu $Y=0$ tanpa pola khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier menunjukkan korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Pengujian ini diperlukan karena penelitian ini menggunakan data time series, di mana diketahui bahwa dalam jenis masalah dengan rekurensi, autokorelasi dapat

"mengganggu" keterkaitan antar data (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji autokorelasi.

Tabel 4.9. Output Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.641 ^a

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai *Durbin-Watson test* (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 4.10 Durbin-WatsonTest (Uji DW)

Durbin Watson	Keterangan
< 1,08	Ada autokorelasi
1,09-1,66	Tanpa kesimpulan
1,67-2,34	Tidak ada autokorelasi
2,35-2,92	Tanpa kesimpulan
> 2,92	Ada autokorelasi

Sumber: Widyananta (2010)

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.641 yang berarti data yang diolah bebas dari autokorelasi.

E. Pengujian Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur yang digunakan dapat mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disiapkan telah dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi masing-masing pertanyaan (item) dengan skor totalnya. Data penelitian ini diukur dengan

analisis *person correlation*, dimana jika total dari analisis nilai < 0.05 maka data dikatakan valid (Ghozali, 2011). Pada tabel 4.11. menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas

	Corrected Item-Total Correlation
Anggaran Dinas	.397
Penggunaan Teknologi	.584
Dukungan Pemerintah Pusat	.578
Realisasi Program dan Kegiatan	.465
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	.515

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Syaifuddin Azwar (1997) dan Sugiyono (2005) menyatakan bahwa suatu item kuesioner dapat dikatakan valid jika *Corrected item-Total Correlation* memiliki nilai kritis $>$ dari 0,3 atau 30%. Dengan demikian maka item yang memiliki korelasi $>$ 30% dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi $<$ 30% dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Hasil analisis dalam Tabel 4.11 yang diperoleh ternyata semua koefisien korelasi berada diatas (30%) atau 0,30 ($r_{skritis}$) maka model yang digunakan dapat dikatakan valid untuk dikembangkan.

b) Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataannya adalah konsisten atau stabil. Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian.

Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Uji realibilitas ini menggunakan tehnik *Cronbach's alpha* (α). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r_i) $> 0,7$ (Ghozali, 2011). Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12. Hasil Uji Reabilitas

	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Anggaran Dinas	.731
Penggunaan Teknologi	.668
Dukungan Pemerintah Pusat	.665
Realisasi Program dan Kegiatan	.715
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	.691

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

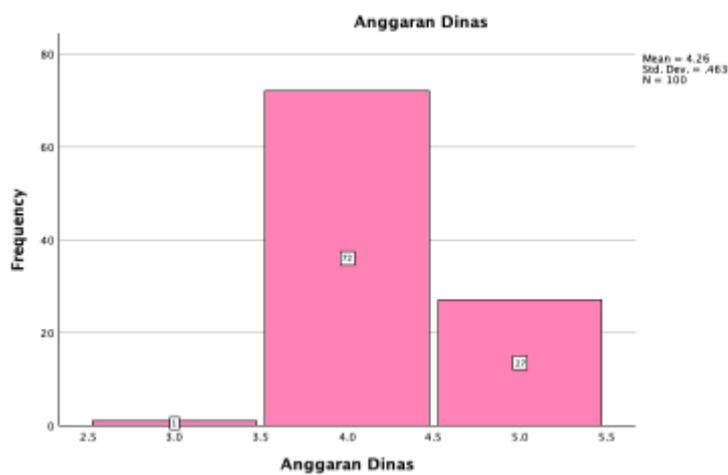
Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas pada tabel 4.12. menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* terhadap butir yang valid pada indicator variabel yang digunakan yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah **reliable**.

F. Analisis Deskriptif Variabel

1. Anggaran dinas

Anggaran Dinas (X1) adalah jumlah dana yang diperuntukkan oleh Kantor Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendukung berbagai program dan kegiatan. Ketepatan sasaran adalah faktor kunci dalam menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, baik yang ditetapkan secara individu maupun secara keseluruhan. Faktor ketepatan waktu juga memainkan peran penting, karena dapat memengaruhi keberhasilan atau

kegagalan suatu kegiatan organisasi. Selain itu, tercapainya tujuan organisasi juga menjadi fokus penting, dimana aktivitas organisasi berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua aspek tersebut dinilai menggunakan skala Likert dengan lima poin dengan meminta responden menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dari pernyataan yang diajukan.

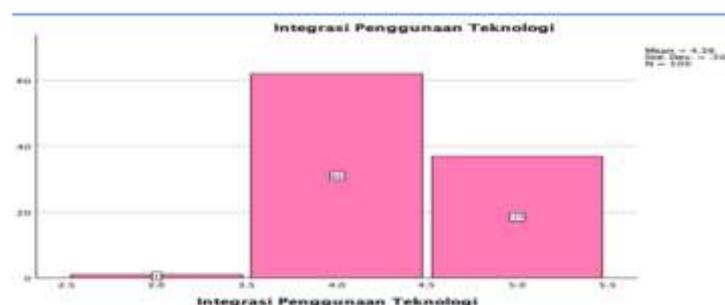


Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Hasil statistik deskriptif dari jawaban responden atas variabel Anggaran dinas pada diagram tersebut menunjukkan dominan responden menjawab setuju sebanyak 72 responden, sedangkan 27 responden menyatakan sangat setuju Anggaran dinas sebagai penentu efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat disimpulkan bahwa ada tingkat kesepakatan yang cukup tinggi di antara responden bahwa Anggaran Dinas memiliki peran yang signifikan dalam menentukan seberapa efektif pengelolaan anggaran di dinas tersebut.

2. Integrasi Penggunaan Teknologi

Integrasi Penggunaan Teknologi (X2) merujuk pada sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau infrastruktur teknologi lainnya digunakan oleh Kantor Dinas. Ini meliputi pengelolaan basis data, perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya teknologi lainnya yang mendukung operasi dan layanan kantor. Intensitas Pemanfaatan mengacu pada tingkat minat atau intensitas penggunaan yang tinggi terhadap sistem informasi teknologi, yang dapat mendorong perilaku yang mendukung pemanfaatan teknologi sistem informasi. Pengukuran Frekuensi Pemanfaatan mencatat jumlah waktu yang digunakan dan frekuensi interaksi dengan teknologi tertentu sebagai indikator penggunaan sebenarnya. Jumlah Aplikasi atau Perangkat Lunak yang digunakan mengacu pada program yang secara khusus didesain untuk mendukung berbagai aplikasi, seperti aplikasi bisnis, pendidikan, multimedia, dan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pengguna dalam berbagai bidang. Semua faktor ini dinilai menggunakan skala Likert dengan lima poin dengan meminta responden menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dari pernyataan yang diajukan.



Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Hasil statistik deskriptif dari jawaban responden atas variabel Integrasi Penggunaan Teknologi pada diagram tersebut menunjukkan dominan responden menjawab setuju dan sangat setuju sebanyak 17 responden, sedangkan satu responden menyatakan cukup setuju adanya Integrasi Penggunaan Teknologi sangat penting penentu efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Dukungan pemerintah pusat

Dukungan Pemerintah Pusat (X3) merujuk pada dana atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Penajam Paser Utara. Bantuan ini dapat digunakan untuk mendukung anggaran dan penerapan teknologi oleh Kantor Dinas. Bantuan hibah yang diberikan adalah bantuan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pengembangan SDM merujuk pada upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan. Membangun kemitraan mengacu pada upaya membangun kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Semua aspek tersebut dinilai menggunakan skala Likert dengan lima poin.



Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Hasil statistik deskriptif dari jawaban responden atas variabel Dukungan pemerintah pusat pada diagram tersebut menunjukkan dominan responden menjawab setuju sebanyak 22 responden sangat setuju sebanyak 17 responden cukup setuju akan dukungan pemerintah pusat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Realisasi program dan kegiatan

Realisasi Program dan Kegiatan (Z) adalah indikator sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran Kantor Dinas benar-benar terlaksana dengan baik. Realisasi Keuangan mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Hasil yang Dicapai mengukur pencapaian dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Solusi Atas Permasalahan yang Dihadapi mencakup penilaian terhadap kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Semua aspek tersebut dinilai menggunakan skala Likert dengan lima poin.

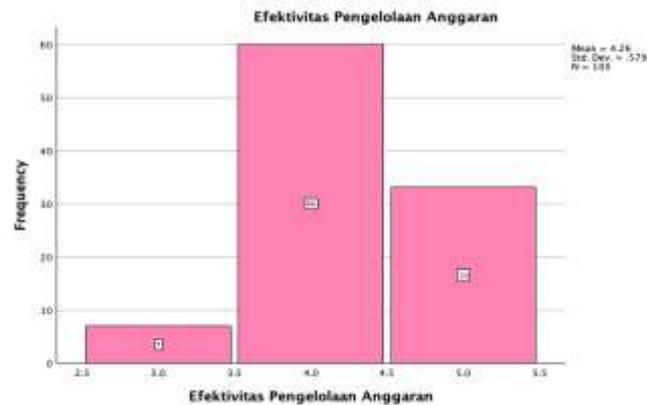


Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Hasil statistik deskriptif dari jawaban responden atas variabel realisasi program dan kegiatan menunjukkan dominan jawaban responden memilih setuju terhadap indikator realisasi program dan kegiatan yaitu sebanyak 60 dan hanya 17 responden yang cukup setuju.

5. Efektivitas pengelolaan anggaran

Efektivitas Pengelolaan Anggaran (Y) mengukur sejauh mana Kantor Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara mampu mengelola anggaran secara efisien. Akuntabilitas dievaluasi berdasarkan hasil atau kinerja yang diperoleh. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah menjadi faktor penting dalam menilai akuntabilitas, dan dinilai menggunakan skala Likert dengan lima poin. Pemberdayaan manajer profesional dan keberadaan lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan independen juga merupakan aspek yang diperhitungkan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, dan dievaluasi menggunakan skala Likert dengan lima poin.



Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Hasil statistik deskriptif dari jawaban responden atas variabel efektivitas pengelolaan anggaran menunjukkan dominan jawaban responden memilih setuju sebanyak 60 responden dan 13 responden yang sangat setuju dan 7 responden cukup setuju pertimbangan efektivitas pengelolaan anggaran.

G. Analisis Hasil Penelitian

a. Uji Hipotesis Analisis Regresi Berganda

1) Model Regresi Pertama

Pada bagian ini dibahas mengenai **Analisis Komprehensif Alokasi Anggaran, Integrasi Penggunaan Teknologi, Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Efektifitas Pengelolaan Anggaran melalui Realisasi Program pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur** menggunakan hasil penelitian yang sudah diolah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan program SPSS for windows release 29 Hasil analisa regresi, didapatkan ringkasan secara statistik sebagai berikut:

Tabel 4.13. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.285	1.503

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa 0.285 atau 28.5% realisasi program dan kegiatan dipengaruhi oleh Anggaran dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi dan Dukungan pemerintah pusat dan ini berarti bahwa $100\% - 28.5\% = 71.5\%$ realisasi program dan kegiatan dipengaruhi oleh faktor lain. Berikut adalah perhitungan nilai standar error model regresi pertama ini dengan nilai R Square (0.307):

Nilai $e_1 = \sqrt{(1 - 0.307)} = \sqrt{(0.693)} \approx 0.832$, Jadi, nilai e_1 sama dengan 0.832

Tabel 4.14. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	95.978	3	31.993	14.158	<.001 ^b
Residual	216.932	96	2.260		
Total	312.910	99			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Dari Tabel 4.14 menunjukkan signifikansi 0,01 berarti semua variabel dalam model berpengaruh terhadap realisasi program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 4.15. Coefficients^a

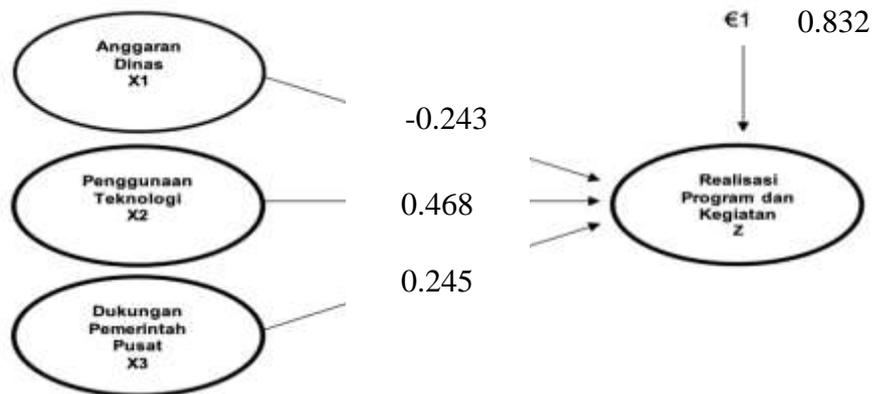
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.111	1.781		3.432	<.001
	Anggaran Dinas	-.341	.137	-.243	-2.490	.015
	Integrasi Penggunaan Teknologi	.592	.124	.468	4.765	<.001
	Dukungan Pemerintah Pusat	.257	.107	.245	2.393	.019

Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Dari tabel 4.15 di atas, didapat persamaan regresi berganda dan model regresi pertama sebagai berikut :

$$Y = 6.111 - 0.243X_1 + 0.468X_2 + 0.245X_3 + 0.832$$



Gambar 4.8. Diagram jalur persamaan struktural 1

Berikut adalah penjelasan dari persamaan regresi berganda dan model persamaan struktural 1 yang terbentuk :

- 1) Anggaran dinas memiliki nilai t sebesar (-2.490), nilai koefisien B sebesar (-0.243) atau -24,3%, dan tingkat signifikan sebesar 0,015. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (X1) Anggaran dinas memiliki pengaruh negatif sebesar (-24,3%) terhadap realisasi program dan kegiatan (Z), dengan tingkat signifikan sebesar 0,015 artinya Anggaran dinas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan.
- 2) Integrasi Penggunaan Teknologi memiliki nilai t sebesar 4.765 nilai koefisien B (0.468) atau 46,8% dan tingkat signifikan sebesar 0.001. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (X2) Integrasi Penggunaan Teknologi memiliki pengaruh positif terhadap realisasi program dan kegiatan (Z) dengan tingkat signifikan 0,001.
- 3) Dukungan pemerintah pusat memiliki nilai t sebesar 2.393 nilai koefisien B sebesar (0.245) atau 24,5% dan tingkat signifikan sebesar

0,019. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (X3) Dukungan pemerintah pusat memiliki pengaruh positif sebesar (24,5%) terhadap realisasi program dan kegiatan (Z), dengan tingkat signifikan sebesar 0.019 artinya Dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap realisasi program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

2) Model Regresi Kedua

Pada bagian ini dibahas mengenai pengaruh Anggaran dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi, Dukungan pemerintah pusat dan realisasi program dan kegiatan terhadap Efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan hasil penelitian yang sudah diolah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan program SPSS for windows release 29 Hasil analisa regresi, didapatkan ringkasan secara statistik sebagai berikut:

Tabel 4.16. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.314	.285	1.278

Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa 0.285 atau 28,5%, efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh Anggaran dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi, Dukungan pemerintah pusat dan realisasi program dan kegiatan dan ini berarti bahwa $100\% - 28.5\% = 71.5\%$ efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh faktor lain. Berikut

adalah perhitungan nilai standar error model regresi kedua ini dengan nilai R Square (0.314):

$$\text{Nilai } e1 = \sqrt{(1 - 0.314)} = \sqrt{(0.686)} \approx 0.828$$

Jadi, nilai e1 sama dengan 0.828

Tabel 4.17. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	70.975	4	17.744	10.866	<.001 ^b
Residual	155.135	95	1.633		
Total	226.110	99			

Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Dari Tabel 4.17 menunjukkan signifikansi 0,001 berarti semua variabel dalam model berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 4.18. Coefficients^a

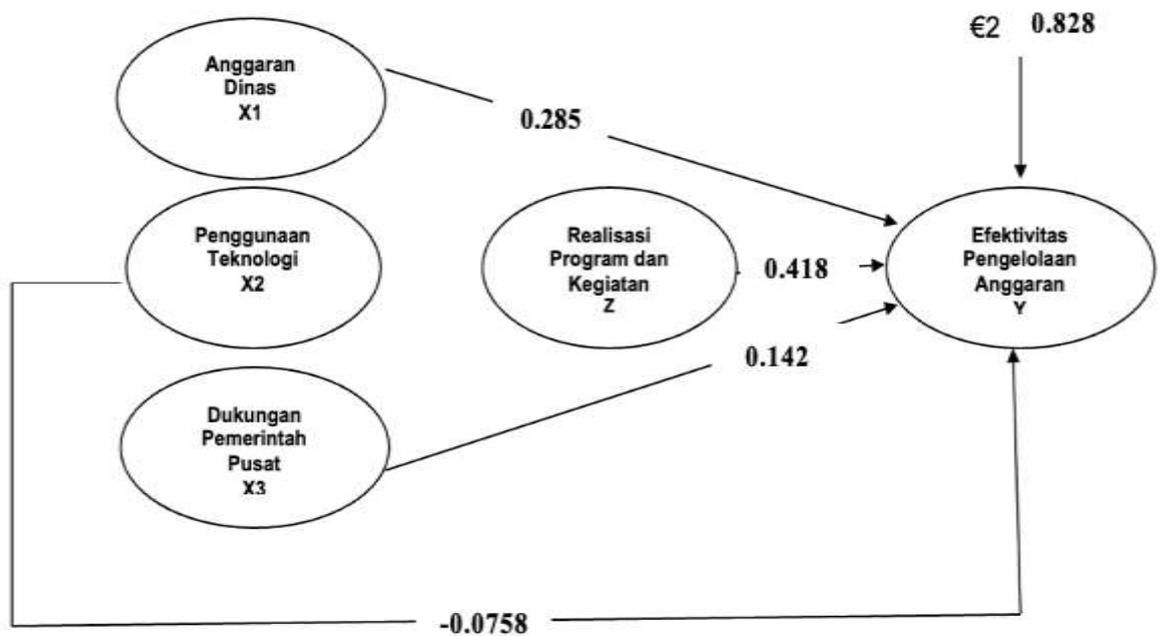
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.534	1.604		2.204	.030
Anggaran Dinas	.340	.120	.285	2.824	.006
Integrasi Penggunaan Teknologi	-.080	.117	-.075	-.684	.496
Dukungan Pemerintah Pusat	.126	.094	.142	1.342	.183
Realisasi Program dan Kegiatan	.355	.087	.418	4.092	<.001

Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Sumber: Hasil Olah Data SPSS V 29.0 (2024)

Dari tabel 4.18 di atas, didapat persamaan regresi berganda dan model regresi kedua sebagai berikut :

$$Y = 3.534 + 0.285X1 - 0.075X2 + 0.142X3 + 0.418Z + 0.828$$



Gambar 4.9 Diagram jalur persamaan struktural 2

Berikut adalah penjelasan dari persamaan regresi berganda yang terbentuk :

1. Anggaran dinas memiliki nilai t sebesar (2.824), nilai koefisien B sebesar (0.285) atau 28,5%, dan tingkat signifikan sebesar 0,006. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (X1) Anggaran dinas memiliki pengaruh positif sebesar (28,5%) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y), dengan tingkat signifikan sebesar 0,006 artinya Anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
2. Integrasi Penggunaan Teknologi memiliki nilai t sebesar -0.684 nilai koefisien B (0.075) atau 7,5% dan tingkat signifikan sebesar 0.496. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (X2) Integrasi Penggunaan

Teknologi tidak memiliki pengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan anggaran (Y) dengan tingkat signifikan 0,496.

3. Dukungan pemerintah pusat memiliki nilai t sebesar 1.342 nilai koefisien B sebesar (0.142) atau 14,2% dan tingkat signifikan sebesar 0,183. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (X3) Dukungan pemerintah pusat memiliki pengaruh sebesar (14,2%) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y), dengan tingkat signifikan sebesar 0,83 artinya Dukungan pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Realisasi program dan kegiatan memiliki nilai t sebesar 4.092 nilai koefisien B sebesar (0.418) atau 41,8% dan tingkat signifikan sebesar 0,418. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (Z) realisasi program dan kegiatan memiliki pengaruh positif sebesar (0,001) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y), dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 artinya realisasi program dan kegiatan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Uji Sobel (Pengaruh Tidak Langsung)

Pengujian hipotesis berikutnya adalah untuk mengevaluasi pengaruh variabel intervening. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji variabel intervening adalah analisis jalur (*path analysis*). Metode ini digunakan untuk menilai hubungan kausalitas antar variabel yang telah

ditentukan berdasarkan teori. Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda dan bertujuan untuk mengidentifikasi jalur pengaruh antar variabel. Analisis Sobel test merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menguji signifikansi variabel mediasi.

Menurut Ghozali (2018, hal. 245), dalam analisis Sobel test, jika nilai z-value dalam harga mutlak lebih besar dari 1.96 atau jika tingkat signifikansi statistik z (p-value) kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui mediator. Berikut ini adalah hasil output data yang telah diolah menggunakan IBM SPSS untuk menguji variabel intervening dengan menggunakan analisis jalur dan Sobel test.

1) Pengaruh Alokasi anggaran dinas terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan.

Sub bab ini menganalisis pengaruh alokasi anggaran dinas (X1) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) dengan realisasi program dan kegiatan (Z) sebagai mediator menggunakan analisis jalur. Di bawah ini adalah ringkasan hasil perhitungan yang diperoleh.

Tabel 4.19. Output Ringkasan Coefficients Uji Regresi Antar Variabel X1,Z dan Y

Variabel	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	Sig.	Keterangan
X1→Y	0.120	0.285	0.006	Signifikan
X1→Z	0.137	-0.243	0.015	Signifikan
Z →Y	0.087	0.418	0.001	Signifikan

Sumber: Data primer, 2024

Berdasarkan ringkasan tabel di atas, diperoleh hasil berikut ini: Pengaruh langsung dari alokasi anggaran dinas (X1) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) adalah sebesar 0.285 dan signifikan secara statistik. Pengaruh tidak langsung dari X1 terhadap Z adalah sebesar -0.101574, yang diperoleh dari jalur $X1 \rightarrow Z$ dan $Z \rightarrow Y$ ($-0.243 \times 0.418 = -0.101574$). Sementara itu, besarnya pengaruh total adalah $0.285 + (-0.243 \times 0.418) = 0.285 + (-0.101574) = 0.183426$ (Ghozali, 2018, hal. 247), yang dihitung dengan menambahkan pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung X1 terhadap Y signifikan, dan ketika melalui variabel X1 terhadap Z juga signifikan atau sukses dan Z terhadap Y signifikan atau sukses.

Berdasarkan analisis jalur (*path analysis*) variabel realisasi program dan kegiatan (Z) memediasi antara alokasi anggaran dinas (X1) dengan efektivitas pengelolaan anggaran (Y) secara parsial (*partial mediation*). Dikatakan *partial mediation* karena efek variabel alokasi anggaran dinas (X1) ke variabel efektivitas pengelolaan anggaran (Y) menurun namun tidak sama dengan nol dengan memasukkan variabel realisasi program dan kegiatan (Z). Artinya dapat dikatakan tanpa memasukkan variabel realisasi program dan kegiatan (Z), efek variabel alokasi anggaran dinas (X1) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) memiliki efek yang signifikan dan sukses.

Selanjutnya, dilakukan uji mediasi menggunakan Sobel test dengan persamaan sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 \cdot S_a^2 + a^2 \cdot S_b^2 + S_a^2 \cdot S_b^2}$$

Memasukkan nilai yang diberikan, kita punya:

$$S_{ab} = \sqrt{(0.418^2 \cdot 0.137^2) + (0.243^2 \cdot 0.087^2) + (0.137^2 \cdot 0.418^2)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0.174724 \cdot 0.018769) + (0.059049 \cdot 0.007569) + (0.018769 \cdot 0.174724)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0.003277284) + (0.000447992) + (0.003278865)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{0.006004141}$$

$$S_{ab} \approx 0.07752925$$

Selanjutnya, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel mediasi, digunakan persamaan:

$$Z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Memasukkan nilai yang diberikan, kita punya:

$$Z = \frac{-0.243 \times 0.418}{0.07752925}$$

$$Z = \frac{-0.101574}{0.07752925}$$

$$Z \approx -1.308463639$$

Keterangan:

- Ab: koefisien indirect effect yang diperoleh dari koefisien direct a dan koefisien direct b
- a: koefisien direct effect independen (X) terhadap mediator (Z)

- b: koefisien direct effect mediator (Z) terhadap dependen (Y)
- Sa: standard error dari koefisien a
- Sb: standard error dari koefisien b

Berdasarkan perhitungan persamaan sobel test dengan manual diperoleh besarnya nilai z adalah -1.308463639 yang berarti < 1.96 yang menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Nilai Z tersebut dapat dikonfirmasi dengan menggunakan calculator sobel test. Berikut hasil perhitungan z menggunakan calculator sobel berikut:

Calculate interactive Mediation Tests

Association between IV & mediator Coefficient (A)
0.243

Association between mediator & DV (B)
0.418

Standard error of A (S_a)
0.137

Standard error of B (S_b)
0.087

Calculate **Reset**

Test Name	Test statistic	P value
Sobel Test	1.66395	0.09612
Aroian Test	1.63312	0.10244

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil yang diperoleh dari perhitungan manual dan menggunakan kalkulator Sobel test. Besarnya test statistik adalah 1.66395, yang menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 1.96. Selain itu, nilai z (P-value) adalah sama dengan 0.09612 atau lebih besar dari 0.05. (Preacher dan Hayes, 2004).

Dari hasil uji Sobel test, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung alokasi anggaran dinas (X1) terhadap efektivitas pengelolaan

anggaran (Y) yang dimediasi oleh realisasi program dan kegiatan (Z) bersifat tidak signifikan.

Dengan demikian, hasil dari uji analisis jalur (path analysis) dan Sobel test memperkuat bukti untuk menolak hipotesis (H8).

2) Pengaruh Integrasi Penggunaan Teknologi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan.

Sub bab ini menganalisis pengaruh Integrasi Penggunaan Teknologi (X2) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) dengan realisasi program dan kegiatan (Z) sebagai mediator menggunakan analisis jalur. Di bawah ini adalah ringkasan hasil perhitungan yang diperoleh.

Tabel 4.20. Output Ringkasan Coefficients Uji Regresi Antar Variabel X2, Z dan Y

Variabel	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	Sig.	Keterangan
X2→Y	0.117	-0.075	0.496	Tidak Signifikan
X2→Z	0.124	0.468	0.001	Signifikan
Z →Y	0.087	0.418	0.001	Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan ringkasan tabel di atas, diperoleh hasil berikut ini: Pengaruh langsung dari Integrasi Penggunaan Teknologi (X2) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) adalah sebesar -0.075 dan signifikan secara statistik. Pengaruh tidak langsung dari X2 terhadap Z adalah sebesar 0.195624, yang diperoleh dari jalur X2→Z dan Z→Y $0.468 \times 0.418 = 0.195624$. Sementara itu, besarnya pengaruh total adalah $(-0.075 + (0.468 \times 0.418)) = -0.075 + 0.195624 = 0.120624$, (Ghozali, 2018, hal. 247), yang dihitung dengan menambahkan pengaruh langsung dan tidak

langsung. Pengaruh langsung X2 terhadap Y tidak signifikan, dan ketika melalui variabel x2 terhadap Z signifikan atau sukses dan Z terhadap Y signifikan atau sukses.

Selanjutnya, dilakukan uji mediasi menggunakan Sobel test dengan persamaan sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 \cdot S_a^2 + a^2 \cdot S_b^2 + S_a^2 \cdot S_b^2}$$

Memasukkan nilai yang diberikan, kita punya:

$$S_{ab} = \sqrt{(0.418^2 \cdot 0.124^2) + (0.468^2 \cdot 0.087^2) + (0.124^2 \cdot 0.418^2)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0.174724 \cdot 0.015376) + (0.219024 \cdot 0.007569) + (0.015376 \cdot 0.174724)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0.002689998624) + (0.001657269056) + (0.002689998624)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{0.007037266304}$$

$$S_{ab} \approx 0.0838801255$$

Selanjutnya, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel mediasi, digunakan persamaan:

$$Z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Memasukkan nilai yang diberikan, kita punya:

$$Z = \frac{0.468 \times 0.418}{0.0838801255}$$

$$Z = \frac{0.195624}{0.0838801255}$$

$$Z \approx 2.330029388$$

Keterangan:

- Ab: koefisien indirect effect yang diperoleh dari koefisien direct a dan koefisien direct b
- a: koefisien direct effect independen (X) terhadap mediator (Z)
- b: koefisien direct effect mediator (Z) terhadap dependen (Y)
- Sa: standard error dari koefisien a
- Sb: standard error dari koefisien b

Berdasarkan perhitungan persamaan sobel test dengan manual diperoleh besarnya nilai z adalah 2.330029388 yang berarti > 1.96 yang menunjukkan nilai yang signifikan. Nilai Z tersebut dapat dikonfirmasi dengan menggunakan calculator sobel test. Berikut hasil perhitungan z menggunakan calculator sobel berikut:

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil yang diperoleh dari perhitungan manual dan menggunakan kalkulator Sobel test. Besarnya test statistik adalah 2.330029388, yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1.96. Selain itu, nilai z (P-value) adalah sama dengan 0.003 atau lebih kecil dari 0.05. (Preacher dan Hayes, 2004).

Dari hasil uji Sobel test, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung Integrasi Penggunaan Teknologi (X2) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) yang dimediasi oleh realisasi program dan kegiatan (Z) bersifat signifikan.

Dengan demikian, hasil dari uji analisis jalur (path analysis) dan Sobel test memperkuat bukti untuk menerima hipotesis (H9).

3) Pengaruh dukungan pemerintah pusat terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan

Sub bab ini menganalisis pengaruh dukungan pemerintah pusat (X3) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) dengan realisasi program dan kegiatan (Z) sebagai mediator menggunakan analisis jalur. Di bawah ini adalah ringkasan hasil perhitungan yang diperoleh.

Tabel 4.21 Output Ringkasan Coefficients Uji Regresi Antar Variabel X3,Z dan Y

Variabel	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	Sig.	Keterangan
X3→Y	0.094	0.142	0.183	Tidak Signifikan
X3→Z	0.107	0.245	0.019	Signifikan
Z →Y	0.087	0.418	0.001	Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan ringkasan tabel di atas, diperoleh hasil berikut ini: Pengaruh langsung dari dukungan pemerintah pusat (X3) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) adalah sebesar 0.142 dan signifikan secara statistik. Pengaruh tidak langsung dari X3 terhadap Z adalah sebesar -0.101574, yang diperoleh dari jalur X3→Z dan Z→Y $0.245 \times 0.418 = 0.10241$, sementara itu, besarnya pengaruh total adalah $0.142 + (0.245 \times 0.418) = 0.142 + 0.10241 = 0.24441$ (Ghozali, 2018, hal. 247), yang dihitung dengan menambahkan pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung X3 terhadap Y tidak signifikan, dan ketika melalui variabel x3 terhadap Z menunjukkan pengaruh yang signifikan atau sukses dan Z terhadap Y signifikan atau sukses.

Berdasarkan analisis jalur (*path analysis*) variabel realisasi program dan kegiatan (Z) memediasi antara dukungan pemerintah pusat (X3)

dengan efektivitas pengelolaan anggaran (Y) secara parsial (*partial mediation*). Dikatakan *partial mediation* karena efek variabel dukungan pemerintah pusat (X3) ke variabel efektivitas pengelolaan anggaran (Y) menurun namun tidak sama dengan nol dengan memasukkan variabel realisasi program dan kegiatan (Z). Artinya dapat dikatakan tanpa memasukkan variabel realisasi program dan kegiatan (Z), efek variabel dukungan pemerintah pusat (X3) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) memiliki efek yang signifikan dan sukses.

Selanjutnya, dilakukan uji mediasi menggunakan Sobel test dengan persamaan sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 \cdot S_a^2 + a^2 \cdot S_b^2 + S_a^2 \cdot S_b^2}$$

Memasukkan nilai yang diberikan, kita punya:

$$S_{ab} = \sqrt{(0.418^2 \cdot 0.107^2) + (0.245^2 \cdot 0.087^2) + (0.107^2 \cdot 0.418^2)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0.174724 \cdot 0.011449) + (0.060025 \cdot 0.007576) + (0.011449 \cdot 0.174724)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0.0019979659) + (0.000454115) + (0.0020000757)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{0.0044521566}$$

$$S_{ab} \approx 0.066751635$$

Selanjutnya, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel mediasi, digunakan persamaan:

$$Z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Memasukkan nilai yang diberikan, kita punya:

$$Z = \frac{0.245 \times 0.418}{0.066751635}$$

$$Z = \frac{0.10241}{0.066751635}$$

$$Z \approx 1.533170686$$

Keterangan:

- Ab: koefisien indirect effect yang diperoleh dari koefisien direct a dan koefisien direct b
- a: koefisien direct effect independen (X) terhadap mediator (Z)
- b: koefisien direct effect mediator (Z) terhadap dependen (Y)
- Sa: standard error dari koefisien a
- Sb: standard error dari koefisien b

Nilai Z tersebut dapat dikonfirmasi dengan menggunakan calculator sobel test. Berikut hasil perhitungan z menggunakan calculator sobel berikut:

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil yang diperoleh dari perhitungan manual dan menggunakan kalkulator Sobel test. Besarnya test statistik adalah 2.06699, yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1.96. Selain itu, nilai z (P-value) adalah sama dengan 0.03874 atau lebih kecil dari 0.05.

Perhitungan menggunakan kalkulator Sobel test menghasilkan statistik z (p-value) sebesar 0.03874, yang juga kurang dari 0.05 (Preacher

Test Name	Test statistic	P value
Sobel Test	2.06699	0.03874
Aroian Test	2.03145	0.04221

dan Hayes, 2004). Dari hasil uji Sobel test, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung dukungan pemerintah pusat (X3) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y) yang dimediasi oleh realisasi program dan kegiatan (Z) bersifat signifikan.

Dengan demikian, hasil dari uji analisis jalur (*path analysis*) dan Sobel test memperkuat bukti untuk menerima hipotesis (H10).

Berikut hasil uji statistik hubungan antara variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22. Hubungan antara variabel penelitian

Variabel	t	Sig.	Keterangan
X1→Y	2.824	0.006	Signifikan
X2→Y	-.684	0.496	Tidak Signifikan
X3→Y	1.342	0.183	Tidak Signifikan
X1→Z	-2.490	0.015	Signifikan
X2→Z	4.765	0.001	Signifikan
X3→Z	2.393	0.019	Signifikan
Z →Y	4.092	0.001	Signifikan
X1→Z→Y	1.633	0.096	Signifikan
X2→Z→Y	2.967	0.003	Tidak Signifikan
X3→Z→Y	2.031	0.042	Signifikan

Sumber: Data Diolah

H. Pembahasan

Dari analisis hasil penelitian, maka dapat diinterpretasi, sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran dinas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran

Alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini menggambarkan pentingnya alokasi anggaran yang tepat dan efisien dalam mendukung kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh dinas tersebut. Dengan kata lain, semakin baik alokasi anggaran yang dilakukan, semakin efektif pula pengelolaan anggaran yang dapat tercapai. Oleh karena itu, manajemen alokasi anggaran yang cermat dan terencana dengan baik menjadi kunci untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kabupaten yang memiliki karakteristik geografis dan sosial tertentu, terutama terkait dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Alokasi anggaran yang tepat dan efisien dapat membantu dinas mengatasi tantangan yang unik di wilayah tersebut, seperti pengembangan infrastruktur pertanian, pendampingan teknis kepada petani, dan mitigasi risiko bencana alam yang dapat mempengaruhi produksi pangan. Dinas

Ketahanan Pangan memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Alokasi anggaran digunakan untuk mendukung program-program seperti diversifikasi pangan, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan jaringan distribusi pangan yang merata dan berkelanjutan.

Hasil penelitian yang diuraikan oleh Siregar (2020), Tamasoleng (2015), dan Fitri (2019) menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan alokasi dana desa atau anggaran berbasis kinerja. Temuan ini menggaris bawahi bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya bergantung pada pencapaian target keuangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, pemahaman internal, dan kesesuaian prinsip-prinsip anggaran dengan praktik pengelolaan di lapangan. Sementara itu, temuan dari penelitian Nur et al. (2021) menunjukkan bahwa alokasi anggaran dinas secara positif dan signifikan mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Meskipun penelitian sebelumnya menekankan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan alokasi anggaran, temuan tersebut menegaskan bahwa alokasi anggaran dinas tetap memberikan kontribusi positif pada pengelolaan anggaran secara keseluruhan, sesuai dengan penelitian Nur et al. (2021).

Anggaran diinterpretasikan sebagai rencana kegiatan yang merangkum aktivitas yang akan dilaksanakan oleh sebuah entitas organisasi, baik itu perusahaan maupun pemerintahan, selama periode

tertentu dengan spesifikasi kuantitatif. Anggaran, sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo, merupakan pernyataan yang menghubungkan estimasi kinerja dengan dimensi finansial, yang penting dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Dalam konteks pemerintah atau sektor publik, anggaran memiliki peran yang vital dalam menjalankan fungsi-fungsi kunci seperti akuntabilitas publik, perencanaan, dan pengendalian. Dokumen anggaran menjadi panduan bagi semua instansi, baik publik maupun swasta, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan memuat berbagai komponen seperti pengeluaran, pendapatan, dan sumber pendanaan. Budget, sebagaimana dipahami oleh Prasetyo dan Nugraheni (2020), memiliki peran penting dalam memberikan panduan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana awal yang telah dirancang. Oleh karena itu, temuan bahwa alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran memberikan validitas pada pentingnya anggaran sebagai instrumen manajemen yang esensial dalam memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur et al. (2021) dan Mardiasmo (2022).

Dalam kondisi nyata anggaran organisasi sektor publik, Basri (2013) menegaskan bahwa anggaran tidak hanya mencakup perencanaan biaya atas rencana yang dibuat, tetapi juga strategi untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Tahap penyusunan anggaran

dianggap krusial karena ketidakberhasilan dalam mengelola anggaran dapat menghambat pencapaian program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Secara umum, seringkali terjadi pemisahan antara penyusunan anggaran dengan perumusan dan perencanaan strategis, sehingga kesuksesan penerapan anggaran tidak selalu sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam kondisi ini, pentingnya alokasi anggaran dinas yang efektif terhadap pengelolaan anggaran menjadi relevan, mengingat alokasi yang tepat dapat menjadi alat manajemen yang efektif untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran dinas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran memberikan pandangan yang kuat atas pentingnya integrasi antara proses penyusunan anggaran dan perencanaan strategis dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Integrasi Penggunaan Teknologi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran

Integrasi Penggunaan Teknologi berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan Integrasi Penggunaan Teknologi, pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Meskipun teknologi telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan, termasuk

dalam pengelolaan anggaran, namun dalam konteks spesifik ini, dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan anggaran belum begitu terasa secara signifikan. Kemungkinan penyebabnya dapat meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada, ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal, serta kendala dalam integrasi sistem teknologi yang ada dengan baik dalam proses pengelolaan anggaran. Selain itu, aspek-aspek manusia seperti keterampilan, pengetahuan, dan budaya organisasi juga turut memainkan peran dalam menentukan sejauh mana teknologi dapat memberikan kontribusi efektif dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, meskipun Integrasi Penggunaan Teknologi hadir dalam pengelolaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam, namun belum dapat disimpulkan bahwa teknologi secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam konteks tersebut.

Kabupaten Penajam Paser Utara mungkin menghadapi kendala dalam infrastruktur teknologi yang tersedia. Akses internet yang lambat atau kurang stabil, kurangnya jaringan komunikasi yang memadai, atau ketersediaan perangkat keras yang terbatas. Hal ini dapat menghambat penggunaan teknologi secara optimal dalam proses pengelolaan anggaran, disamping integrasi teknologi dalam pengelolaan anggaran membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus dalam menggunakan sistem teknologi tersebut. Pegawai atau staf yang

terlibat masih perlu meningkatkan keterampilan atau pelatihan yang memadai terkait dengan teknologi yang digunakan, maka efektivitas penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat terhambat.

Sejalan dengan hasil penelitian oleh Verawati, Husaini, and Aisyah (2021) menekankan peran teknologi informasi sebagai faktor penentu efektivitas pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berkontribusi positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga tersebut. Sementara itu, penelitian oleh Sukarta, Badera, and Ratnadi (2017) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan Universitas Udayana. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi Integrasi Penggunaan Teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Penelitian oleh Smith (2018) juga menggarisbawahi pengaruh positif sistem informasi keuangan terintegrasi dalam organisasi nonprofit, menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di sektor tersebut. Selanjutnya, penelitian oleh Johnson (2019) menekankan dampak implementasi teknologi cloud computing pada pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan

efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan pernyataan Amelia (2019) yang menyatakan bahwa Integrasi Penggunaan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, hal ini dapat dikaitkan dengan implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja pegawai dan efisiensi operasional suatu lembaga. Teknologi informasi telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan produktivitas dan akurasi dalam penyelesaian tugas-tugas organisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan cepat. Manfaat Integrasi Penggunaan Teknologi informasi tersebut merupakan hasil dari interaksi timbal balik antara pengguna dengan teknologi informasi yang diterapkan. Oleh karena itu, penerimaan dan adopsi teknologi informasi oleh pegawai menjadi kunci dalam memastikan bahwa teknologi tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, dengan menyederhanakan proses kerja dan meningkatkan kualitas hasil kerja secara keseluruhan.

Berdasarkan pemahaman dari Amelinda et al. (2022), anggaran pemerintah tidak hanya sekadar rencana keuangan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, perencanaan, dan pengendalian yang penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi,

termasuk organisasi sektor publik atau pemerintahan. Dalam konteks ini, anggaran dianggap sebagai alat manajemen yang esensial, yang bertujuan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan dan pengendalian tindakan. Dengan menyatakan anggaran dalam ukuran finansial, kita dapat mengevaluasi estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu. Oleh karena itu, temuan bahwa alokasi anggaran dinas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran memberikan penegasan pada peran penting anggaran sebagai instrumen manajemen yang tidak hanya menentukan alokasi sumber daya keuangan, tetapi juga memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, perencanaan, dan pengendalian.

3. Dukungan pemerintah pusat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran

Dukungan pemerintah pusat berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan Dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Meskipun dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dorongan dan sumber daya tambahan bagi dinas tersebut dalam pengelolaan anggaran, namun hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ini tidak berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitasnya. Oleh karena itu,

perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk memahami mengapa dukungan pemerintah pusat tidak berdampak secara signifikan dan untuk mengidentifikasi strategi alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di dinas tersebut.

Meskipun pemerintah pusat memberikan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran atau sumber daya lainnya, namun jumlah atau jenis dukungan tersebut mungkin tidak mencukupi atau sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Hal ini dapat terjadi karena adanya prioritas dan kebijakan nasional yang lebih luas yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat. Efektivitas pengelolaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan, juga sangat dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah daerah atau lokal. Kebijakan dan program yang lebih mendekati realitas lapangan dan kebutuhan lokal sering kali lebih berpengaruh daripada dukungan yang bersifat umum dari pemerintah pusat. Dukungan pemerintah pusat yang sering diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan adalah belanja hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat khususnya kepada kelompok-kelompok tani dan juga berupa pengembangan kompetensi kepada pegawai dinas ketahanan pangan berupa pelatihan, dan bimtek.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang diuraikan dalam kedua penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Putri and Nurlaila (2023) dan Syahni and Rizki (2023), yaitu bahwa dukungan pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas

pengelolaan anggaran di tingkat lokal. Meskipun dukungan pemerintah pusat tercermin dalam arahan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik pengelolaan anggaran yang efektif, namun pengaruh langsungnya terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat lokal ternyata tidak signifikan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini sejalan dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Namun, perlu dicatat bahwa ada perbedaan konteks antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya fokus pada sektor kesehatan (BPJS Kesehatan) dan lembaga pendidikan (Pusbindiklat LIPI), sedangkan penelitian ini berfokus pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perbedaan ini dapat mempengaruhi generalisasi temuan penelitian, karena kondisi dan dinamika dalam pengelolaan anggaran bisa berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, walaupun temuan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam konteks spesifik dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam.

Berdasarkan kondisi awal yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap dinas ketahanan pangan mencakup berbagai aspek untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan efektif, termasuk alokasi anggaran, peningkatan anggaran, dan fleksibilitas anggaran, keterkaitan tersebut dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah pusat tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dapat dipahami sebagai akibat dari kompleksitas hubungan antara alokasi anggaran, peningkatan anggaran, dan fleksibilitas anggaran dengan efektivitas pengelolaan anggaran di dinas ketahanan pangan. Meskipun pemerintah pusat memberikan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai dan fleksibilitas dalam penggunaannya, faktor-faktor lain seperti implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, dan kapasitas manajerial di tingkat dinas juga dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal menjadi krusial dalam mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

4. Alokasi anggaran dinas berpengaruh terhadap realisasi program dan kegiatan

Alokasi anggaran dinas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan Pernyataan ini mengindikasikan adanya masalah dalam alokasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Efek negatif dan tidak signifikan terhadap realisasi program menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak efektif digunakan untuk mendukung pelaksanaan semua program-program tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam implementasi program-program yang direncanakan, serta potensial

mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja keseluruhan dari Dinas Ketahanan Pangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap proses alokasi anggaran dan strategi penggunaannya guna memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat mendukung dengan efektif pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Terkadang, alokasi anggaran yang kurang efektif disebabkan oleh kurangnya penekanan pada prioritas yang benar-benar penting dan strategis. Alokasi anggaran terbagi secara tidak proporsional antara program-program yang berbeda atau tidak sesuai dengan urgensi dan kebutuhan riil di lapangan, maka realisasi program akan terhambat dan Keterbatasan dalam kapasitas internal, seperti keterampilan pegawai, sistem informasi keuangan yang terbatas, atau kurangnya pengalaman dalam manajemen keuangan, sehingga menyebabkan pengaruh negatif terhadap realisasi program.

Pengelolaan anggaran dalam organisasi sektor publik menekankan pentingnya tahap penyusunan anggaran sebagai langkah krusial dalam merencanakan biaya dan memastikan sumber daya yang memadai untuk mendukung rencana organisasi. Kegagalan dalam mengarahkan anggaran secara efektif dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan program-program yang telah dirumuskan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Perumusan anggaran yang terpisah dari proses

perencanaan strategis dan penerapan praktisnya dapat menyebabkan ketidakselarasan antara alokasi anggaran dan realisasi program, yang pada gilirannya menghambat pencapaian keseluruhan tujuan organisasi. Dalam konteks ini, temuan bahwa alokasi anggaran dinas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap realisasi program menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan anggaran dengan tujuan strategis organisasi untuk mencapai efektivitas pengelolaan anggaran yang diinginkan. Oleh karena itu, manajemen anggaran yang terintegrasi dengan perumusan strategi organisasi menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan antara alokasi anggaran dan pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan yang disampaikan oleh Basri (2013).

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif dalam Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah ditetapkan mampu mencakup semua kebutuhan program yang dijalankan dan mampu direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam hal ini, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran dinas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap realisasi program mengindikasikan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk menetapkan anggaran yang memadai, alokasi anggaran yang tidak optimal dapat menghambat realisasi program dengan efektif. Oleh karena itu, manajemen

keuangan yang teliti dan alokasi anggaran yang tepat sangatlah penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dapat dikelola secara efisien dan efektif guna mendukung pencapaian tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Integrasi Penggunaan Teknologi berpengaruh terhadap realisasi program dan kegiatan

Integrasi Penggunaan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa Integrasi Penggunaan Teknologi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, dinas dapat mempercepat proses pengumpulan dan analisis data, pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta komunikasi dan koordinasi antarstakeholder. Sehingga, dapat diharapkan bahwa kinerja dan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan akan meningkat secara keseluruhan.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kabupaten yang berfokus pada sektor pertanian dan ketahanan pangan tentu memiliki tantangan dan potensi yang unik. Integrasi penggunaan teknologi

dalam dinas tersebut dapat membantu mengatasi tantangan seperti pemantauan pertanian, distribusi hasil pertanian, manajemen pasokan, dan pemantauan kondisi cuaca yang dapat berdampak pada produksi pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan digital kepada masyarakat, seperti informasi pertanian, pendaftaran program bantuan, atau konsultasi teknis secara online. Juga dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi yang ada di Dinas Ketahanan Pangan itu sendiri sudah menggunakan sistem elektronik atau perangkat lunak seperti dalam penilaian kinerja pegawai (E-Kinerja), pendistribusian surat masuk dan surat keluar (E-Office) dan juga dalam hal penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dinas dan juga meningkatkan kemampuan serta keterampilan pegawai.

Sejalan dengan pernyataan Wahyuni (2020), Integrasi Penggunaan Teknologi informasi menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan dalam suatu lembaga atau organisasi. Hal ini terkait dengan pengaruh positif yang diberikan oleh teknologi informasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pegawai di semua bidang. Pentingnya sarana komputer yang disediakan oleh

lembaga atau organisasi juga memengaruhi implementasi teknologi informasi di dalam lembaga tersebut. Semakin lengkap fasilitas yang tersedia, semakin mudah bagi pegawai untuk mengakses data yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa Integrasi Penggunaan Teknologi memiliki peran yang penting dalam mendukung realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam suatu organisasi

Integrasi Penggunaan Teknologi dapat membawa dampak yang signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan dalam berbagai sektor. Melalui pemanfaatan berbagai perangkat lunak, sistem informasi, dan platform digital, pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif. Teknologi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merencanakan, mengorganisir, dan melacak kemajuan program secara lebih terstruktur dan terukur. Akses yang lebih mudah terhadap informasi memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Selain itu, teknologi memungkinkan adanya pemantauan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program, sehingga masalah atau hambatan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat. Dengan analisis data yang lebih canggih, para pemangku kepentingan juga dapat mengevaluasi kinerja program secara lebih mendalam, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Dengan

demikian, Integrasi Penggunaan Teknologi dalam proses pengelolaan program dan kegiatan secara keseluruhan memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

6. Dukungan pemerintah pusat berpengaruh terhadap realisasi program

Dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan Dukungan pemerintah pusat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan, alokasi anggaran, bantuan teknis, atau sumber daya lainnya telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas tersebut. Dukungan ini dapat membantu memperkuat kapasitas dan kesiapan institusi dalam mencapai tujuan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan efektif.

Dukungan pemerintah pusat memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Seperti yang diungkapkan oleh Zaelani (2019), bentuk dukungan pemerintah pusat dapat meliputi transfer keuangan,

pemberian hibah dan bantuan, kebijakan fiskal dan pajak, pengembangan kapasitas, koordinasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta bantuan darurat dan penanggulangan bencana. Melalui transfer keuangan dan pemberian hibah, dinas tersebut dapat memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan program-programnya dengan lebih efektif. Pengembangan kapasitas yang diberikan oleh pemerintah pusat juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai di dinas tersebut, sehingga mereka dapat mengelola program-program dengan lebih profesional. Koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga memastikan kesesuaian dan konsistensi dalam pelaksanaan program-program tersebut. Dukungan pemerintah pusat memiliki peran yang penting dalam mendukung realisasi program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan lokal masyarakat.

7. Realisasi program dan kegiatan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran

Realisasi program dan kegiatan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan Realisasi program dan kegiatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini

menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dengan baik serta dijalankan secara efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dan hasil dari pengelolaan anggaran di dinas tersebut. Oleh karena itu, penting bagi dinas tersebut untuk terus memprioritaskan perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Program dan kegiatan yang direncanakan dengan baik oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Ketika tujuan berhasil direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, maka efektivitas pengelolaan anggaran juga meningkat karena dana yang dialokasikan dapat terarah dengan baik menuju pencapaian tujuan tersebut. Realisasi program dan kegiatan yang efektif memungkinkan dinas untuk melakukan pengendalian pengeluaran yang lebih baik. Dengan mengikuti rencana yang telah disusun, penggunaan anggaran dapat dipantau secara lebih terperinci, evaluasi kinerja dapat dilakukan secara rutin, dan perubahan strategis dapat diimplementasikan jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi.

Melalui realisasi program dan kegiatan, dinas dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan produksi pangan, pemberdayaan petani, peningkatan kualitas pangan, atau edukasi terkait ketahanan

pangan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dari penerima manfaat, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan anggaran. Realisasi program dan kegiatan yang efektif juga berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja, peralatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sumber daya ini secara efisien sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dinas dapat mencapai hasil yang maksimal dengan anggaran yang dimiliki.

Keterkaitan antara temuan penelitian yang diuraikan dengan hasil penelitian sebelumnya sejalan. Analisis yang dilakukan oleh Sudiarsa (2013), Garcia (2017), dan Wang (2019) menunjukkan bahwa realisasi program yang baik dapat berkontribusi positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Sudiarsa (2013) menemukan bahwa realisasi program Bappeda Kabupaten Buleleng yang efisien dan ekonomis memberikan sumbangan yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Temuan ini sejalan dengan konsep bahwa efisiensi dan efektivitas program menjadi parameter penting dalam pengukuran efektivitas pengelolaan anggaran. Analisis kuantitatif yang disajikan oleh Garcia (2017) juga menguatkan konsep tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih terukur tentang bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran berkaitan dengan kinerja aktual program-program di sektor publik. Studi komparatif yang dilakukan oleh Wang (2019) menekankan hubungan antara kinerja program dan

alokasi anggaran di lembaga pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja program dapat mempengaruhi alokasi anggaran, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, temuan Wang juga sejalan dengan konsep bahwa realisasi program yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan pernyataan Renaldi (2021) yang menyatakan bahwa realisasi program dan kegiatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, hal ini dapat dikaitkan dengan pentingnya Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, termasuk alokasi dan penggunaannya. Realisasi Anggaran mencerminkan pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara realisasi program dan kegiatan dengan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi relevan dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah, karena mencerminkan tingkat ketercapaian tujuan dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Keberhasilan dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan secara efisien dan efektif langsung berdampak

pada tingkat keberhasilan pengelolaan anggaran suatu entitas. Jika program-program dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, ini mencerminkan penggunaan dana yang optimal dan tepat sasaran. Di sisi lain, efektivitas pengelolaan anggaran memberikan dasar yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut. Siklus umpan balik positif tercipta melalui keberhasilan realisasi program, yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Evaluasi hasil realisasi program menjadi kunci untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa alokasi dana diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata dan memberi kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau tujuan organisasi secara keseluruhan.

8. Alokasi anggaran dinas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan

Alokasi anggaran dinas berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan Alokasi anggaran dinas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan mencakup berbagai program dan kegiatan, namun pengelolaan anggaran yang efektif tidak secara langsung berkontribusi pada keberhasilan realisasi program dan

kegiatan tersebut. Faktor-faktor lain, seperti perencanaan yang kurang matang, kurangnya koordinasi antar unit kerja, atau kendala-kendala dalam pelaksanaan, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pencapaian hasil program dan kegiatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi program dan kegiatan secara lebih menyeluruh.

Alokasi anggaran dinas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan dapat dijelaskan dengan beberapa alasan.

- a. Alokasi anggaran tidak selalu mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran. Meskipun anggaran yang cukup diperlukan untuk mendukung program dan kegiatan, faktor lain seperti manajemen anggaran yang baik, pemantauan yang tepat, dan evaluasi yang teratur juga berperan penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan anggaran. Dalam beberapa kasus, meskipun alokasi anggaran besar, kurangnya pengelolaan yang efektif dapat menghambat realisasi program dan kegiatan dengan baik.
- b. Efektivitas pengelolaan anggaran lebih dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan. Meskipun alokasi anggaran penting untuk memulai program dan kegiatan, namun tanpa manajemen yang efektif dalam

setiap tahap proses, anggaran tersebut belum sepenuhnya digunakan dengan optimal.

- c. Realisasi program dan kegiatan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, dinamika sosial, dan kondisi lingkungan. Alokasi anggaran yang tersedia, tidak cukup untuk mengatasi tantangan-tantangan ini jika pengelolaan anggaran tidak efektif dalam menanggapinya.

Meskipun anggaran yang dialokasikan penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, faktor lain seperti manajemen anggaran, kebijakan pengelolaan, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga memainkan peran yang sama pentingnya. Dengan demikian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memperhatikan aspek-aspek lain selain alokasi anggaran, seperti peningkatan manajemen dan pengawasan anggaran, untuk meningkatkan efektivitas dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

9. Integrasi Penggunaan Teknologi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan

Integrasi Penggunaan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan Integrasi Penggunaan Teknologi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas

pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pengelolaan anggaran oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan kontribusi yang penting dalam mencapai pencapaian program-program yang telah direncanakan. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, proses pengelolaan anggaran dapat menjadi lebih efisien dan transparan, memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan teknologi yang sesuai dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan hasil dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tugas yang kompleks dalam mengelola anggaran. Mulai dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur pertanian, pemberdayaan petani, hingga program-program pendukung ketahanan pangan lainnya. Integrasi teknologi dapat membantu mengelola dan memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif, terutama dalam hal penyaluran dan penggunaan dana yang tepat sasaran. Teknologi memungkinkan dinas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara lebih komprehensif. Data-data ini dapat

digunakan untuk evaluasi kinerja program dan kegiatan, identifikasi tren, serta perencanaan anggaran yang lebih akurat dan berbasis bukti. Dengan demikian, pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran yang dilakukan berdasarkan informasi yang lebih terperinci dan akurat.

Integrasi Penggunaan Teknologi telah membawa dampak positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan menerapkan teknologi dalam proses pengelolaan anggaran, dinas tersebut dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Teknologi memungkinkan dinas untuk melakukan pemantauan dan pelaporan secara real-time, memfasilitasi analisis data yang lebih cepat dan mendalam, serta mengoptimalkan proses perencanaan dan pengalokasian anggaran. Sebagai hasilnya, Integrasi Penggunaan Teknologi dapat membantu dinas mencapai tujuan-tujuan pengelolaan anggaran dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keterkaitan antara Integrasi Penggunaan Teknologi dan efektivitas pengelolaan anggaran sangat erat. Integrasi Penggunaan Teknologi memungkinkan dinas untuk merealisasikan program dan kegiatan dengan lebih baik melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan terarah. Dengan memanfaatkan teknologi, dinas dapat mengoptimalkan alokasi anggaran, mengawasi pelaksanaan program secara lebih efektif, serta

mengevaluasi hasil dengan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, Integrasi Penggunaan Teknologi tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran secara umum, tetapi juga secara khusus berkontribusi pada realisasi program dan kegiatan yang lebih sukses di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

10. Dukungan Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan

Dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Hal ini menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam dalam hal alokasi dan pengelolaan anggaran. Dukungan ini tidak hanya membantu dalam pelaksanaan program-program yang direncanakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting dalam mencapai tujuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program-program di bidang ketahanan pangan.

Dukungan pemerintah pusat memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Seperti yang diungkapkan oleh Zaelani (2019), bentuk dukungan pemerintah pusat dapat meliputi transfer keuangan, pemberian hibah dan bantuan, kebijakan fiskal dan pajak,

pengembangan kapasitas, koordinasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta bantuan darurat dan penanggulangan bencana. Melalui transfer keuangan dan pemberian hibah, dinas tersebut dapat memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan program-programnya dengan lebih efektif. Pengembangan kapasitas yang diberikan oleh pemerintah pusat juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai di dinas tersebut, sehingga mereka dapat mengelola program-program dengan lebih profesional. Koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga memastikan kesesuaian dan konsistensi dalam pelaksanaan program-program tersebut. Dengan demikian, dukungan pemerintah pusat memiliki peran yang penting dalam mendukung realisasi program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan lokal masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Ini menegaskan bahwa pentingnya pengalokasian dana yang tepat dan efisien dalam mendukung kegiatan dan program dinas tersebut. Dengan demikian, manajemen yang cermat dan terencana dengan baik dalam pengalokasian anggaran menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Integrasi penggunaan teknologi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Meskipun teknologi telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan anggaran, namun dalam konteks spesifik ini, dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan anggaran belum begitu terasa secara signifikan. Kemungkinan penyebabnya dapat meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada, ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal, serta kendala dalam integrasi sistem teknologi

yang ada dengan baik dalam proses pengelolaan anggaran. Selain itu, aspek-aspek manusia seperti keterampilan, pengetahuan, dan budaya organisasi juga turut memainkan peran dalam menentukan sejauh mana teknologi dapat memberikan kontribusi efektif dalam pengelolaan anggaran.

3. Dukungan pemerintah pusat berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan Dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Meskipun dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dorongan dan sumber daya tambahan bagi dinas tersebut dalam pengelolaan anggaran, namun hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ini tidak berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitasnya.
4. Alokasi anggaran dinas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan Pernyataan ini mengindikasikan adanya masalah dalam alokasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam. Efek negatif dan tidak signifikan terhadap realisasi program menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak efektif digunakan untuk mendukung pelaksanaan semua program-program tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam implementasi program-

program yang direncanakan, serta potensial mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja keseluruhan dari Dinas Ketahanan Pangan.

5. Integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, dinas dapat mempercepat proses pengumpulan dan analisis data, pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta komunikasi dan koordinasi antarstakeholder.
6. Dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan, alokasi anggaran, bantuan teknis, atau sumber daya lainnya telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. Dukungan ini dapat membantu memperkuat kapasitas dan kesiapan institusi dalam mencapai tujuan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan efektif.
7. Realisasi program dan kegiatan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan Realisasi program dan kegiatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dengan baik serta dijalankan secara efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dan hasil dari pengelolaan anggaran di dinas tersebut..

8. Alokasi anggaran dinas berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan mencakup berbagai program dan kegiatan, namun pengelolaan anggaran yang efektif tidak secara langsung berkontribusi pada keberhasilan realisasi program dan kegiatan tersebut. Faktor-faktor lain, seperti perencanaan yang kurang matang, kurangnya koordinasi antarunit kerja, atau kendala-kendala dalam pelaksanaan, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pencapaian hasil program dan kegiatan.
9. Integrasi penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pengelolaan anggaran oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan kontribusi yang penting dalam mencapai pencapaian program-program yang telah direncanakan. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, proses pengelolaan anggaran dapat menjadi lebih efisien dan transparan, memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

10. Dukungan pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran melalui realisasi program dan kegiatan. Hal ini menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal alokasi dan pengelolaan anggaran. Dukungan ini tidak hanya membantu dalam pelaksanaan program-program yang direncanakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran secara keseluruhan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Diharapkan melakukan evaluasi mendalam terhadap proses manajemen alokasi anggaran untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Fokuskan pada pengembangan strategi yang lebih cermat dan terencana dalam pengalokasian dana untuk mendukung program-program dan kegiatan yang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Diharapkan melakukan peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi dengan memperbaiki infrastruktur teknologi yang ada, memberikan pelatihan kepada staf tentang penggunaan yang optimal, dan mendorong adopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dinas.

Selain itu, perlu ditekankan pentingnya koordinasi antara unit kerja dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

3. Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan studi mendalam tentang dampak dukungan pemerintah pusat terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat lokal, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengaruh dukungan tersebut. Selain itu, penelitian tentang strategi yang konkret untuk mengoptimalkan integrasi penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran dan mendukung kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Neli. 2019. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau." *Akuntansi dan Manajemen* 14(2): 109–18.
- Amelia, I. 2019. "Integrasi penggunaan teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Sekolah Menengah Atas." *Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini ...* (2012): 121–25. <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip2/article/view/367/0>.
- Amelinda, Alda et al. 2022. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 8(2): 271–83. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/index>.
- Aqnul Muhamad Akbar, Burhanuddin, and Guasmin. 2020. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah." *Jurnal Kolaboratif Sains* 3(8): 438–47.
- Arifin, M B, and M Pandowo. 2020. "Peran Lingkungan Kerja, Kemampuan Kerja, Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Buana Finance Tbk. Cabang Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8(4): 31–40.
- Basri, Ramlah. 2013. "Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran." *Jurnal EMBA* 1(13 ISSN 2303-1174): 202–12.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri, Sholihatul. 2019. "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik." *OECOMICUS Journal of Economics* 4(1): 57–69.
- Harefa, Noni Benia, Serniati Zebua, and Arozatulo Bawamenewi. 2022. "Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)." *Warta Dharmawangsa* 16(4): 1002–9.
- Hastipa. S. 2021. 3 "Analisis Anggaran Dan Realisasi Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang." Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13305-Full_Text.pdf.
- Johnson, B. (2019). Implementasi Teknologi Cloud Computing dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah. *Public Administration and Technology*, 31(2), 201-218.
- Garcia, R. (2017). Assessing Program Realization in Public Sector Budgets: A Quantitative Analysis. *Public Finance Review*, 45(2), 145-162.
- Indrayani, Henni. 2017. "Penerapan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Efektivitas, Efisiensi Dan Produktivitas Perusahaan" *Jurnal El-Riyasah* 3(1): 48–56.
- Juani, Rohman. 2022. *Integrasi penggunaan teknologi Informasi Di Bidang Penilaian*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

- Magno, Ruivo Barros, Abdul Hakim, and Tjahjanulin Domai. 2015. "Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan." *Jurnal Untri* 5(2): 10.
- Mardiana. 2017. "Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 1(1): 35–42.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- . 2022. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Mahendra Adhi, Arief Zuliyanto Susilo, M. Andryzal Fajar, and Diana Rahmawati. 2017. "Exploratory Study of SMEs Technology Adoption Readiness Factors." *Procedia Computer Science* 124: 329–36. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.162>.
- Nur, Marina et al. 2021. "Analisis Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pada Sekertariat Dinas Pendidikan Prov . Jawa Barat." 19(2): 439–49.
- Nurafifah, Indah Putri. 2022. "Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)." 2(2).
- Prasetyo, Wahyu Heri, and Agustina Prativi Nugraheni. 2020. "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019." : 1–10.
- Putri, Yohana Ariska, and Nurlaila Nurlaila. 2023. "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Kota Kisaran." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6(2): 248–60.
- Renaldi. 2021. "Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi BPPSDMP." 2(1): 103–14.
- Robert, A., and Vijay Govindarajan. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Saparso, Saparso, Haryanto Haryanto, and Heppi Nur Djanati. 2018. "Pertumbuhan Dan Hasil Cabai Merah Pada Berbagai Metode Irigasi Dan Pemberian Pupuk Kandang Di Wilayah Pesisir Pantai." In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS, , A-247*.
- Smith, A. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Organisasi Nonprofit. *Journal of Financial Technology*, 22(4), 567-584.
- Siregar, Kodir. 2020. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11(1): 51–62.
- Sondakh, Stevani, Arie J. Rorong, And Joorie M. Ruru. 2023. "Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado." IX(2): 73–84.
- Sudiarsa, Kt. 2013. "Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng Melalui Pengukuran Value For Money." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 1(1): 1–10.

- Sukarta, I Wayan, I Dewa Nyoman Badera, and Ni Made Dwi Ratnadi. 2017. "Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Universitas Udayana." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11: 3917.
- Syahni, Nanda, and Muhammad Rizki. 2023. "Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Aspek Implementasi Pada Pusbindklat LIPI Tahun 2019." 5(1): 15–26.
- Syarifudin, Ni Ketut Surasni, and Biana Adha Inapty. 2016. "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Publik." *Jurnal Akuntansi Simposium Nasional Akuntansi*: 1–22.
- Tamasoleng, Adelstin. 2015. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang." *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 3(1): 97–110.
- Tampubolon, Hotner. 2016. *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Perannya Dalam Pengembangan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. <http://repository.uki.ac.id/302/1/Strategimanajemensumberdayamanusiadanperannyadalampengembangankeunggulanbersaing.pdf>.
- Tiara, Zenita Dwi, Didit Supriyadi, and Nelly Martini. 2023. "Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan." *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 8(1): 450.
- Verawati, Hasrini, Husaini Husaini, and Siti Aisyah. 2021. "Faktor Penentu Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu." *Jurnal Fairness* 6(1): 21–34.
- Wahyuni, T. 2020. "Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kemampuan Pengguna Sebagai Variabel Moderasi Pada PD. BPR Bank Jombang Kantor Pusat."
- Wicaksana, Adityas. 2011. "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Pertumbuhan Dan Nilai Pasar Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia." *Universitas Diponegoro Semarang*: 58.
- Wang, L. (2019). The Role of Program Performance in Budget Allocation: A Comparative Study of Government Agencies. *Journal of Government Accountability*, 52(4), 301-318.
- Wida Puspawardani. 2017. "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Artikel Ilmiah*: 1–2.
- Yulianto, Tri. 2012. "Pengaruh Teknologi Informasi Dan Strategi Resource-Based Terhadap Daya Saing Perusahaan." *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul* 53(9): 1689–99.
- Zaelani, Iwan Ridwan. 2019. "Peningkatan Daya Saing Umkm Indonesia:Tantangan dan Peluang Pengembangan Iptek Iwan." 3(1): 15–34.
- <https://www.easycalculation.com/other/sobel-test.php>

KUISIONER PENELITIAN

KepadaYth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Dengan Hormat,

Sebagai syarat penelitian tesis Program Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar, saya akan menyelenggarakan penelitian mengenai **“Analisis Komprehensif Alokasi Anggaran, Integrasi penggunaan teknologi, Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran melalui Realisasi Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur”**. Untuk keperluan tersebut, saya ingin meminta kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari sebagai responden dalam penelitian ini dan mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan sejujurnya.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk meluangkan waktu dalam mengisi lembar kuesioner penelitian tesis ini. Setiap jawaban yang diberikan akan menjadi bantuan yang sangat berharga bagi peneliti ini.

Hormat Saya

(NURUL HAERANI)

IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk Pengisian: Isilah nama Saudara dan berilah tanda (√) pada salah satu pilihan jawaban Saudara di pernyataan berikut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pernyataan:

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Netral
4. Tidak Setuju
5. Sangat Tidak Setuju

Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Saudara dalam pengisian identitas ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berharga.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan
3. Umur : (1) Kurang 40 Tahun
: (2) 40-50 Tahun
: (3) Lebih dari 50 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : Diploma
: S1
: S2
5. Pengalaman Kerja : Kurang 10 Tahun
: 20-30 Tahun
: Lebih dari 30

KUISIONER PENELITIAN

Tujuan Survey

Tujuan dari survey ini adalah untuk melakukan analisis yang komprehensif terkait optimalisasi pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Fokus utama penelitian ini melibatkan empat variabel utama, yaitu Alokasi Anggaran, Integrasi penggunaan teknologi, Dukungan Pemerintah Pusat, dan Dampaknya terhadap Realisasi Program dan Kegiatan, dengan pengelolaan anggaran yang efektif sebagai penghubung antara variabel tersebut.

1. **Alokasi Anggaran:** Penelitian bertujuan untuk menggali sejauh mana alokasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan telah optimal dan tepat sasaran. Hal ini mencakup ketepatan alokasi dana untuk program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan.

2. **Integrasi penggunaan teknologi:** Tujuan utama adalah untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta infrastruktur teknologi lainnya telah diintegrasikan dalam operasional Dinas Ketahanan Pangan. Faktor seperti intensitas pemanfaatan, frekuensi penggunaan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan menjadi fokus utama.
3. **Dukungan Pemerintah Pusat:** Survey ini bertujuan untuk menilai efektivitas dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Dinas Ketahanan Pangan. Aspek-aspek seperti bantuan hibah, pengembangan SDM, dan pembangunan kemitraan akan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana dukungan tersebut berkontribusi pada optimalisasi pelayanan publik.
4. **Dampaknya terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran:** Untuk menganalisis sejauh mana Dinas Ketahanan Pangan dapat mengelola anggaran dengan efektif. Aspek-aspek seperti akuntabilitas, keterbukaan dalam transaksi pemerintah, dan pemberdayaan manajer profesional menjadi fokus untuk memahami keefektifan pengelolaan anggaran.
5. **Realisasi Program dan Kegiatan:** Penelitian ini berusaha memahami dampak dari tiga variabel sebelumnya (alokasi anggaran, integrasi penggunaan teknologi, dan dukungan pemerintah pusat) terhadap realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ini mencakup evaluasi terhadap penggunaan sumber daya ekonomi, hasil yang dicapai, dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Dengan demikian, melalui survey ini diharapkan dapat ditemukan informasi dan wawasan yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan jawaban Saudara di kolom pertanyaan berikut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju
3. N : Netral
4. TS : Tidak Setuju
5. STS : Sangat Tidak Setuju

Berikut adalah kuesioner yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait variabel Anggaran Dinas (X1), Integrasi penggunaan teknologi (X2), Dukungan Pemerintah Pusat (X3), Efektivitas Pengelolaan Anggaran (Y), dan Realisasi Program dan Kegiatan (Z).

Responden diminta untuk memberikan jawaban dengan menggunakan skala likert 5 poin diatas,

Variabel X1: Anggaran Dinas

1. Ketepatan sasaran: anggaran yang dialokasikan oleh Kantor Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara telah tepat dalam menentukan sasaran program dan kegiatan
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
2. Ketepatan waktu: Kantor Dinas telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam anggaran
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
3. Tercapainya tujuan: tujuan yang ditetapkan dalam anggaran telah tercapai dengan baik oleh Kantor Dinas
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju

Variabel X2: Integrasi penggunaan teknologi

4. Intensitas Pemanfaatan: Anda memiliki minat atau intensitas pemanfaatan terhadap integrasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh Kantor Dinas
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
5. Frekuensi Pemanfaatan: Anda menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi dengan Kantor Dinas
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju

6. Jumlah Aplikasi atau Perangkat Lunak yang digunakan: banyak aplikasi atau perangkat lunak yang Anda gunakan untuk mendukung kegiatan dengan Kantor Dinas
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju

Variabel X3: Dukungan Pemerintah Pusat

7. Bantuan hibah yang diberikan: bantuan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung anggaran dan integrasi penggunaan teknologi oleh Kantor Dinas
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
8. Pengembangan SDM: dukungan Pemerintah Pusat telah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Kantor Dinas?
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
9. Membangun kemitraan: Pemerintah Pusat telah berhasil membangun kemitraan yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju

Variabel Y: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

7. Akuntabilitas: Kantor Dinas dapat mempertanggungjawabkan hasil atau kinerjanya berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan
 1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
8. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah: Kantor Dinas dalam setiap transaksi pemerintah yang melibatkan anggaran selalu terbuka

1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
9. Pemberdayaan manajer yang profesional: pimpinan Kantor Dinas dipandang sebagai profesional dan memiliki kewenangan yang memadai
1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju

Variabel Z: Realisasi Program dan Kegiatan

13. Penggunaan sumber daya ekonomi: Kantor Dinas telah mengelola dengan baik sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan
1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
14. Hasil yang dicapai: Kantor Dinas mencapai hasil dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran dengan baik
1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju
15. Solusi atas permasalahan yang dihadapi: Kantor Dinas berhasil memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
1. Sangat Setuju
 2. Setuju
 3. Netral
 4. Tidak Setuju
 5. Sangat Tidak Setuju

Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Anda dalam menjawab kuesioner ini. Jawaban Anda akan memberikan kontribusi yang berharga untuk penelitian ini.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN HASIL SPSS

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Anggaran Dinas	50.46	22.796	.397	.731
Integrasi Penggunaan Teknologi	50.31	19.893	.584	.668
Dukungan Pemerintah Pusat	51.21	18.006	.578	.665
Realisasi Program dan Kegiatan	50.78	18.860	.465	.715
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	50.48	19.969	.515	.691

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dukungan Pemerintah Pusat, Anggaran Dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.439 ^a	.193	.168	1.379

a. Predictors: (Constant), Dukungan Pemerintah Pusat, Anggaran Dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi

b. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

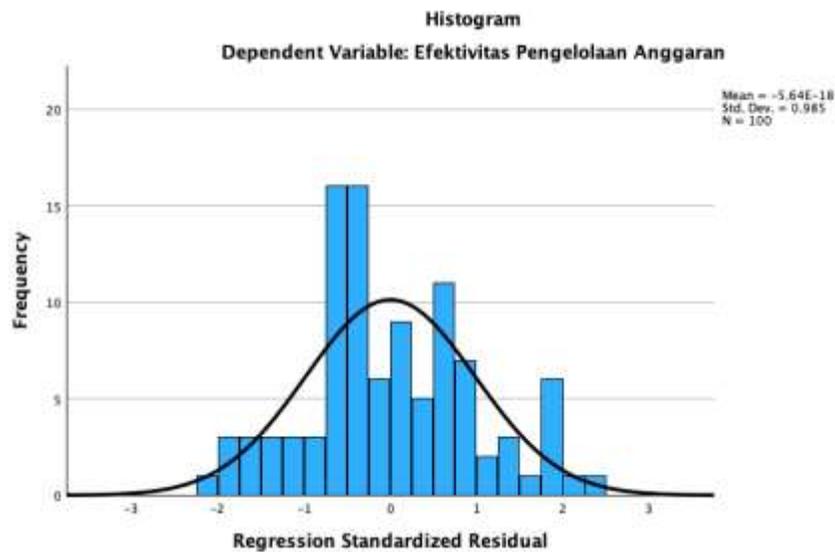
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.637	3	14.546	7.652	<.001 ^b
	Residual	182.473	96	1.901		
	Total	226.110	99			

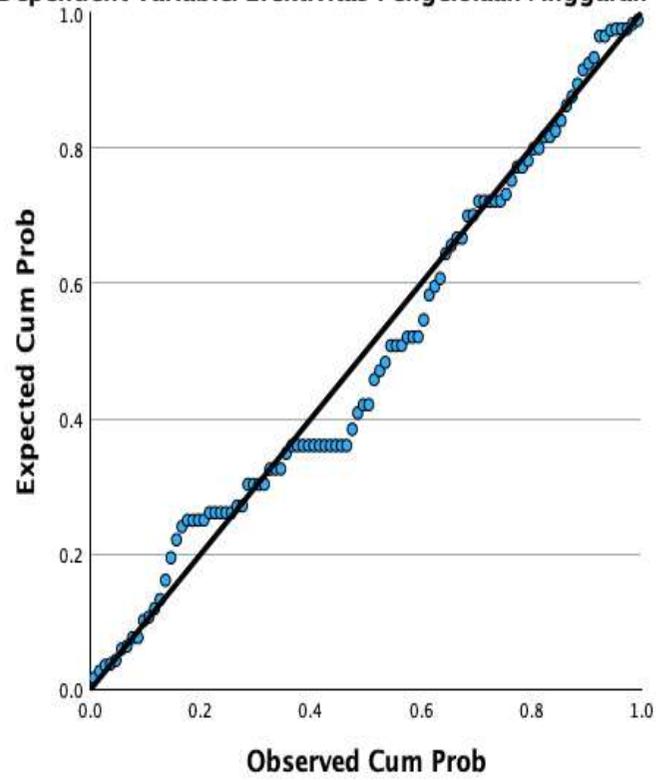
a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

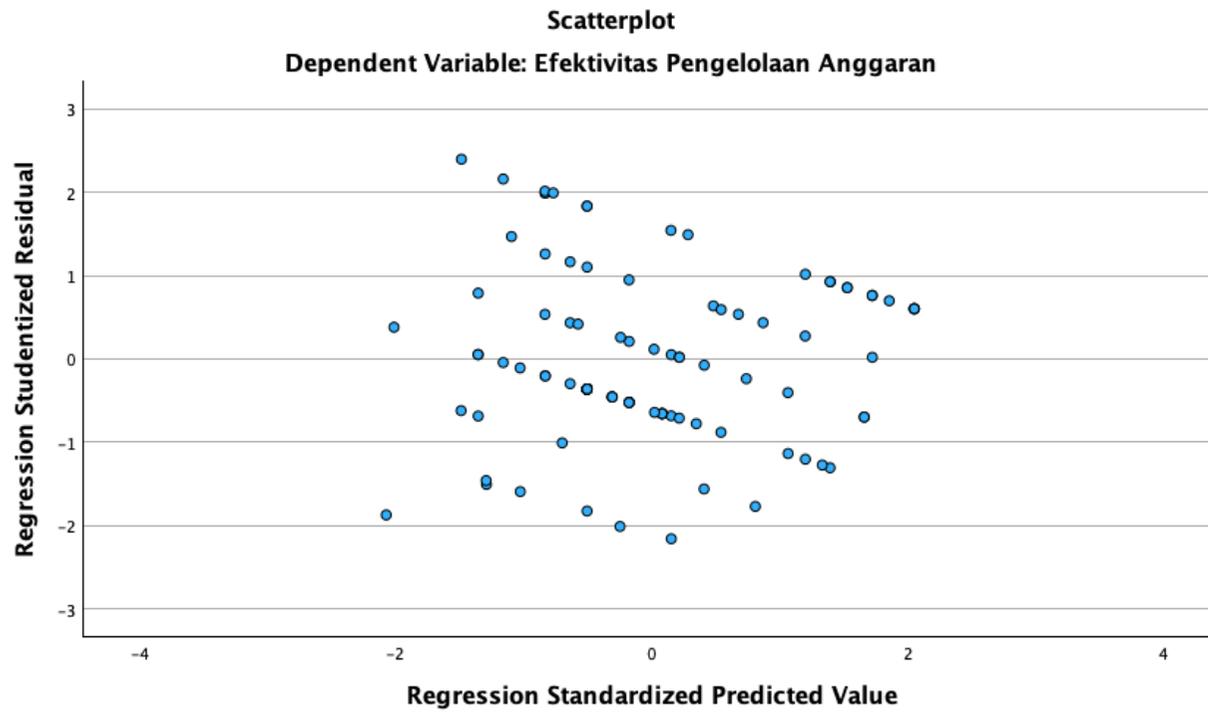
b. Predictors: (Constant), Dukungan Pemerintah Pusat, Anggaran Dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran





Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
-------	-------------------	-------------------	--------

1	Realisasi Program dan Kegiatan, Anggaran Dinas, Dukungan Pemerintah Pusat, Integrasi Penggunaan Teknologi ^b	.	Enter
---	--	---	-------

- a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran
- b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.314	.285	1.278

- a. Predictors: (Constant), Realisasi Program dan Kegiatan, Anggaran Dinas, Dukungan Pemerintah Pusat, Integrasi Penggunaan Teknologi
- b. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70.975	4	17.744	10.866	<.001 ^b
	Residual	155.135	95	1.633		
	Total	226.110	99			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Realisasi Program dan Kegiatan, Anggaran Dinas, Dukungan Pemerintah Pusat, Integrasi Penggunaan Teknologi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.534	1.604		2.204	.030
	Anggaran Dinas	.340	.120	.285	2.824	.006
	Integrasi Penggunaan Teknologi	-.080	.117	-.075	-.684	.496
	Dukungan Pemerintah Pusat	.126	.094	.142	1.342	.183
	Realisasi Program dan Kegiatan	.355	.087	.418	4.092	<.001

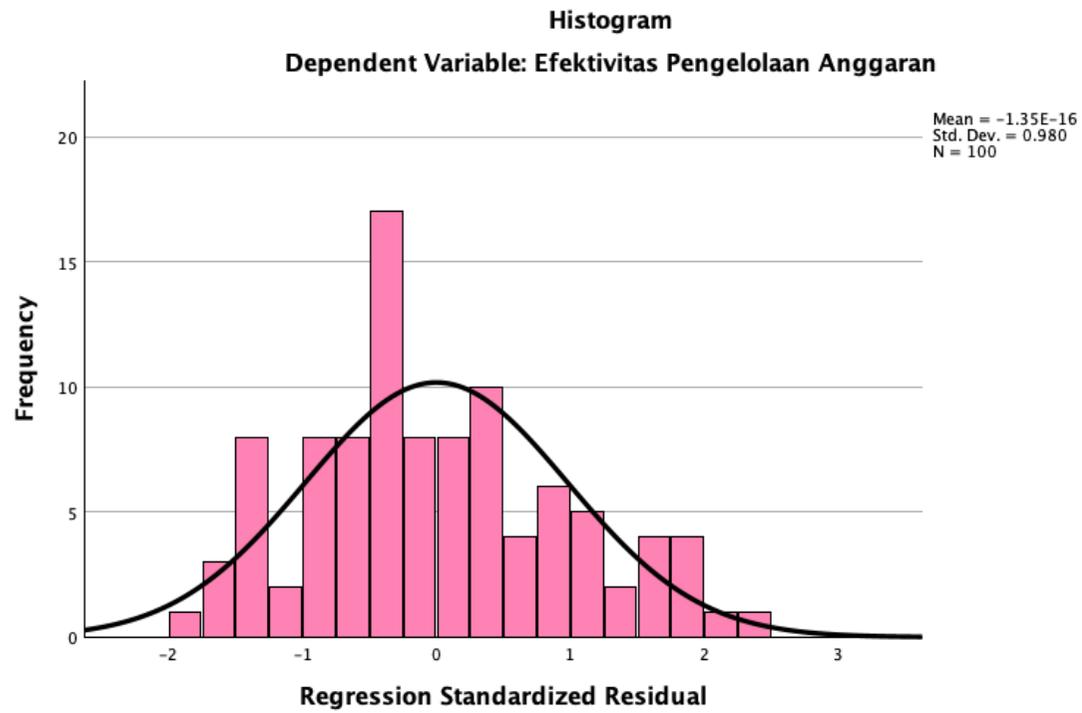
a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Residuals Statistics^a

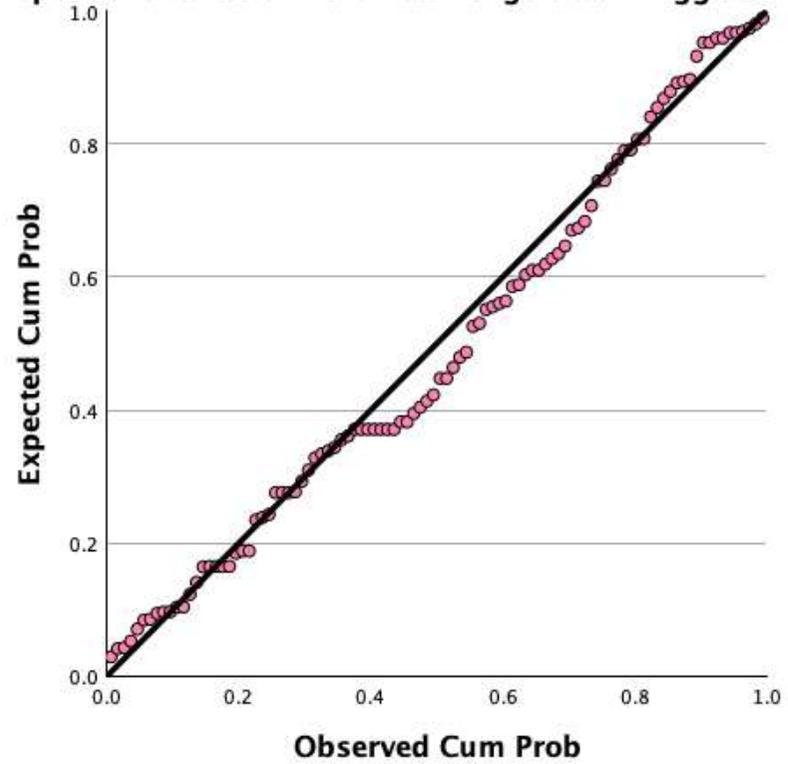
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	10.50	14.72	12.83	.847	100
Std. Predicted Value	-2.746	2.235	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.161	.500	.273	.083	100
Adjusted Predicted Value	10.34	14.70	12.83	.847	100
Residual	-2.421	2.919	.000	1.252	100
Std. Residual	-1.894	2.284	.000	.980	100
Stud. Residual	-1.913	2.331	.002	1.008	100
Deleted Residual	-2.469	3.040	.005	1.326	100
Stud. Deleted Residual	-1.941	2.388	.004	1.016	100
Mahal. Distance	.581	14.150	3.960	3.096	100
Cook's Distance	.000	.097	.012	.020	100
Centered Leverage Value	.006	.143	.040	.031	100

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran

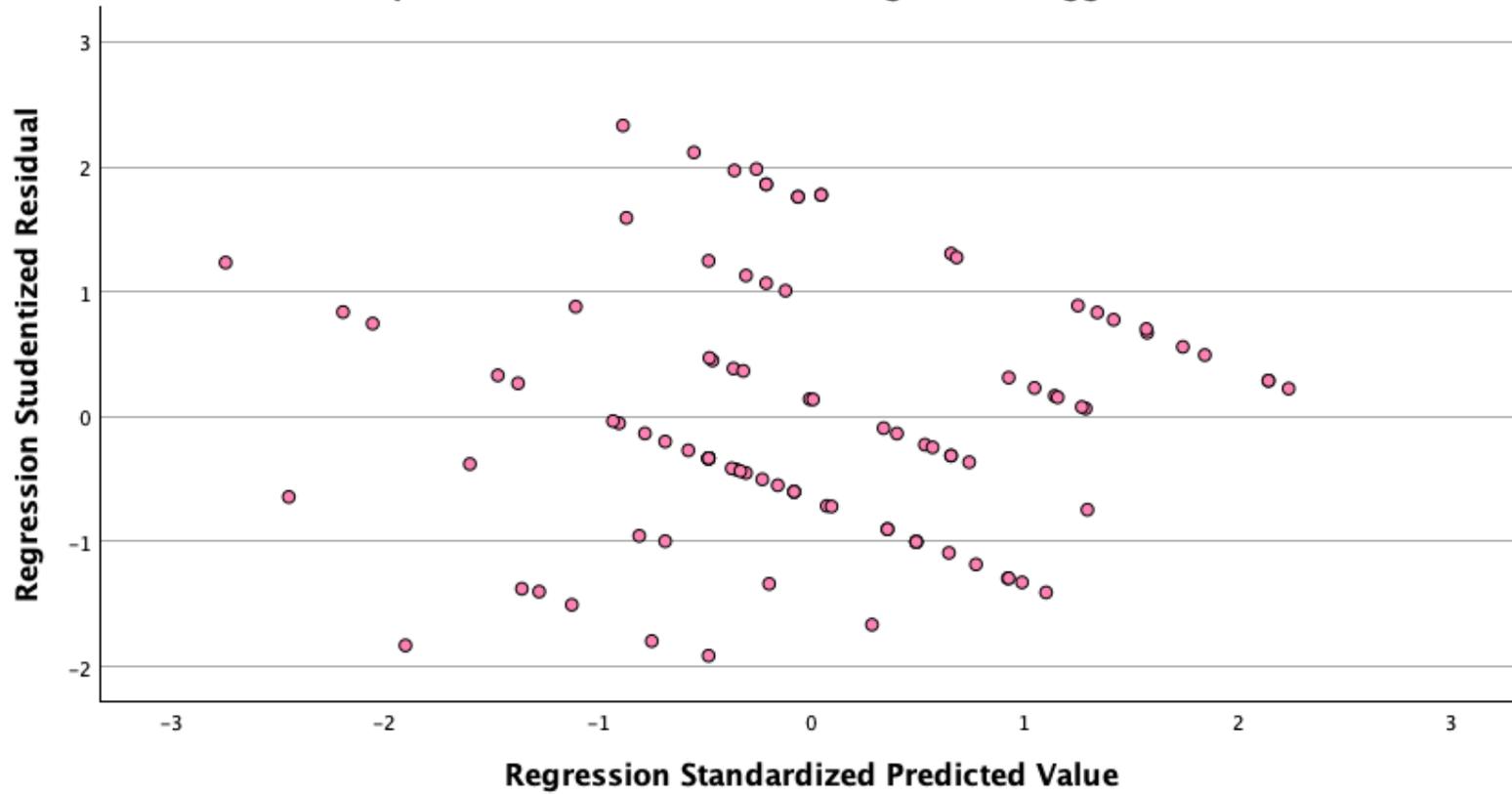
Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran



Scatterplot
Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Anggaran



Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dukungan Pemerintah Pusat, Anggaran Dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi ^b		Enter

a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.285	1.503

a. Predictors: (Constant), Dukungan Pemerintah Pusat, Anggaran Dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi

b. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.978	3	31.993	14.158	<.001 ^b
	Residual	216.932	96	2.260		
	Total	312.910	99			

a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

b. Predictors: (Constant), Dukungan Pemerintah Pusat, Anggaran Dinas, Integrasi Penggunaan Teknologi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.111	1.781		3.432	<.001
	Anggaran Dinas	-.341	.137	-.243	-2.490	.015
	Integrasi Penggunaan Teknologi	.592	.124	.468	4.765	<.001
	Dukungan Pemerintah Pusat	.257	.107	.245	2.393	.019

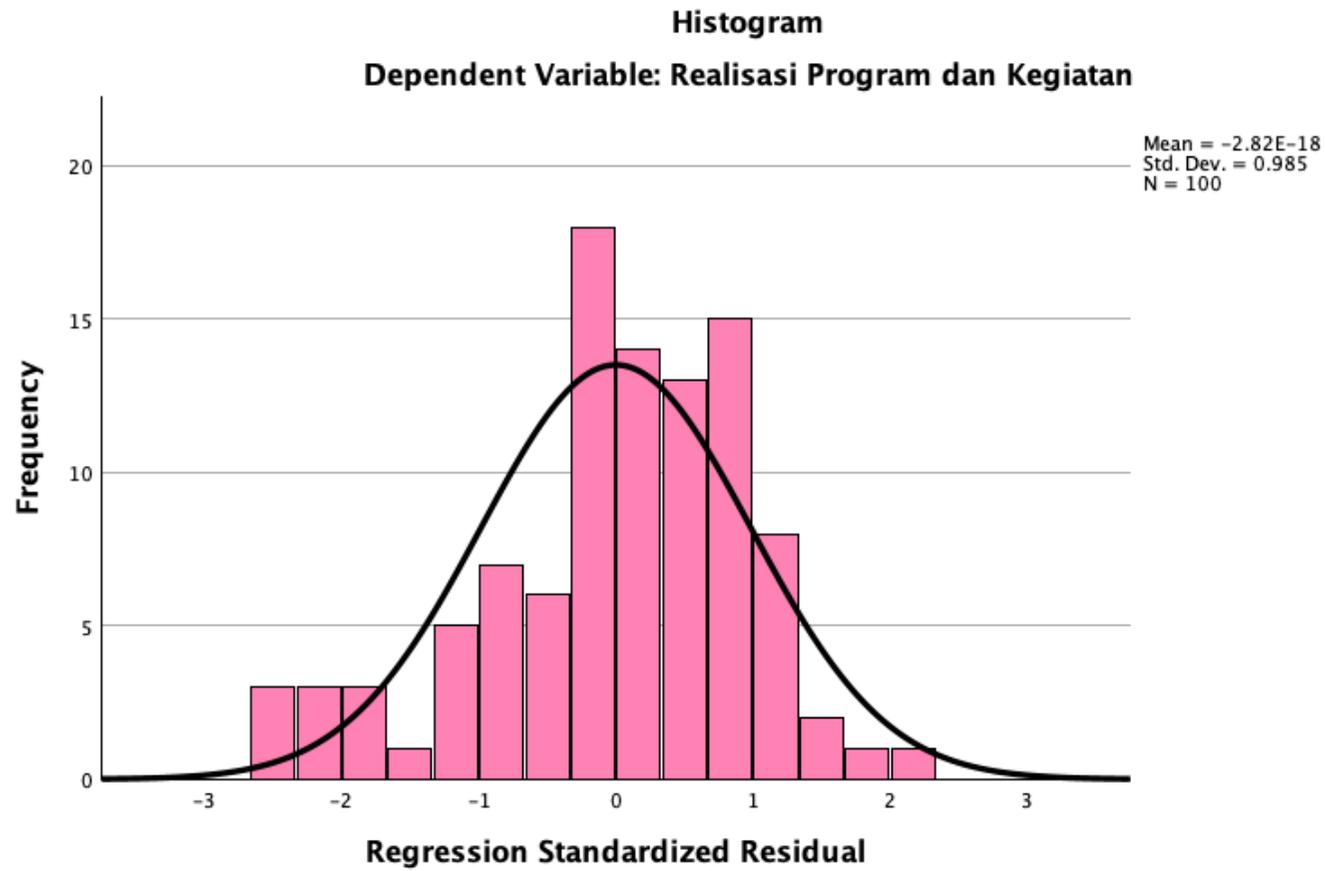
a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Residuals Statistics^a

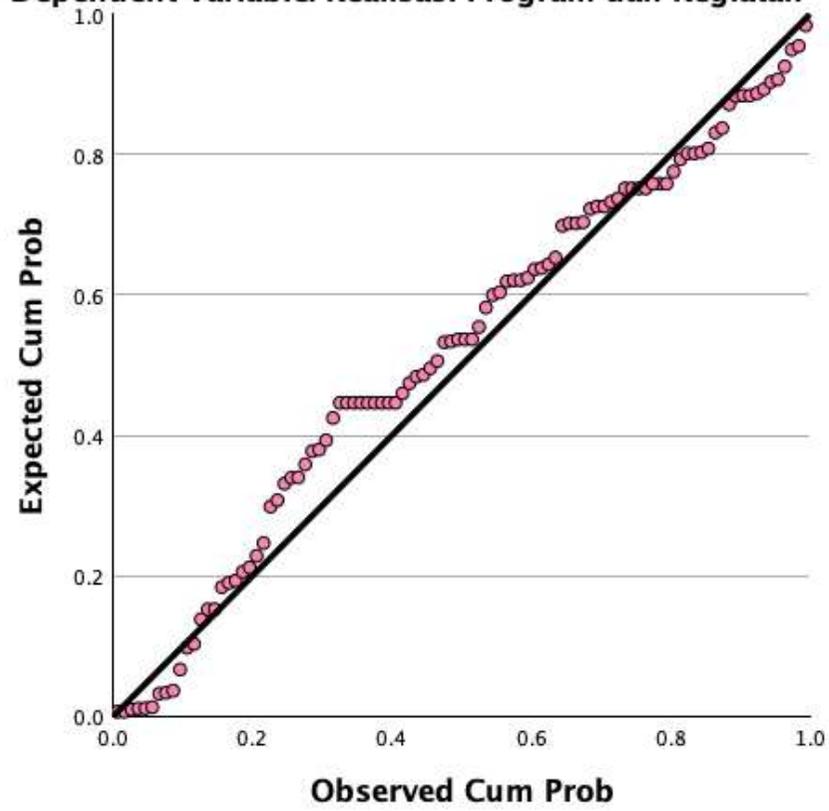
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9.66	14.75	12.53	.985	100
Std. Predicted Value	-2.919	2.254	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.188	.548	.289	.082	100
Adjusted Predicted Value	9.73	14.98	12.54	.988	100
Residual	-3.725	3.216	.000	1.480	100
Std. Residual	-2.478	2.139	.000	.985	100
Stud. Residual	-2.546	2.221	-.002	1.010	100
Deleted Residual	-3.933	3.465	-.007	1.558	100
Stud. Deleted Residual	-2.623	2.268	-.006	1.023	100
Mahal. Distance	.562	12.171	2.970	2.345	100
Cook's Distance	.000	.158	.013	.026	100
Centered Leverage Value	.006	.123	.030	.024	100

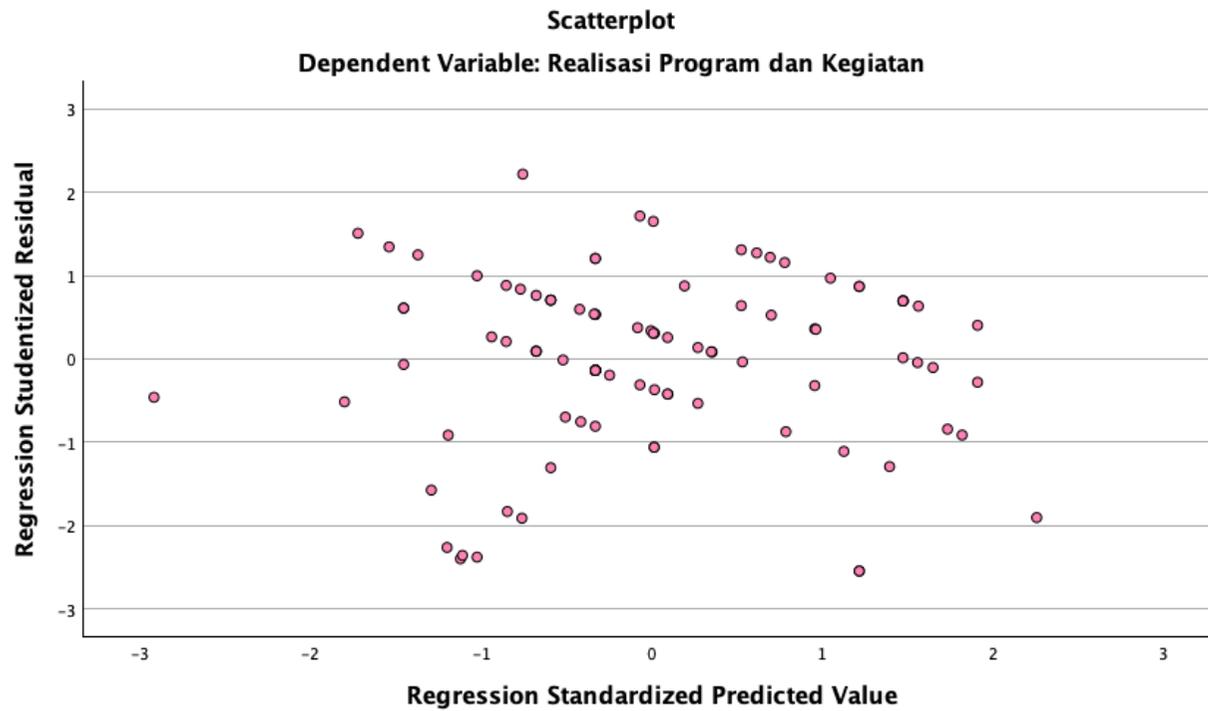
a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan





Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Anggaran Dinas	50.46	22.796	.397	.731
Penggunaan Teknologi	50.31	19.893	.584	.668
Dukungan Pemerintah Pusat	51.21	18.006	.578	.665

Realisasi Program dan Kegiatan	50.78	18.860	.465	.715
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	50.48	19.969	.515	.691

Frequencies

		Statistics				
		Anggaran Dinas	Integrasi Penggunaan Teknologi	Dukungan Pemerintah Pusat	Realisasi Program dan Kegiatan	Efektivitas Pengelolaan Anggaran
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Anggaran Dinas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	1.0	1.0	1.0
	4	72	72.0	72.0	73.0
	5	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Integrasi Penggunaan Teknologi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	1.0	1.0	1.0
	4	62	62.0	62.0	63.0
	5	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Dukungan Pemerintah Pusat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	17	17.0	17.0	17.0
	4	61	61.0	61.0	78.0
	5	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

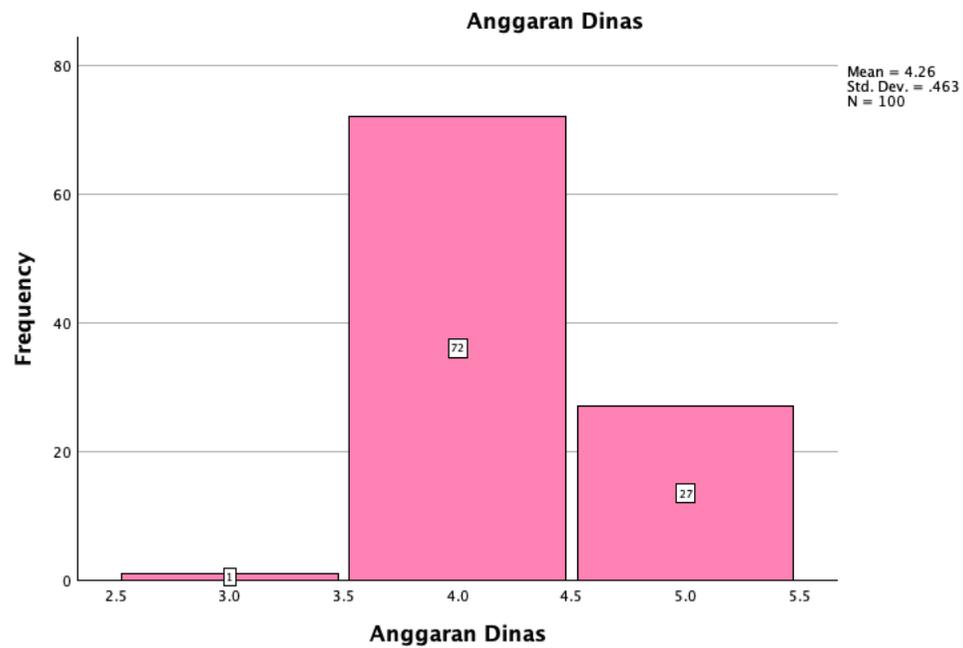
Realisasi Program dan Kegiatan

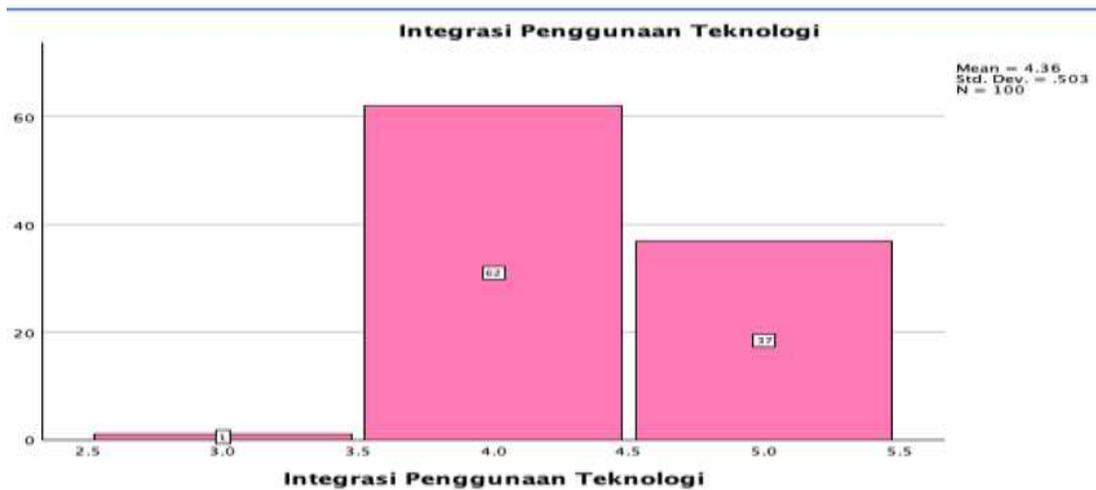
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	13	13.0	13.0	13.0
	4	60	60.0	60.0	73.0
	5	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Efektivitas Pengelolaan Anggaran

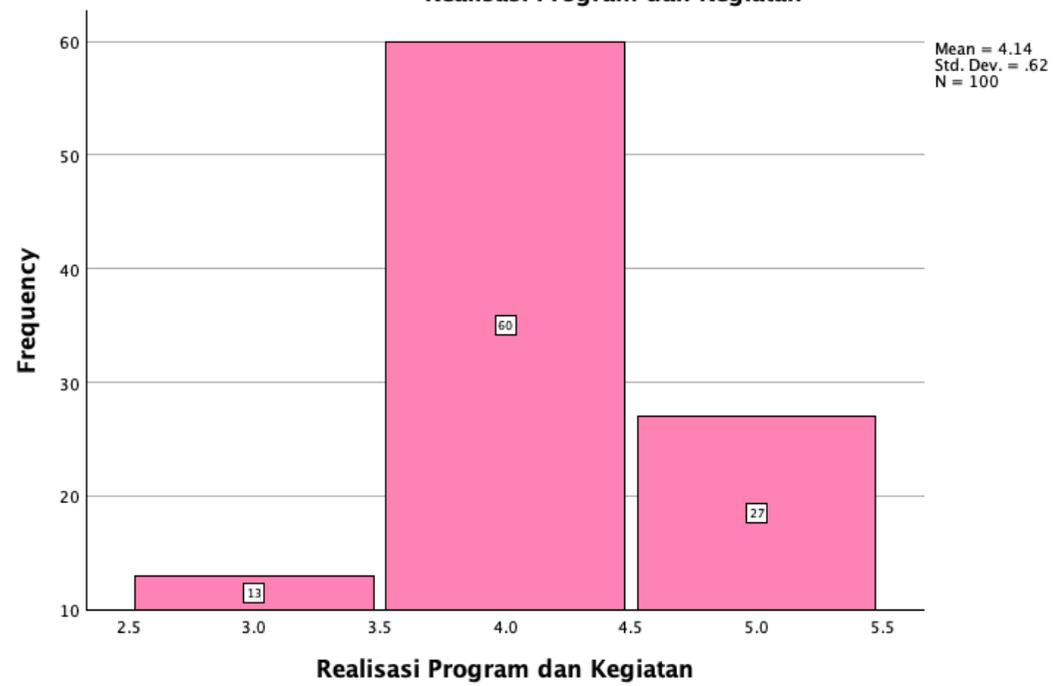
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	7.0	7.0
	4	60	60.0	67.0
	5	33	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

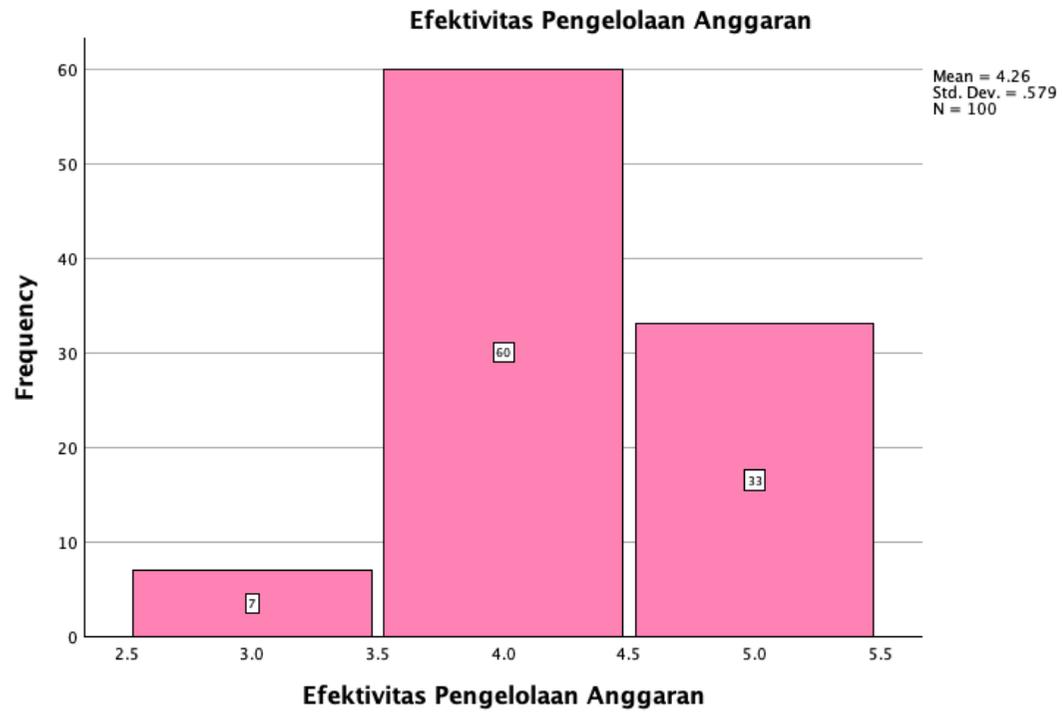
Histogram





Realisasi Program dan Kegiatan





Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran Dinas	100	3	5	4.26	.463
Integrasi Penggunaan Teknologi	100	3	5	4.36	.503

Dukungan Pemerintah Pusat	100	3	5	4.05	.626
Realisasi Program dan Kegiatan	100	3	5	4.14	.620
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	100	3	5	4.26	.579
Valid N (listwise)	100				

SHOW

System Settings

Keyword	Description	Setting
LOCALE	country and character set	en_US.ISO_8859-1:1987 (English)

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.160 ^a

a. Predictors: (Constant), Dukungan Pemerintah Pusat, Anggaran Dinas, Penggunaan Teknologi

b. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Anggaran Dinas	.758	1.320
	Penggunaan Teknologi	.747	1.338
	Dukungan Pemerintah Pusat	.687	1.457

a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Anggaran Dinas	37.63	14.862	.359	.691
Penggunaan Teknologi	37.48	11.949	.621	.541
Dukungan Pemerintah Pusat	38.38	10.743	.571	.558
Realisasi Program dan Kegiatan	37.95	12.008	.390	.693

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dukungan Pemerintah Pusat, Anggaran Dinas, Penggunaan Teknologi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.160 ^a

a. Predictors:

(Constant), Dukungan

Pemerintah Pusat,

Anggaran Dinas,

Penggunaan Teknologi

b. Dependent Variable:
 Realisasi Program dan
 Kegiatan

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Anggaran Dinas	.758	1.320
	Penggunaan Teknologi	.747	1.338
	Dukungan Pemerintah Pusat	.687	1.457

a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					Anggaran Dinas	Penggunaan Teknologi	Dukungan Pemerintah Pusat
1	1	3.978	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.010	19.486	.15	.04	.02	.89
	3	.007	24.359	.02	.34	.83	.02
	4	.004	30.058	.83	.62	.15	.09

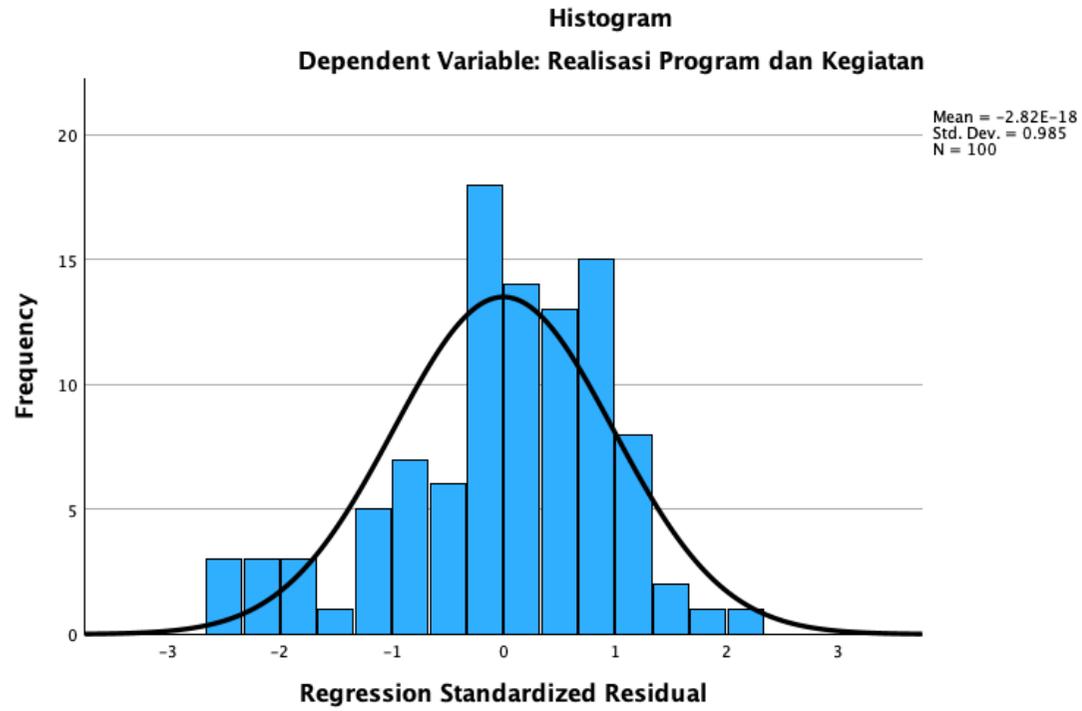
a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

Residuals Statistics^a

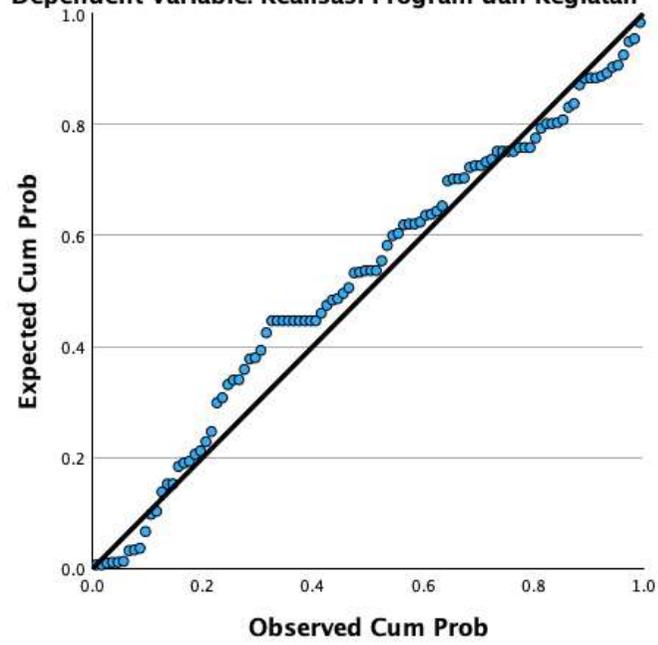
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9.66	14.75	12.53	.985	100
Std. Predicted Value	-2.919	2.254	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.188	.548	.289	.082	100
Adjusted Predicted Value	9.73	14.98	12.54	.988	100
Residual	-3.725	3.216	.000	1.480	100
Std. Residual	-2.478	2.139	.000	.985	100
Stud. Residual	-2.546	2.221	-.002	1.010	100
Deleted Residual	-3.933	3.465	-.007	1.558	100
Stud. Deleted Residual	-2.623	2.268	-.006	1.023	100
Mahal. Distance	.562	12.171	2.970	2.345	100
Cook's Distance	.000	.158	.013	.026	100
Centered Leverage Value	.006	.123	.030	.024	100

a. Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan

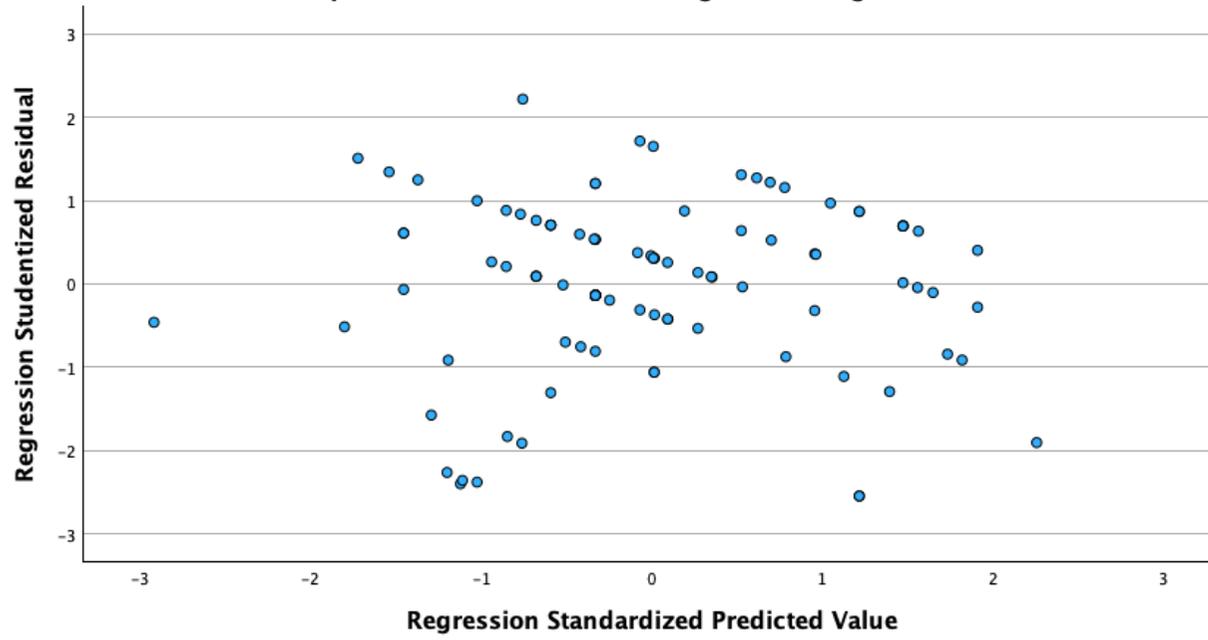
Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan



Scatterplot
Dependent Variable: Realisasi Program dan Kegiatan



DOKUMENTASI PENYEBARAN KUESIONER (FOTO MEWAKILI DARI 100 RESPONDEN)













